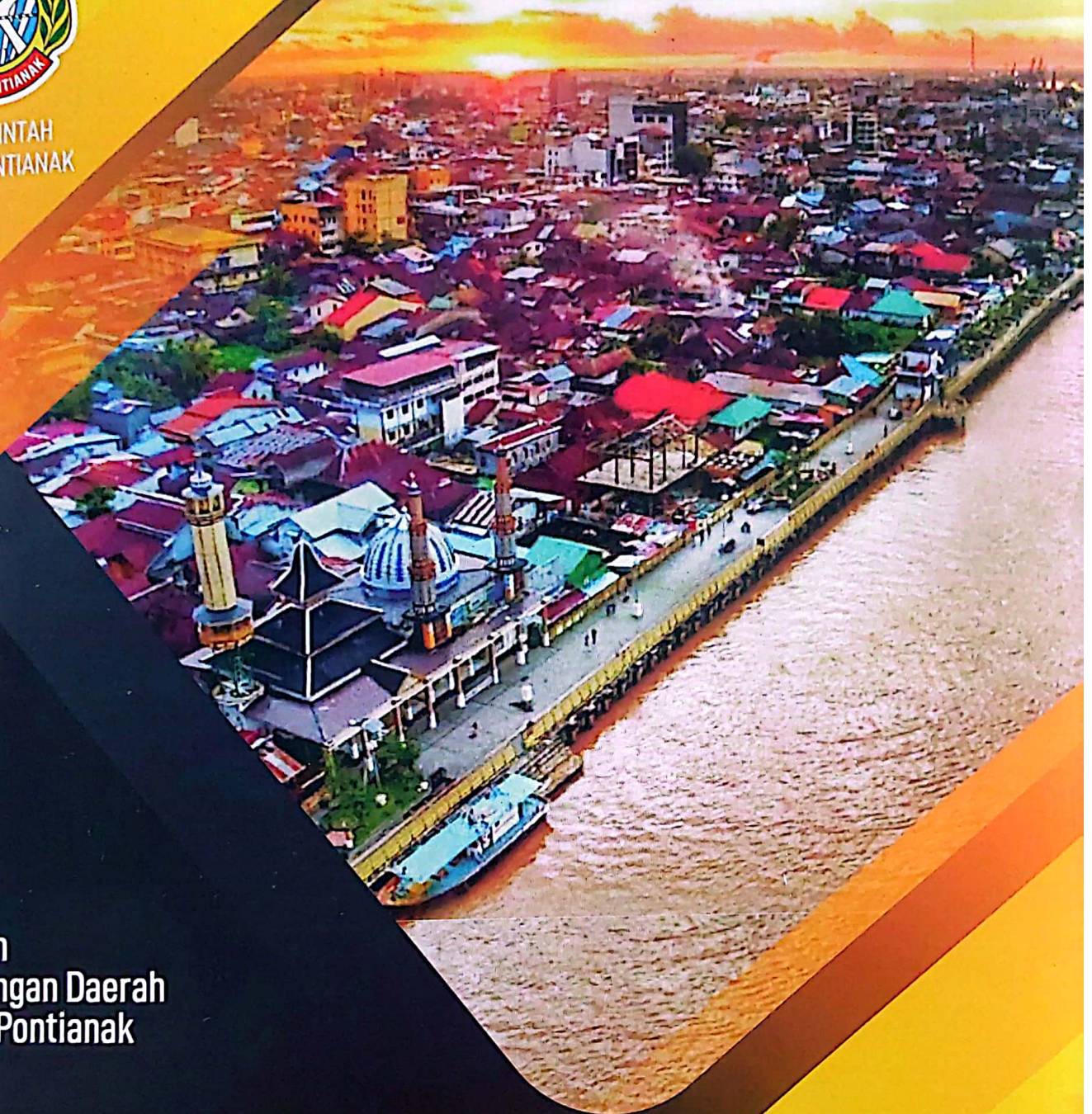




PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK



Badan
Keuangan Daerah
Kota Pontianak

KEBIJAKAN UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Pontianak

TA. 2023

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Nomor : 12 / SP – VIII / 2022
Nomor : 100 / 179 / VIII / DPRD / 2022
Tanggal : 12 Agustus 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT
Jabatan : Walikota Pontianak
Alamat Kantor : Jl. Rahadi Usman No. 3 Pontianak

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pontianak ;

2. a. Nama : SATARUDIN, SH
Jabatan : Ketua DPRD Kota Pontianak
Alamat Kantor : Jl. Sultan Syahril No. 1 A Pontianak
- b. Nama : Dr. FIRDAUS ZAR'IN, S.Pd., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak
Alamat Kantor : Jl. Sultan Syahril No. 1 A Pontianak
- c. Nama : H. NAUFAL BA'BUD, SP, M.Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak
Alamat Kantor : Jl. Sultan Syahril No. 1 A Pontianak
- d. Nama : MUHAMMAD ARIF, S.Ag
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak
Alamat : Jl. Sultan Syahril No. 1 A Pontianak

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD, diperlukan Kebijakan Umum APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 yang disepakati bersama antara DPRD Kota Pontianak dengan Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023.

Pontianak, 12 Agustus 2022

WALIKOTA PONTIANAK
Selaku,
PIHAK PERTAMA


Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT
WALIKOTA PONTIANAK

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK
Selaku,
PIHAK KEDUA


SATARUDIN, SH
KETUA


Dr. FIRDAUS ZAR'IN, S.Pd., M.Si
WAKIL KETUA


H. NAUFAL BA'BUD, SP, M.Sos
WAKIL KETUA


MUHAMMAD ARIFF, S.Ag
WAKIL KETUA

**BERITA ACARA KESEPAKATAN PENAMBAHAN KEGIATAN/ SUB
KEGIATAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
ANTARA
WALIKOTA PONTIANAK
DENGAN
KETUA DPRD KOTA PONTIANAK**

NOMOR : 11 / BA - VIII / 2022
NOMOR : 100 / 100 / VIII / 2022
TANGGAL : 12 Agustus 2022

TENTANG

**PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU
PADA KUA DAN PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT
Jabatan : WALIKOTA PONTIANAK
Alamat Kantor : Jl. Rahadi Usman No 3 Pontianak

bertindak selaku dan atas nama pemerintah kota pontianak

2. Nama : SATARUDIN, SH
Jabatan : KETUA DPRD KOTA PONTIANAK
Alamat Kantor : Jl. Sultan Syahril No. 1 A Pontianak

bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak

Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan kegiatan/ sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS TA. 2023 yang tidak terdapat dalam RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota*) TA. 2023 yang selanjutnya secara lengkap penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dimaksud disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berita acara kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas, guna menindaklanjuti pasal 343 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pada hari ini Juli 2022, dibuatlah Berita Acara Kesepakatan ini.

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2023.


Pontianak, 12 Agustus 2022

WALIKOTA PONTIANAK



Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT

KETUA DPRD KOTA PONTIANAK



SATARUDIN, SH

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	21
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	24
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN	24
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD	26
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	28
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	28
4.2. Target Pendapatan Daerah	33
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	34
5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	35
5.2. Rencana Belanja Operasi, Modal, Transfer dan Belanja Tidak Terduga	41
BAB VI KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	42
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah	44
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	44
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	47
BAB VIII PENUTUP	49
LAMPIRAN I	
LAMPIRAN II	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Outlook Perekonomian Global 8
Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Pontianak Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2017-2021 10
Tabel 2.2	Gambaran/ Kerangka Asumsi Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun 2020-2023 21
Tabel 6.1	Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2022-2023 46
Lampiran I	
Lampiran II	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Grafik 2.1	Pertumbuhan Ekonomi (dalam persen) Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2017-2021 12
Grafik 2.2	Inflasi Bulanan (dalam persen) Kota Pontianak Tahun 2021 13
Grafik 2.3	Perbandingan Inflasi (dalam persen) Kota Pontianak dengan Nasional Periode Tahunan (2017-2021) 14
Grafik 2.4	Tingkat Kemiskinan (dalam Persen) Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2017-2021 14
Grafik 2.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (dalam persen) Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2017-2021 15
Grafik 2.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2017-2021 16
Grafik 2.7	Indeks Gini Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2017-2021 18



BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan penganggaran merupakan hal yang sangat penting terlebih bila perencanaan tersebut berkaitan dengan sektor pelayanan publik (Pemerintahan). Oleh karena itu proses penentuan kebijakan harus dicermati sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin terselenggaranya Pemerintahan dan Pembangunan. Pengambilan kebijakan publik yang tepat pada tahap perencanaan akan menghasilkan target kinerja yang terarah dan optimal.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode (satu) tahun. Penyusunan KUA dalam siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan tahapan kedua yang harus dilalui Pemerintah Daerah setiap tahunnya, dimana tahapan ini dapat dilakukan setelah tahap pertama telah dilakukan yaitu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). KUA disusun dengan mengacu pada RKPD yang merupakan dokumen rencana kerja tahunan daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2020-2024.

Dokumen RKPD disusun dengan maksud untuk menyiapkan dokumen Perencanaan tahunan yang bersifat operasional untuk memberikan arah kebijakan serta Program Prioritas dan Pembangunan. KUA memuat kondisi Ekonomi Makro Daerah, asumsi penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan strategi pencapaiannya. Dalam strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam upaya mencapai target.

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bahwa sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut



dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Dokumen KUA Kota Pontianak Tahun 2023 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, yang disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS dan RAPBD Kota Pontianak T.A 2023.

Mengacu pada Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, substansi KUA Kota Pontianak Tahun 2023 mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum seperti:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi penyusunan APBD;
- c. Kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. Kebijakan Belanja Daerah;
- e. Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- f. Strategi Pencapaian, yang memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Pontianak Tahun 2023 merupakan dokumen formal kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah dan Pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau Pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan terjadi defisit atau surplus.

Dalam tahapannya, penyusunan KUA mengkoordinasikan aktivitas belanja Pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan Pemerintah Daerah untuk periode tertentu. Anggaran sebagai suatu bentuk pernyataan Kebijakan publik, dan agar dalam pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan perencanaan, maka dalam tahap awal penyusunan Kebijakan Penyusunan Anggaran



harus dibuat dengan asumsi yang realistis dan rasional. Secara eksplisit tujuan dari Penyusunan KUA Kota Pontianak Tahun 2023 adalah :

1. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan target pendapatan baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah yang akan diperoleh Pemerintah Kota Pontianak untuk periode satu tahun disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
2. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan bidang belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung untuk periode satu tahun disertai asumsi yang mendasarinya.
3. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan penerimaan baik yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu maupun yang berasal dari penerimaan kembali pinjaman untuk periode satu tahun anggaran disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
4. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan pengeluaran baik yang meliputi penyertaan modal maupun pembayaran pokok utang untuk periode satu tahun, disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);



5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Penyampaian asumsi dasar penyusunan memuat kerangka ekonomi Nasional dan Provinsi tahun mendatang akan memberikan gambaran perkiraan pergerakan perekonomian. Hal ini berkaitan dengan kontribusi pemerintah daerah terhadap regulasi/deregulasi, pembiayaan pembangunan serta terhadap pelaksanaan pembangunan tahun mendatang.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan perekonomian daerah bertujuan sebagai arahan dan panduan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Rumusan arah kebijakan pembangunan Kota Pontianak tahun 2023 (tahap pemantapan) 2023 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2020, target tahun 2021 dan prospek serta tantangan perekonomian tahun 2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2023, merupakan implementasi tahap keempat RPJMD Kota Pontianak periode 2020-2024 yang mengusung tema “Memantapkan Pemulihan Ekonomi didukung Infrastruktur yang Berkualitas” dimana tema ini telah selaras dengan tema RKPD Provinsi Kalimantan Barat dan RKP Nasional Tahun 2023. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat tergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan yang disepakati.

Berbagai langkah kebijakan diambil pemerintah guna menghentikan penyebaran pandemi Covid-19 dan mengerem lajunya penurunan kinerja perekonomian daerah. Beberapa kebijakan yang diambil pemerintah antara lain menguatkan sektor kesehatan, melindungi masyarakat dan dunia usaha, mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, serta pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pascapandemi Covid-19 yang mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali perdagangan dan jasa, industri, investasi, dan pariwisata. Menggerakkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya.



Kebijakan pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Kota Pontianak dalam perkembangan ekonominya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, kebijakan ekonomi nasional serta kebijakan ekonomi regional Kalimantan Barat, oleh karenanya untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi Kota Pontianak tahun 2023 yaitu “Memperindah dan Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan serta Optimalisasi Peran Seluruh Stakeholder untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan” perlu memperhatikan kondisi ekonomi eksternal selain fokus pada kekuatan internal Kota Pontianak agar dapat secara optimal digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak.

Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Global

Berdasarkan data Laporan *World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF)* edisi Januari 2022 menunjukkan bahwa setelah mencatat pertumbuhan di 2021 sebesar 5,9 persen, perekonomian global diprediksi mengalami moderasi ke level 4,4 persen di 2022 atau turun -0,5 *percentage points* dibandingkan WEO Oktober 2021 dan 3,8 persen di 2023. Beberapa faktor yang menjadi penyebab antara lain kemunculan varian Omicron, kenaikan harga energi dan disrupsi suplai yang mendorong lonjakan inflasi, serta adanya kebijakan pengetatan regulasi pada sektor perumahan di Tiongkok.










Moderasi terjadi secara luas pada ekonomi negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok dan Eropa. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat diperkirakan turun dari 5,6 persen di 2021, menuju 4,0 persen di 2022, dan 2,6 persen di 2023. Dalam periode yang sama, proyeksi pertumbuhan Tiongkok adalah 8,1 persen, 4,8 persen dan 5,2 persen, sedangkan di Eropa sebesar 5,2 persen, 3,9 persen, dan 2,5 persen. India diproyeksikan tumbuh tinggi sebesar 9,0 persen di 2021, dan 9,0 persen di 2022, dan kemudian mengalami moderasi menjadi 7,1 persen di 2023.

Sementara di kawasan ASEAN-5, pertumbuhan ekonomi diperkirakan justru berada dalam tren meningkat. Dalam periode 2021-2023, Indonesia diramalkan akan bertumbuh kuat sebesar 3,3 persen, 5,6 persen dan 6,0 persen, sedangkan Malaysia 3,5 persen, 5,7 persen, dan 5,7 persen. Dalam periode yang sama, pertumbuhan PDB



Thailand akan berada pada 1,3 persen, 4,1 persen, dan 4,7 persen, sedangkan Filipina 4,6 persen, 6,3 persen dan 4,9 persen.

Tabel 1.1
Outlook Perekonomian Global

Negara		Realisasi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
	Dunia	5,9	4,4	3,8
	Amerika Serikat	5,6	4,0	2,6
	Eropa	5,2	3,9	2,5
	Tiongkok	8,1	4,8	5,2
	India	9,0	9,0	7,1
	Indonesia	3,3	5,6	6,0
	Malaysia	3,5	5,7	5,7
	Thailand	1,3	4,1	4,7
	Filipina	4,6	6,3	4,9

Sumber: *World Economic Outlook (WEO), 2022*

Bukti bahwa penanganan pandemi berbuah signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia adalah kuatnya Perekonomian Indonesia yang sudah terlihat di awal tahun 2022 dan akan berlanjut ke tahun 2023. Kebijakan penanganan pandemic dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif di 2021 dan diperkuat dengan focus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di 2022 menjadi faktor penting. Beberapa risiko yang perlu diwaspadai ke depan antara lain potensi kemunculan varian baru Covid-19, isu disrupsi suplai dan volatilitas harga energy yang memberi ketidakpastian pada tingkat inflasi, risiko pada stabilitas keuangan *emerging markets*.

Dalam laporan WEO Januari 2022 tersebut, beberapa rekomendasi penguatan kerangka kebijakan yang komprehensif untuk negara-negara diutarakan, yaitu memperkuat kebijakan di sector kesehatan, termasuk pemerataan vaksin, perubahan kebijakan moneter yang harus didukung dengan komunikasi yang efektif, memperkuat posisi dan kesinambungan fiscal, memperkuat kerja sama internasional, dan melanjutkan reformasi struktural dan kebijakan perubahan iklim.



Kebijakan Ekonomi Nasional

Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN 2023), dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD, dimana RKPD itu sendiri merupakan pedoman penyusunan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023 “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka kisaran asumsi dasar ekonomi dan target pembangunan yang harus dicapai pada akhir tahun 2023 (sesuai kesepakatan antara Pemerintah dan Komisi XI RI) dirincikan sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan Ekonomi Nasional berkisar pada 5,3 – 5,9 persen, YoY;
- b. Inflasi pada kisaran 2,0-4,0 persen, Yoy;
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3 - 6,0 persen;
- d. Rasio Gini pada kisaran 0,375 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia menjadi 73,31 – 73,49;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 persen;
- g. Nilai Tukar Petani/NTP 105-107;
- h. Nilai Tukar Nelayan/NTN 107-108;
- i. Tingkat Kemiskinan 7,5 – 8,5 persen;

Kebijakan Ekonomi Provinsi

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 mengusung tema “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, Produktivitas Daerah dan Daya Saing”. Adapun lima asumsi dasar indikator ekonomi pembangunan daerah Kalimantan Barat yang ditargetkan di tahun 2023, adalah:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan sebesar 71,25;
- b. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 5,02 – 5,68 persen;
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan sebesar 5,42 – 3,98 persen;
- d. Angka Kemiskinan ditargetkan sebesar 7,08 – 7,00 persen;
- e. Rasio Gini 0,321 – 0,318.

**Kondisi Ekonomi Makro Daerah:**

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah kontribusi sektoral dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan. Kontribusi sektoral memberikan informasi tentang komposisi per sektor yang memberi andil pada perekonomian daerah. Kontribusi suatu sektor dapat meningkat secara nominal, namun menurun secara persentase. Semakin besar persentase distribusi suatu sektor dalam pembentukan PDRB, maka akan semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Disamping itu, distribusi persentase dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor dalam pembentukan PDRB sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan serta dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Bila dilihat dari pertumbuhan kegiatan ekonomi dari 16 lapangan usaha pembentuk PDRB, setengahnya (8 lapangan usaha) mengalami pertumbuhan negatif. Kondisi yang berbeda terjadi pada tahun 2021, dimana hanya tinggal 2 (dua) lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif yakni Transportasi dan Pergudangan (-4,77%) dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (-1,08%). Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 masih sama dengan tahun sebelumnya yakni Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tercatat tumbuh 38,11%, capaian ini lebih rendah dari tahun 2020 yang mencapai 50,50%. Tingginya pertumbuhan pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan social tersebut dikarenakan masih tingginya permintaan akan layanan kesehatan akibat pandemi Covid-19 dan program vaksinasi yang dilakukan secara menyeluruh untuk memutus mata rantai penularan

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Pontianak Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2017-2021

LAPANGAN USAHA / <i>INDUSTRY</i>		2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,44	3,37	4,04	5,75	1,57
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4,36	2,51	7,58	-2,12	4,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,54	5,14	5,36	25,56	3,69



LAPANGAN USAHA / <i>INDUSTRY</i>		2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,87	3,19	2,47	8,54	5,38
F	Konstruksi	6,19	1,13	0,36	-4,31	5,57
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,52	3,40	1,75	-13,50	4,97
H	Transportasi dan Pergudangan	2,53	3,30	6,46	-14,36	-4,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,94	7,61	6,52	-20,11	8,89
J	Informasi dan Komunikasi	19,62	10,26	10,30	17,11	7,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,04	10,51	- 2,56	0,97	3,50
L	Real Estate	3,27	1,48	0,92	0,69	1,03
M,N	Jasa Perusahaan	3,91	5,36	6,17	-5,16	0,47
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,60	8,79	8,91	5,26	-1,08
P	Jasa Pendidikan	1,06	1,37	3,39	-5,53	4,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,37	5,16	8,42	38,29	38,11
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,50	5,09	8,47	-13,36	0,59
Produk Domestik Regional Bruto		5,08	4,96	4,22	4,02	-3,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, Tahun 2022, dalam RKPD Kota Pontianak 2023

*) Angka Sementara

***) Angka sangat sementara

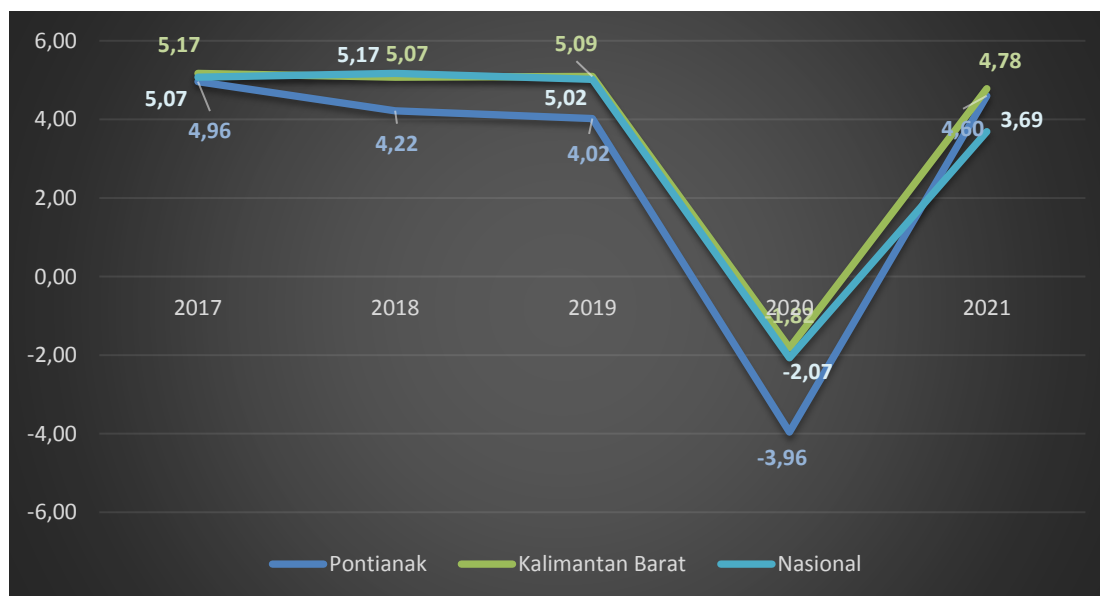
Disisi lain, Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak selama periode 2017-2021 cenderung melambat. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak mencapai 4,96% kemudian mengalami perlambatan sebanyak 0,74 poin menjadi 4,22% pada tahun 2018 dan 0,2 poin menjadi 4,02% pada tahun 2019. Tren perlambatan terus berlangsung dan mencapai puncaknya pada tahun 2020 hingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak menjadi -3,96%. Kondisi ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia hingga melumpuhkan aktivitas perekonomian di banyak negara termasuk Indonesia, dan tidak terkecuali Kota Pontianak. Pada tahun 2021, perekonomian Kota Pontianak mulai bangkit kembali seiring dengan adanya pelonggaran-pelonggaran aktivitas masyarakat yang sebelumnya sempat mengalami pembatasan akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak pada tahun 2021 tercatat sebesar 4,60%. Membaiknya perekonomian Kota Pontianak juga dialami di tingkat provinsi dan nasional. Perekonomian provinsi dan nasional yang pada tahun mengalami kontraksi, kembali pulih pada tahun 2021 masing-masing mencapai 4,78% dan 3,69%.

Bila dilihat perkembangan laju pertumbuhan ekonomi antara Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat selama lima tahun terakhir, Kota Pontianak memang selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi. Sementara bila dibandingkan dengan



Nasional, Kota Pontianak tertinggal dari perekonomian Nasional sejak tahun 2018, namun kembali berada di atas capaian nasional pada tahun 2021.

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi (dalam persen) Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2017-2021

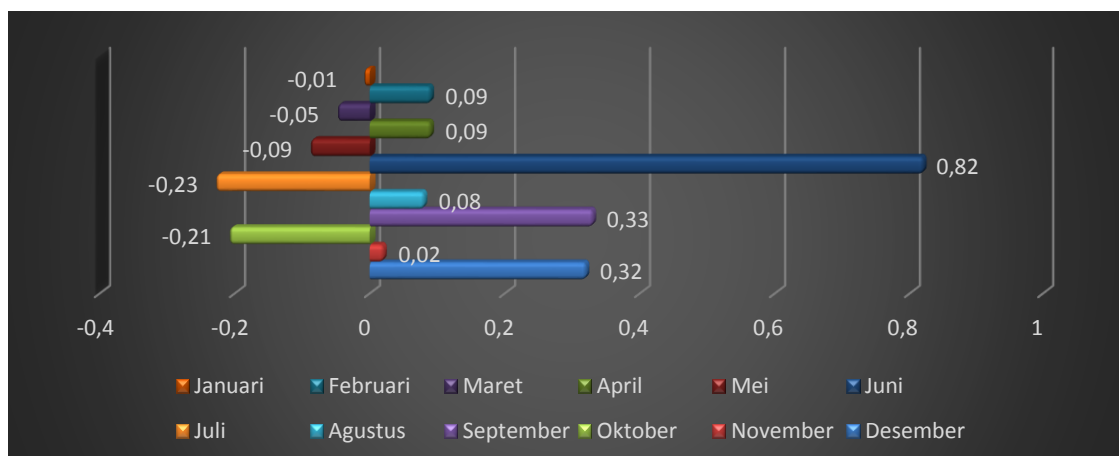


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, Tahun 2022, diolah dalam RKPD Kota Pontianak Tahun 2023

*) Angka Sementara **) Angka sangat sementara

Inflasi Kota Pontianak pada tahun 2021 tercatat sebesar 1,16%. Angka tersebut relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2020 yang mencapai 2,11%, dan merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir. Sementara inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni 3,99%.

Pada tahun 2020 Kota Pontianak mengalami inflasi sebanyak 7 bulan (Februari, April, Juni, Agustus, September, November dan Desember) dan deflasi sebanyak 5 bulan (Januari, Maret, Mei, Juli, dan Oktober). Inflasi bulanan tertinggi pada tahun 2021 terjadi pada bulan Juni yakni sebesar 0,82% yang didorong karena adanya kenaikan indeks pada kelompok pengeluaran makann, minuman, dan tembakau. Kenaikan yang justru terjadi setelah Hari Raya Idul Fitri ini disinyalir disebabkan tingginya permintaan masyarakat setelah berakhirnya PPKM mikro pada bulan Juni.

Grafik 2.2 Inflasi Bulanan (dalam persen) Kota Pontianak Tahun 2021

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2022 diolah dalam RKPD Kota Pontianak Tahun 2023

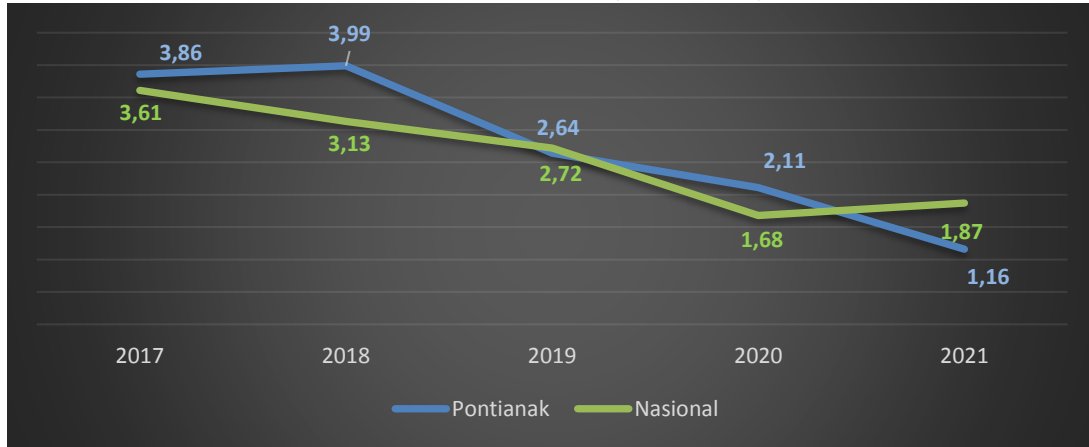
Jika pada tahun 2020 inflasi tertinggi terjadi di bulan Januari, tidak sama halnya pada tahun 2021. Pada bulan Januari tahun 2021 justru terjadi deflasi yakni sebesar 0,01%, diduga sebagai akibat belum meredanya dampak pandemi Covid-19. Pada bulan Mei yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri terjadi deflasi sebesar 0,09%, fenomena ini sangat jarang terjadi karena biasanya pada hari besar keagamaan akan terjadi peningkatan harga-harga secara umum disebabkan tingginya permintaan masyarakat. Komoditas yang menjadi penyumbang deflasi pada Mei 2021 dari subkelompok makanan seperti cabai rawit, daging sapi, kangkung, cabai merah, dan sawi hijau. Sementara itu, pada bulan Desember 2021 terjadi peningkatan angka inflasi dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 0,32% dari sebelumnya yang hanya 0,28% saja. Penurunan kasus Covid-19 secara konsisten menyebabkan diberlakukannya relaksasi pembatasan mobilitas sehingga mendorong kelancaran aktivitas ekonomi dan berdampak pada angka inflasi.

Secara Umum, kumulatif laju inflasi Kota Pontianak pada tahun 2021 sebesar 1,16%, relatif lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi kumulatif Nasional yang mencapai 1,87%. Perkembangan laju inflasi kumulatif Kota Pontianak dengan Nasional selama lima tahun terakhir relatif menunjukkan kecenderungan menurun. Inflasi Kota Pontianak pada tahun 2017, 2018 dan 2020 lebih tinggi daripada inflasi Nasional, ini menunjukkan bahwa inflasi Kota Pontianak berada di atas rata-rata inflasi yang terjadi di 84 Kota-kota yang dimonitor tingkat inflasinya sebagai penyumbang inflasi Nasional. Namun, pada tahun 2019 dan 2021 inflasi Kota Pontianak berada di bawah rata-rata



inflasi kota lainnya dikarenakan laju inflasi Kota Pontianak lebih rendah 0,08% dan dan 0,71% dari laju inflasi Nasional.

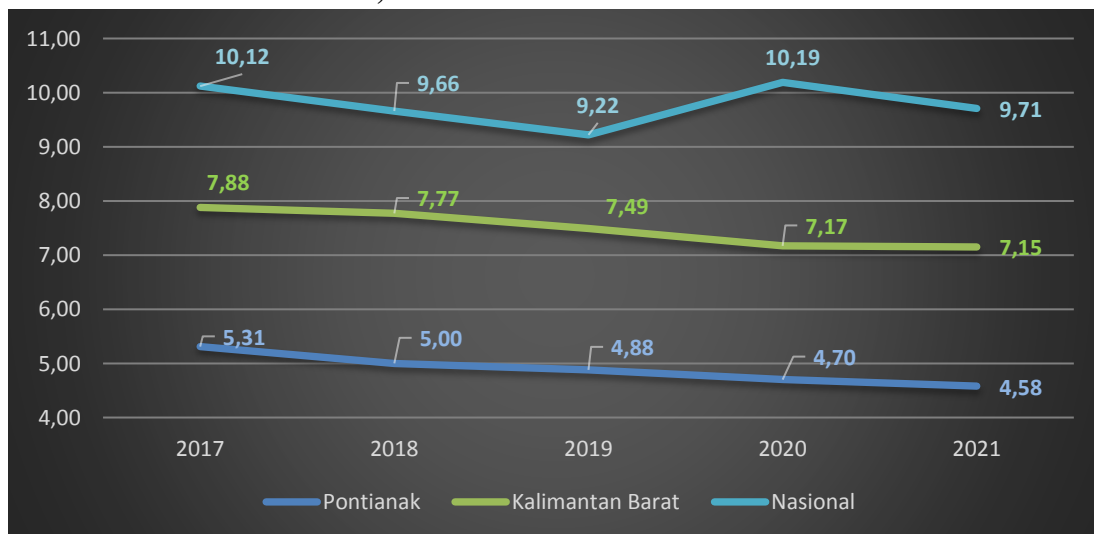
Grafik 2.3 Perbandingan Inflasi (dalam persen) Kota Pontianak dengan Nasional Periode Tahunan (2017-2021)



Sumber : BPS Kota Pontianak, 2022, diolah dalam RKPD Kota Pontianak Tahun 2023

Tingkat kemiskinan Kota Pontianak cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu 2017-2021. Pada tahun 2017 kemiskinan kota Pontianak mencapai 5,31% terus menurun menjadi 4,58%, atau terdapat 30.110 jiwa penduduk miskin di Kota Pontianak pada tahun 2021. Tingkat kemiskinan Kota Pontianak ini relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional. Grafik di bawah ini menyajikan tingkat kemiskinan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional selama tahun 2017-2021:

Grafik 2.4. Tingkat Kemiskinan (dalam persen) Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2017-2021



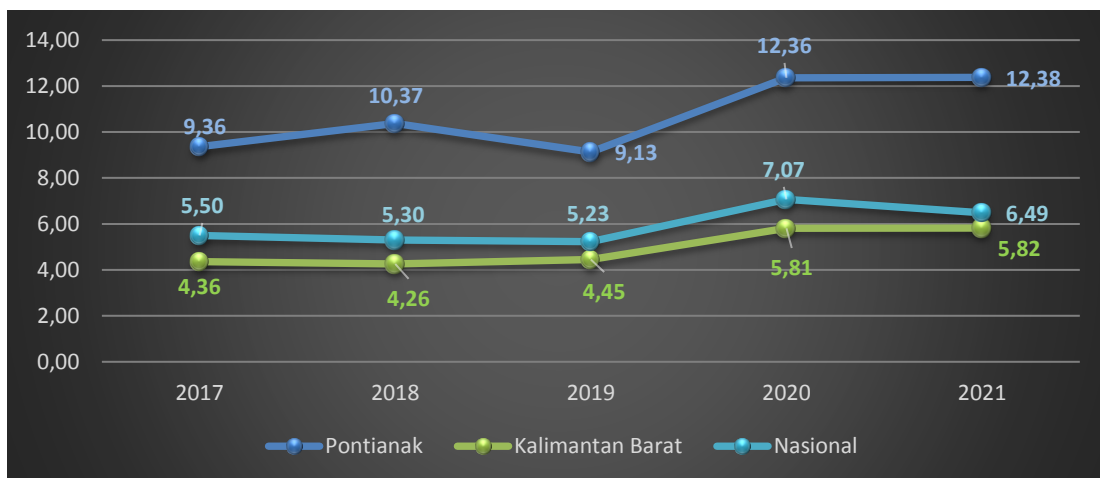
Sumber: BPS Kota Pontianak, 2022, diolah dalam RKPD Kota Pontianak Tahun 2023



Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pontianak cukup berfluktuasi sepanjang tahun 2017-2020. Pada tahun 2017, Pengangguran di Kota Pontianak tercatat sebanyak 9,36%. Angka tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 10,37%, namun kembali dapat diturunkan di tahun 2019 menjadi 9,13%. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka mengalami lonjakan sangat signifikan menjadi 12,36%, dan meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 12,38%. Pada tahun 2021 terdapat 37.251 orang penduduk usia kerja di Kota Pontianak yang tidak bekerja. Angka ini merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Jumlah pengangguran pada tahun 2021 meningkat sebanyak 9.362 orang dari jumlah pengangguran pada tahun 2017 yang hanya berjumlah 27.889 orang.

Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Pontianak pada tahun 2020 dan 2021 disinyalir karena dampak wabah Covid-19 yang menyebabkan banyak perusahaan/usaha harus mengurangi jumlah karyawan serta kurang tersedianya lapangan kerja yang tepat untuk para penganggur.

Grafik 2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (dalam persen) Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2017-2020



Sumber: BPS Kota Pontianak, 2022, diolah dalam RKPDP Kota Pontianak Tahun 2023

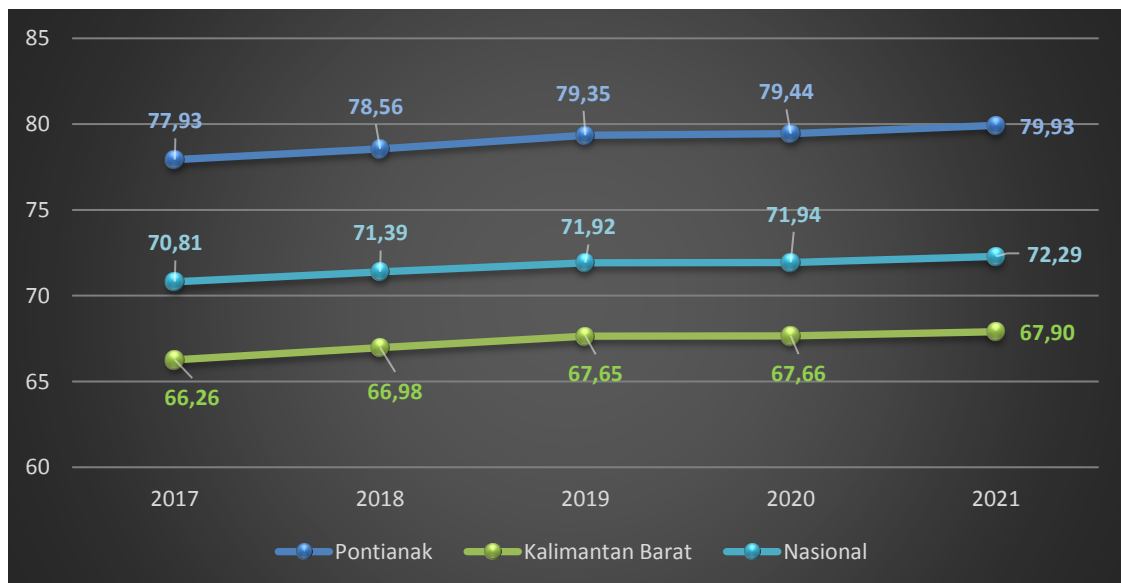
Dibandingkan dengan TPT di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, Nasional, serta kabupaten-kabupaten lainnya di Kalimantan Barat, TPT di Kota Pontianak memang terhitung tinggi. Sebagaimana daerah perkotaan pada umumnya, Kota Pontianak memiliki daya tarik ekonomi yang sangat kuat bagi pencari kerja dari kabupaten-kabupaten lainnya di Kalimantan Barat untuk mencari kerja di Kota Pontianak. Sehingga urbanisasi dan tingginya persaingan dalam mencari kerja menjadi resiko yang



terjadi di pasar kerja di Kota Pontianak. Di samping itu tingginya pengangguran di Kota Pontianak seperti halnya daerah perkotaan lainnya diisi oleh angkatan kerja terdidik yang cenderung memilih-milih pekerjaan. Lain halnya dengan di daerah pedesaan yang kendatipun sebagian besar penduduknya bukanlah tenaga terdidik namun tidak memilih-milih pekerjaan, pekerjaan apapun mereka jalani sehingga tingkat pengangguran di pedesaan relatif lebih rendah.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, IPM Kota Pontianak menunjukkan kenaikan yang cukup berarti dari 77,93 pada tahun 2017 menjadi 79,93 pada tahun 2021 atau naik hingga 2 poin. Berdasarkan pengkategorian PBB, kinerja pembangunan manusia Kota Pontianak masuk kategori “IPM Tinggi” karena berada pada kisaran indeks 70-80. Bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, IPM Kota Pontianak berada di atas keduanya. Pada tahun 2019, IPM Provinsi Kalimantan Barat baru mencapai 67,90 kendatipun sudah berada pada kategori “IPM Sedang”, namun angka tersebut masih berada di bawah IPM Nasional yang mencapai 72,29 atau kategori “IPM Tinggi”.

Grafik 2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022, diolah dalam RKPD Kota Pontianak Tahun 2023.

Kenaikan IPM Kota Pontianak selama periode 2017-2021 disebabkan oleh naiknya semua indeks komponen pembentuk IPM yakni Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan. Angka Harapan Hidup/Usia Harapan Hidup mengalami peningkatan dari 72,17 tahun



pada tahun 2017 menjadi 73,12 tahun pada tahun 2021 atau meningkat 0,95 tahun. Rata-rata Lama Sekolah naik dari 9,79 tahun pada tahun 2017 menjadi 10,43 tahun pada tahun 2021 atau meningkat 0,64 tahun. Harapan Lama Sekolah mengalami peningkatan dari 14,72 tahun pada tahun 2015 menjadi 15,01 tahun pada tahun 2021 atau meningkat 0,29 tahun. Sedangkan Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan mengalami peningkatan dari 13.904.000,- rupiah pada tahun 2017 menjadi 14.610.000,- rupiah pada tahun 2021 atau naik sebesar 706.000 rupiah.

Kenaikan semua indeks komponen IPM selama periode 2017-2021 menggambarkan bahwa adanya dampak positif dari pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Pontianak. Pembangunan infrastruktur kesehatan telah meningkatkan Angka Harapan Hidup manusia selama lima tahun terakhir. Pembangunan bidang pendidikan baik secara fisik maupun non fisik berhasil meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah maupun angka Harapan Lama Sekolah penduduk Kota Pontianak. Demikian pula pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan penduduk dan mendorong peningkatan pengeluaran perkapita masyarakat Kota Pontianak.

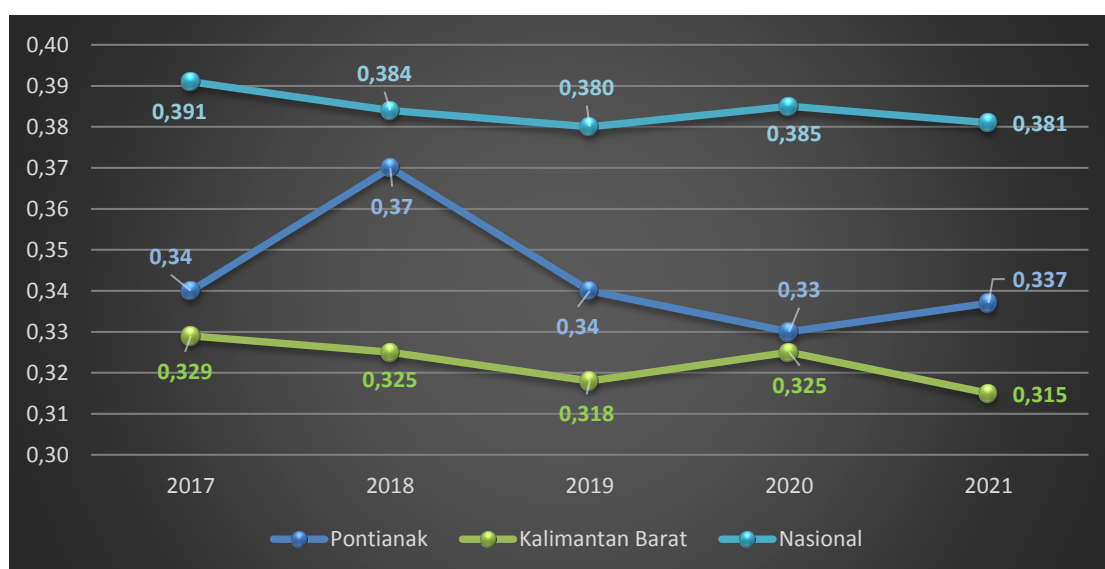
Pembangunan yang dilakukan di Kota Pontianak belum tentu dirasakan dalam proporsi yang sama oleh setiap individu masyarakat Kota Pontianak. Hal ini disebabkan adanya perbedaan distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Pontianak dapat dilihat melalui Indeks Gini (Gini Rasio).

Berdasarkan data dari BPS, indeks gini Kota Pontianak sepanjang tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan adanya fluktuasi. Ketimpangan tertinggi selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2018 dimana pada saat itu indeks gini tercatat sebesar 0,37. Indeks ini berhasil diturunkan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi 0,34 pada tahun 2019 dan 0,33 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 indeks ini sedikit mengalami peningkatan kembali namun tidak setinggi tahun 2018, yakni hampir mencapai 0,34 (0,337). Hal ini menunjukkan semakin adanya perbaikan pemerataan pendapatan masyarakat Kota Pontianak.

Dilihat dari pengelompokan ketimpangan sesuai kriteria UNDP ketimpangan Kota Pontianak tergolong sedang karena nilainya di antara 0,3 dan 0,5. Meskipun bila dibandingkan dengan nasional ketimpangan di Kota Pontianak lebih rendah, namun

masih lebih tinggi dari ketimpangan di tingkat Provinsi serta kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Barat. Ini menunjukkan perlu adanya upaya peningkatan pemerataan hasil pembangunan khususnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat Kota Pontianak. Pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Pontianak agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat.

Grafik 2.7 Indeks Gini Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022, diolah dalam RKPD Kota Pontianak Tahun 2023.

Asumsi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023:

Memasuki pertengahan tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak diperkirakan masih kuat seiring dengan meredanya penyebaran Covid-19. Pandemi Covid-19 diprediksi akan bertransisi menjadi endemi. Prakiraan pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh akselerasi vaksinasi, kebijakan persyaratan perjalanan yang lebih longgar, pembukaan ekonomi yang semakin meluas yang dapat mendorong perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi. Dengan perkembangan itu, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan berada pada kisaran 4,20-5,00%. Dari sisi produksi, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai kontributor terbesar bagi perekonomian Kota Pontianak yang sempat tergeser oleh Industri Pengolahan dan Konstruksi pada masa pandemi, diprediksi akan kembali



bangkit seiring dengan pulihnya aktivitas perekonomian. Sementara dari sisi pengeluaran, pemulihan konsumsi masyarakat akan terdorong dengan kuat dan berperan sebagai katalisator pemulihan ekonomi.

Momentum pemulihan ekonomi Kota Pontianak terus berlanjut meskipun dibayangi risiko dan tantangan baik eksternal maupun internal. Tantangan eksternal yang harus terus diwaspadai antara lain ketidakpastian penyebaran Covid-19 dan varian turunannya, tensi geopolitik, dan tekanan inflasi global. Risiko penyebaran Covid-19 terutama atas kemungkinan munculnya varian baru masih terus menghantui. Disiplin penerapan protokol kesehatan dan penguatan kapasitas kesehatan harus tetap dilakukan. Selain itu, akselerasi vaksinasi dan memadainya ketersediaan vaksinasi menjadi faktor krusial dalam penanganan pandemi secara keseluruhan, terlebih dengan adanya relaksasi mobilitas seiring persiapan untuk transisi menuju endemi. Konflik geopolitik Rusia dan Ukraina meningkatkan risiko ekonomi global yang menimbulkan dampak diantaranya memicu kenaikan harga komoditas (seperti gandum, pupuk, minyak nabati dan migas) dan meningkatkan tekanan inflasi global. Kondisi perekonomian global dan nasional pada akhirnya dapat berimbas pula pada pemulihan ekonomi Kota Pontianak. Sementara itu tantangan yang berasal dari internal antara lain masih adanya scars akibat krisis Covid-19 yaitu learning loss, belum kembalinya tingkat pengangguran ke level sebelum pandemi serta belum pulihnya dunia usaha secara optimal.

Tahun 2022 tekanan harga di Kota Pontianak terpantau meningkat, dimana peningkatan harga ini didorong oleh kenaikan harga pada kelompok *volatile food*. Kenaikan harga juga didorong oleh kenaikan harga bahan bakar rumah tangga dan angkutan udara seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Meskipun demikian, inflasi Kota Pontianak diperkirakan masih tetap terkendali dengan didukung oleh kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menciptakan bauran kebijakan yang tepat bersama Bank Indonesia.

Pemulihan ekonomi Kota Pontianak terjadi secara berkualitas dan inklusif. Perbaikan ekonomi dan program perlindungan sosial selama pandemi Covid-19 berhasil mencegah tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan. Daya beli penduduk kelompok 40 persen ke bawah relatif dapat terjaga dengan adanya berbagai program perlindungan sosial pemerintah. Program ini mampu memitigasi dampak negatif pandemi yang masih sehingga mampu menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 4,58% (30.110 orang) pada



tahun 2021. Angka kemiskinan diharapkan dapat ditekan lagi pada tahun 2023 demikian halnya dengan ketimpangan. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengalami kenaikan akibat Pandemi Covid-19 diharapkan bisa kembali turun ke level 8,4 – 10,30% pada tahun 2023.

Indikator kesejahteraan lainnya yang mengalami perbaikan pada tahun 2021 adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kota Pontianak pada tahun 2020 meskipun mengalami peningkatan namun tidak setinggi peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya, dengan kata lain terjadi perlambatan peningkatan IPM pada tahun 2020 yakni hanya 0,09 poin saja. Perlambatan ini sebagai dampak merebaknya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya penurunan pada dimensi standar hidup layak. Pada tahun 2021 IPM Kota Pontianak mengalami peningkatan sebesar 0,49 poin menjadi 79,93 yang didorong oleh peningkatan pada semua dimensi, baik dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan maupun dimensi standar hidup layak. Adanya peningkatan kembali pada dimensi standar hidup layak menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat seiring dengan respon kebijakan pemerintah dalam menghadapi krisis akibat pandemi serta perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi riil per kapita. Indikator IPM lainnya seperti Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup Kota Pontianak juga diperkirakan akan terus meningkat secara bertahap yang didukung oleh upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta peningkatan kemampuan daya beli masyarakat.

Dengan dukungan berbagai faktor dan meningkatnya optimisme pemulihan ekonomi, ekonomi Kota Pontianak diperkirakan akan terus tumbuh kedepannya. Berikut ini gambaran/kerangka proyeksi/asumsi dasar ekonomi makro Kota Pontianak Tahun 2023:



Tabel 2.2.
Gambaran/Kerangka Asumsi Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun 2020-2023

No	Uraian	Realisasi		Target 2022	Proyeksi 2023
		2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-3,96	4,60	3,70 – 4,30	4,20 – 5,00
2	Inflasi (%)	2,11	1,16	3 ± 1	2,5 ± 1
3	Angka Kemiskinan (%)	4,70	4,58	4,41 – 4,46	4,31 – 4,34
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	12,36	12,38	8,50 – 10,46	8,40 – 10,30
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,44	79,93	80,20	80,40
6	Indeks Gini	0,33	0,337	0,339	0,339

Sumber: BPS Kota Pontianak, Proyeksi Bappeda Kota Pontianak 2022 Berdasarkan Hasil FGD dalam RKPD Kota Pontianak Tahun 2023

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan kondisi ekonomi global, nasional dan regional yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Kota Pontianak, kebijakan keuangan Pemerintah Kota Pontianak tahun 2023 secara umum diarahkan untuk menanggulangi isu-isu strategis yang memerlukan penanganan cepat dan tepat, dan mengarahkan pada sektor pendorong utama pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai. Sebagaimana hal tersebut, maka arah kebijakan keuangan berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 disusun untuk mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kota Pontianak.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun ketidakterseidannya pendanaan pada suatu urusan pemerintahan. Sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/ Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pontianak dilakukan secara tertib, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan



rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan keuangan daerah ditetapkan untuk memastikan saran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan sumberdaya secara efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan; arah kebijakan pendapatan daerah; arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah. Adapun kebijakan umum dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Pontianak Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.**

Transparansi tentang Anggaran Daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggung jawabkan.

b. **Disiplin Anggaran.**

Belanja Daerah Kota Pontianak diarahkan dengan mengutamakan belanja untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah, dan pada tahun 2021 program strategis lebih diprioritaskan pada usaha-usaha untuk mengatasi permasalahan dan isu-isu strategis yang terjadi serta untuk memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Pontianak tahun 2020 - 2024.

c. **Keadilan Anggaran.**

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan restribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

d. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.**

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna



kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas, tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

e. Sistem Anggaran Surplus/Defisit.

Sistem anggaran surplus/defisit ini akan memperjelas anggaran masing-masing dinas/satuan kerja maupun APBD secara keseluruhan apakah surplus/defisit apabila dilihat dari jumlah pendapatan dan jumlah kebutuhan pengeluaran/belanja baik langsung maupun tidak langsung. Dengan sistem surplus/defisit akan diketahui apakah pemerintah dapat melakukan efisiensi atau tidak.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Keberhasilan Pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19 menjadi pijakan penting dalam menyambut tahun mendatang. Ditengah upaya pemulihan ekonomi, pemerintah mulai mempersiapkan kebijakan fiskal 2023 meskipun masih tingginya risiko dan ketidakpastian ke depan. Seiring dengan pandemi yang bertransisi menjadi endemi tahun ini, peran APBN dirumuskan secara optimal untuk mempercepat pemulihan dan penciptaan lapangan kerja, serta menjadi penyerap risiko (*shock absorber*) dalam menghadapi tantangan global yang saat ini terjadi. Ada dua tantangan besar lain yang menjadi perhatian dan diantisipasi oleh Pemerintah selain pandemi Covid-19 yakni lonjakan inflasi global, terutama akibat konflik Rusia-Ukraina dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global khususnya di Amerika Serikat yang menuntut kita untuk melakukan berbagai penyesuaian, termasuk di dalamnya penyesuaian kebijakan guna mempersiapkan pondasi yang kokoh dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju negara maju. Untuk merespon hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Pontianak akan memastikan bahwa RAPBD Tahun 2023 diarahkan agar tetap responsif dan fleksibel untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta melanjutkan pemulihan ekonomi disamping memastikan agar fiskal tetap sehat dan berkelanjutan guna mendukung keberhasilan Pemerintah di tahun 2023.

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kerangka ekonomi makro, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, penguatan reformasi kebijakan terus diarahkan agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Dengan mencermati berbagai hal, Arah Kebijakan Fiskal tahun 2023 mengusung tema “peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”, yang berfokus pada 5 (lima) strategi yaitu: 1) peningkatan kualitas SDM yang mencakup kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan; 2) percepatan pembangunan infrastruktur; 3) penguatan reformasi birokrasi; 4) revitalisasi industri;



dan 5) pengembangan ekonomi hijau. Peningkatan produktivitas nasional dilakukan melalui penguatan efektivitas anggaran prioritas. Empat pos anggaran prioritas yang meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan dan infrastruktur ini mendapatkan alokasi yang besar pada APBN. Pos anggaran kesehatan dan perlindungan social mendapatkan alokasi tambahan sebagai penyesuaian karena pandemic Covid-19 sejak tahun 2020-2021. Namun mulai tahun 2022 sudah mulai dilandaikan karena sudah menuju normalisasi. Untuk anggaran pendidikan dialokasikan sesuai mandate Undang-Undnag yaitu 20 persen dari anggaran belanja.

Sementara itu, kebijakan umum belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2023 disusun untuk mendukung kelanjutan pemulihan ekonomi nasional seiring dengan konsolidasi fiskal. Selain belanja K/L, yang juga mendapatkan alokasi tinggi pada APBN 2023 adalah belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Penguatan kualitas TKDD menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung arah kebijakan tersebut, yang diarahkan untuk peningkatan quality control anggaran TKDD dan mendorong peningkatan peran daerah dalam pemulihan ekonomi, serta peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. TKDD Tahun 2023 diarahkan untuk pemerataan layanan dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH), diarahkan untuk melanjutkan kebijakan pengelolaan DBH yang tepat waktu, tepat jumlah, dan akuntabel, melanjutkan dukungan DBH CHT dengan prioritas pada bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial, jarring pengaman sosial serta pemulihan ekonomi dampak COVID-19.
2. Dana Alokasi Umum, diarahkan untuk mendukung kebijakan yang dapat mendorong upaya peningkatan kualitas layanan publik daerah dan penguatan kualitas SDM, upaya dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, diarahkan untuk refocusing dan simplikasi jenis, bidang, dan kegiatan DAK Fisik untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan kesenjangan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan konektivitas, dan peningkatan sinergi dengan belanja dan sumber dana lainnya.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, diarahkan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi pada sektor yang mendukung penyerapan tenaga kerja dan investasi, peningkatan dan pemerataan kemampuan pelayanan kesehatan.



5. Dana Insentif Daerah, diarahkan untuk melanjutkan kebijakan mendorong kemandirian daerah dan peningkatan kualitas belanja APBD, penguatan indikator yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional, dan mengedepankan kriteria kinerja yang dinamis dan strategis.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

Di tengah tantangan internal yakni transisi menuju endemi COVID-19, serta kondisi perekonomian global dan nasional akibat dampak kenaikan harga komoditas (seperti gandum, pupuk, minyak nabati dan migas) yang pada akhirnya berimbas pula pada pemulihan ekonomi Kota Pontianak, membuat pemerintah daerah mengambil kebijakan maupun langkah-langkah guna penguatan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi dalam rangka pemulihan perekonomian daerah, dengan peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan memperkuat perekonomian daerah melalui belanja, menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor-impor, serta refocusing program dan realokasi anggaran yang tentunya bersinergi dengan program pemerintah pusat.

Salah satu upaya adalah menciptakan iklim yang kondusif serta peningkatan daya saing yang diperankan oleh pemerintah, baik dari dana APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota yang ditujukan untuk berbagai program dan kegiatan yang menyangkut kepentingan umum seperti infrastruktur jalan, sanitasi, air bersih, dan lain-lainnya sehingga diharapkan dapat menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan oleh pihak swasta dan masyarakat.

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2023 yang mengusung tema “Memantapkan Pemulihan Ekonomi didukung Infrastruktur yang Berkualitas”. Mempertimbangkan kondisi proyeksi perekonomian daerah tahun 2023, maka asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023, antara lain:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,20 – 5,00 persen;
- 2) Angka Kemiskinan turun menjadi 4,31 – 4,34 persen;
- 3) Laju Inflasi dapat ditekan pada angka $2,5 \pm 1$ persen;
- 4) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 80,40;
- 5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat ditekan menjadi 8,40 -10,30 persen;



6) Indeks Gini mencapai 0,339.

Sejalan dengan asumsi dasar yang digunakan, APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 diharapkan mampu menjabarkan prioritas-prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD disamping mampu memberikan arah kebijakan dalam menangani permasalahan-permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah Kota Pontianak meliputi:

- a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan/atau kepentingan umum.

Adapun struktur anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka mendukung program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tercatat besaran jumlah volume APBD Kota Pontianak Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 1.855.235.985.305,00 yang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.1.834.685.985.305,00
2. Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1.776.735.985.305,00
3. Penerimaan Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.20.550.000.000,00
4. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 78.500.000.000,00.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah, dan keterisian pembiayaan anggaran. Kebijakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program, dan juga perkembangan realisasi APBD pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD, sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah guna mewujudkan visinya. Dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salah satu instrument untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dari sisi operasionalisasi pelaksanaan program-program pemerintah, alokasi belanja APBD dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diketahui adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Penyusunan anggaran tahun 2023 secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan, bahwa pendapatan daerah



diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah. Struktur pendapatan daerah terdiri atas (1) pendapatan asli daerah; (2) pendapatan transfer; dan (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk yang tahun anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempedomani kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari:

- a. Penganggaran pajak daerah dan retibusi daerah, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang retibusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retibusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;



- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.
- c. Penganggaran lain-lain PAD yang sah, yang meliputi;
- 1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 3) Hasil kerja sama daerah;
 - 4) Jasa giro;
 - 5) Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - 6) Pendapatan bunga
 - 7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - 8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - 9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - 10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - 11) Pendapatan denda pajak daerah;
 - 12) Pendapatan denda retribusi daerah;
 - 13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - 14) Pendapatan dari pengembalian;
 - 15) Pendapatan dari BLUD; dan
 - 16) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan/Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi:
- a. Dana Bagi Hasil (DBH), yang meliputi pendapatan dari DBH-Pajak, DBH-Cukai Hasil Tembakau, DBH-Sumber Daya Alam, serta Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi;



- b. Dana Alokasi Umum (DAU), yakni pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana pendapatan DAU Tahun 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan presiden mengenai Rincian APBN;
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK), yakni pendapatan yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan Dak Nin Fisik, dimana pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPA disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- d. Dana Insentif Daerah, yang dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah.
- e. Dana Otonomi Khusus, yang dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus.
- f. Dana Keistimewaan, dialokasikan kepada Daerah Istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Dana Desa, yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- h. Dana Tambahan Infrastruktur, diperuntukkan bagi Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat;
 - i. Pendapatan Bagi Hasil, yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Pendapatan Bantuan Keuangan, yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- Adalah pendapatan daerah dari sumber lain, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi.
- a. Pendapatan Hibah, yang merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Dana Darurat, yakni dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Hibah Dana BOS, untuk satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pontianak diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penerimaan Kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.



Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat di samping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Kota Pontianak akan terus berupaya menggali potensi pendapatan daerah guna meningkatkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut melalui peningkatan Penggalan Potensi Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi tanpa mengabaikan sektor dunia usaha, yang diikuti pula dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah serta mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah dalam KUA Kota Pontianak Tahun 2023 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun rancangan kebijakan tersebut diuraikan sebagai berikut :

Rancangan kebijakan Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp.1.834.685.985.305,00 dari Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.1.807.251.056.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 597.631.308.000,00 naik 6,37% atau bertambah Rp.35.766.229.500,00 dari Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp. 561.865.078.500,00
2. Pendapatan Transfer Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 1.229.554.677.305,00 turun 0,67% atau berkurang Rp. 8.331.300.695,00 dari Pendapatan Transfer dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp. 1.237.885.978.000,00.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan tetap sebesar Rp. 7.500.000.000,00 dari Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.7.500.000.000,00.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diketahui adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar baik itu (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta (f) sosial. Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Sedangkan belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.



5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah Kota Pontianak diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Pemerintah Kota Pontianak menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kerjanya.

Secara umum, kebijakan belanja Pemerintah Kota Pontianak diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dimana arah pengelolaan belanja daerah Kota Pontianak tahun 2023 diharapkan berorientasi pada:

- a. Anggaran daerah bertumpu pada kepentingan publik dan untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah.
- b. Anggaran daerah yang dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*).
- c. Anggaran Daerah yang efektif dan efisien
- d. Anggaran daerah yang mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
- e. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- f. Anggaran daerah yang dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.

Disisi lain, anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksanaannya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*. Basis untuk melaksanakan pengelolaan anggaran daerah adalah bermuara pada suatu perencanaan anggaran yang matang, dengan melihat potensi pendapatan, melakukan efisiensi belanja serta mengembangkan sumber pembiayaan.



Penganggaran belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan/atau tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2023.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi



- Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran Tambahan Penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
 - g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - h) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi pejabat/ASN yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
 - i) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD, dan tunjangan khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
 - j) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.



- k) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN.
- b. Belanja Bunga
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Belanja Subsidi
Belanja subsidi dapat dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas dimana produk yang dihasilkan adalah kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
- d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Kebijakan belanja hibah dianggarkan adalah salah satu bentuk instrument bantuan bagi Pemerintah Kota Pontianak, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan kepada perusahaan daerah, kelompok kemasyarakatan/perorangan, organisasi kemasyarakatan, instansi vertikal, organisasi semi pemerintah serta organisasi non pemerintah. Pemberian dilakukan secara selektif sesuai dengan



urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Kebijakan Anggaran Hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa adalah sebagai berikut:

- a. Hibah dalam bentuk uang, barang dan Jasa, dianggarkan pada kelompok belanja operasional Perangkat Daerah.
- b. Hibah dalam bentuk barang, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah kelompok belanja operasional.
- c. Hibah dalam bentuk jasa, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah dalam kelompok belanja operasional.

Kebijakan Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Untuk memenuhi fungsi APBD, bantuan sosial sebagai instrument keadilan dan pemerataan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung bersifat stimulant bagi program dan kegiatan pemerintah daerah pada umumnya.

Kebijakan Anggaran bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan dalam kelompok belanja operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 - b. Bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah dalam kelompok belanja operasional.
 - c. Pada tahun 2023, Bantuan Sosial akan dikelola melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang berpusat di Dinas Sosial.
- e. **Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah**
- Pemerintah kabupaten/kota dapat menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3)



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

f. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan.

h. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

i. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.



5.2. Rencana Belanja Operasi, Modal, Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Adapun kebijakan Belanja Daerah dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 1.776.735.985.305,00 turun 2,46% atau berkurang sebesar Rp. 44.804.387.445,00 dari Belanja Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp. 1.821.540.372.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 1.258.881.581.331,00 turun 4,10% atau berkurang Rp. 53.878.986.579,00 dari Belanja Operasi di dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp. 1.312.760.567.910,00.
2. Belanja Modal dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 515.854.403.974,00 naik 1,71% atau bertambah senilai Rp. 8.655.438.202,00 dari belanja Modal pada APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp. 507.198.965.772,00.
3. Belanja Tak Terduga dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp.2.000.000.000,00 naik 26,52% atau bertambah Rp.419.160.932,00 dari APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.1.580.839.068,00.

Adapun beberapa kebijakan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan Tahun Jamak dengan perkiraan waktu maksimal 4 (empat) tahun anggaran dapat dilihat pada lampiran 1 yang merupakan kesatuan dari dokumen ini.

Selain itu, Tambahan Penghasilan Pegawai kepada pegawai ASN yang selanjutnya disingkat dengan TPP dianggarkan pada tahun 2023 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan telah memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.



BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pengelolaan pembiayaan daerah diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Struktur pembiayaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Struktur pembiayaan akan memperlihatkan kinerja anggaran apakah mengalami defisit ataukah surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, ada beberapa jenis penerimaan daerah yang dapat dijadikan pilihan untuk menutup defisit tersebut. Sebaliknya apabila terjadi surplus kinerja anggaran, ada beberapa jenis pengeluaran daerah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah yakni untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah hakikatnya adalah dimaksudkan untuk tujuan:

1. Peningkatan manajemen pembiayaan daerah mengarah kepada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
2. APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah :
 - a. Melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro / deposito,
 - b. Penyertaan modal, atau
 - c. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
3. APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah :
 - a. Memanfaatkan anggaran yang berasal dari SILPA tahun lalu, atau
 - b. Menjual aset/kekayaan daerah,
 - c. Melakukan pinjaman / menjual obligasi,
 - d. Menunda pelaksanaan kegiatan sesuai skala prioritas.

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
PEMBIAYAAN DAERAH 1. Penerimaan Pembiayaan a. SiLPA; b. Pencairan Dana Cadangan; c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; d. Penerimaan Pinjaman Daerah; e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pengeluaran Pembiayaan a. Pembayaran Cicilan okok Utang Yang Jatuh Tempo; b. Penyertaan Modal Daerah; c. Pembentukan Dana Cadangan; d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	PEMBIAYAAN DAERAH 1. Penerimaan Pembiayaan a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); b. Pencairan Dana Cadangan; c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; d. Penerimaan Pinjaman Daerah; e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pengeluaran Pembiayaan a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; b. Penyertaan Modal Daerah; c. Pembentukan Dana Cadangan; d. Pemberian Pinjaman Daerah; e. Pengeluaran Pembiayaan Linnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan penerimaan daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi riil realisasi yang dicapai. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerimaan pembiayaan daerah meliputi:

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut dapat bersumber dari:

- a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - d. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - e. Penghematan belanja;
 - f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besaran sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
 3. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengeluaran pembiayaan daerah meliputi:

1. Pembayaran Pokok Utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.



2. Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.
3. Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah untuk memperkuat struktur permodalan.
4. Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD guna pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
5. Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.
6. Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun rancangan kebijakan Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam Rancangan APBD Kota Pontianak Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.20.550.000.000,00 turun 0,72% atau berkurang sebesar Rp.53.239.316.250,00 dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.73.789.316.250,00.
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di dalam Rancangan APBD Kota Pontianak Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.78.500.000.000 naik 0,32% atau bertambah Rp.19.000.000.000,00 dari Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.59.500.000.000,00.



Tabel 6.1 Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2022-2023

KODE	URAIAN	APBD TA. 2022	RAPBD TA. 2023
4	PENDAPATAN DAERAH	1.807.251.056.500,00	1.834.685.985.305,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	561.865.078.500,00	597.631.308.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	378.270.628.500,00	418.100.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	56.202.250.000,00	60.388.648.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	23.370.000.000,00	25.004.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	104.022.200.000,00	94.138.660.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.237.885.978.000,00	1.229.554.677.305,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	970.278.660.000,00	982.783.017.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	267.607.318.000,00	246.771.660.305,00
4.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
5	BELANJA DAERAH	1.821.540.372.750,00	1.776.735.985.305,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.312.760.567.910,00	1.258.881.581.331,00
5.1.01	Belanja Pegawai	676.681.269.090,00	655.385.323.268,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	574.464.996.811,00	524.510.904.863,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	1.200.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	54.794.302.009,00	70.965.353.200,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.820.000.000,00	6.820.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	507.198.965.772,00	515.854.403.974,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.580.839.068,00	2.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	14.289.316.250,00	-57.950.000.000,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	73.789.316.250,00	20.550.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	73.739.316.250,00	20.500.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	59.500.000.000,00	78.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	14.500.000.000,00	16.500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	45.000.000.000,00	62.000.000.000,00
	VOLUME	1.881.040.372.750,00	1.855.235.985.305,00
	VOLUME APBD (Pendapatan + penerimaan pembiayaan)	1.881.040.372.750,00	1.855.235.985.305,00
	VOLUME APBD (Belanja + pengeluaran pembiayaan)	1.881.040.372.750,00	1.855.235.985.305,00



BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Dilihat dari struktur anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, tercatat besaran jumlah volume APBD Kota Pontianak Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 1.855.235.985.305,00 turun 0,01% atau berkurang sebesar Rp.25.804.387.445,00 dari volume APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp. 1.881.040.372.750,00. Adapun volume APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut diatas terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.1.834.685.985.305,00 naik 1,52% atau bertambah Rp.27.434.928.805,00 dari Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.1.807.251.056.500,00.
2. Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1.776.735.985.305,00 turun 2,46% atau berkurang sebesar Rp. 44.804.387.445,00 dari Belanja Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.1.821.540.372.750,00.
3. Penerimaan Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.20.550.000.000,00 turun 0,72% atau berkurang sebesar Rp.53.239.316.250,00 dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.73.789.316.250,00.
4. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diproyeksikan Rp.78.500.000.000,00 naik 0,32% atau bertambah Rp.19.000.000.000,00 dari Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.59.500.000.000,00.

Upaya-upaya Pemerintah Kota Pontianak Dalam Mencapai Target

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun arah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:



1. Pemantapan kelembagaan dan system pemugutan pendapatan daerah;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
4. Peningkatan pelayanan public, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
5. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
6. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;
7. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
8. Peningkatan peran dan fungsi UPT-PPD sebagai ujung tombak pelayanan publik;
9. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.



BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pontianak, 12 Agustus 2022

WALIKOTA PONTIANAK
Selaku,
PIHAK PERTAMA

Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT
WALIKOTA PONTIANAK

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK
Selaku,
PIHAK KEDUA

SATARUDIN, S.H.
KETUA

DR. FIRDAUS ZAR'IN, S.Pd., M.Si
WAKIL KETUA

H. NAUFAL BA'BUD, S.P, M.Sos
WAKIL KETUA

MUHAMMAD ARIEF, S.Ag.
WAKIL KETUA

L A M P I R A N

Lampiran I

DAFTAR PENDANAAN KEGIATAN MULTIYEARS

1. Renovasi Pasar Kapuas Indah dan Mall Pelayanan Publik (Multiyears)

Tahun Anggaran	Biaya Fisik (Rp.)	Biaya Perencanaan (Rp.)	Biaya Pengawasan (Rp.)	Biaya Adm. Proyek (Rp.)	Total Biaya (Rp.)
2021	928.000.000		72.000.000	60.000.000	1.060.000.000
2022	10.376.600.000		700.000.000	171.000.000	11.247.600.000
2023	20.072.000.000		459.000.000	113.000.000	20.644.000.000
Jumlah	31.376.600.000	0	1.231.000.000	344.000.000	32.951.600.000

2. Pembangunan Jl. Parit Demang - Jl. Paralel Sepakat II Kec. Pontianak Tenggara

Tahun Anggaran	Biaya Fisik (Rp.)	Biaya Perencanaan (Rp.)	Biaya Pengawasan (Rp.)	Biaya Adm. Proyek (Rp.)	Total Biaya (Rp.)
2021	1.000.000.000		100.000.000		1.100.000.000
2022	12.000.000.000		585.000.000		12.585.000.000
2023	50.500.000.000		585.000.000		51.085.000.000
Jumlah	63.500.000.000	0	1.270.000.000	0	64.770.000.000

3. Pembangunan Jl. Pemda Kec. Pontianak Timur

Tahun Anggaran	Biaya Fisik (Rp.)	Biaya Perencanaan (Rp.)	Biaya Pengawasan (Rp.)	Biaya Adm. Proyek (Rp.)	Total Biaya (Rp.)
2021	1.000.000.000		100.000.000		1.100.000.000
2022	4.200.000.000		380.000.000		4.580.000.000
2023	37.800.000.000		380.000.000		38.180.000.000
Jumlah	43.000.000.000	0	860.000.000	0	43.860.000.000

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	597.631.308.000	
4.1.01	Pajak Daerah	418.100.000.000	
4.1.02	Retribusi Daerah	60.388.648.000	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.004.000.000	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	94.138.660.000	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.229.554.677.305	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	982.783.017.000	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	246.771.660.305	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.500.000.000	
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.500.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.834.685.985.305	
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.550.000.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.500.000.000	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.550.000.000	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	1.855.235.985.305	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Presentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		
			DINAS KESEHATAN		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			5. Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar		
			DINAS KESEHATAN		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		
			DINAS TENAGA KERJA		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		
			DINAS TENAGA KERJA		
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase Peserta Pelatihan Yang Lulus Dan Mendapatkan Sertifikat Kompetensi		
			DINAS TENAGA KERJA		
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase Peserta Pelatihan Yang Lulus Dan Mendapatkan Sertifikat Kompetensi		
			DINAS TENAGA KERJA		
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase peningkatan pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job fair		
			DINAS TENAGA KERJA		
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase peningkatan pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job fair		
			DINAS TENAGA KERJA		
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase tenaga kerja yang dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku		
			DINAS TENAGA KERJA		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase tenaga kerja yang dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku		
				DINAS TENAGA KERJA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
			persentase koperasi aktif		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
			Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
			Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
			Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Persentase pengembangan iklim penanaman modal yang dilaksanakan		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Persentase pengembangan iklim penanaman modal yang dilaksanakan		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Persentase Informasi Penanaman Modal yang didapat oleh masyarakat dan dunia usaha		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Persentase Informasi Penanaman Modal yang didapat oleh masyarakat dan dunia usaha		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang sesuai dengan SOP		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang sesuai dengan SOP		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase perusahaan PMA/PMDN yang melaporkan investasi penanaman modal sesuai SOP		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase perusahaan PMA/PMDN yang melaporkan investasi penanaman modal sesuai SOP		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Persentase sistem pengelolaan data dan informasi pelayanan publik yang terintegrasi		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase sistem pengolahan data dan informasi pelayanan publik yang terintergrasi		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
			Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
			Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Persentase kinerja realisasi pupuk		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
			Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Persentase Pelaku Usaha ekspor yang dibina		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis.		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			persentase peningkatan jumlah sarana prasarana kluster Industri		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
			Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
			Persentase informasi industri secara lengkap dan terkini		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			persentase tingkat kepuasan dbidang/bagian pelayanan kesekretariata		
				KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan		
				KECAMATAN PONTIANAK KOTA	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase evaluasi Kelurahan yang dapat diselesaikan		
				KECAMATAN PONTIANAK KOTA	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di kecamatan		
			KECAMATAN PONTIANAK KOTA		
			Persentase LPM aktif		
			KECAMATAN PONTIANAK KOTA		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			pesentase keterlibatan di kecamatan		
			KECAMATAN PONTIANAK KOTA		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			persentase koordinasi gangguan trantibun yang dapat diselesaikan		
			KECAMATAN PONTIANAK KOTA		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan		
			KECAMATAN PONTIANAK SELATAN		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
			KECAMATAN PONTIANAK SELATAN		
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi		
			DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi		
			DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Persentase peningkatan jumlah kelompok pembudidaya yang dilayani/didampingi/dibina		
			DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase peningkatan Jumlah Kelompok Pembudidaya yang dilayani / didampingi / dibina		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Luas pertanaman keladi		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Luas pertanaman keladi		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Luas pertanaman ubi kayu yang menggunakan pupuk		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Luas pertanaman ubi kayu yang menggunakan pupuk		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Nilai indeks pertanaman (IP)		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Nilai indeks pertanaman (IP)		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase bibit Sumber Daya Genetik (SDG) bersertifikat		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase bibit Sumber Daya Genetik (SDG) bersertifikat		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase luas lahan yang ditanami dengan benih bersertifikat		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase luas lahan yang ditanami dengan benih bersertifikat		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase luas panen tanaman hortikultura		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase luas panen tanaman hortikultura		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase sarana yang memenuhi standar		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Persentase sarana yang memenuhi standar		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Persentase Peningkatan pelayanan di Kawasan Usaha Peternakan		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Persentase Peningkatan pelayanan di Kawasan Usaha Peternakan		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Persentase Peningkatan Pelayanan di Puskesmas		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Persentase Peningkatan Pelayanan di Puskesmas		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Peningkatan Pelayanan di RPH Sapi		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Persentase Peningkatan Pelayanan di RPH Sapi		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat yang menerapkan standar keamanan produk hewan		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat yang menerapkan standar keamanan produk hewan		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Persentase Penurunan Hewan yang Terkena Penyakit Menular Ternak		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Persentase Penurunan Hewan yang Terkena Penyakit Menular Ternak		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan peyuluh pertanian		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan peyuluh pertanian		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase peningkatan kapasitas petani dan pelaku agribisnis		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase peningkatan kapasitas petani dan pelaku agribisnis		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			1. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir		
				DINAS KESEHATAN	
			2. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan balita		
				DINAS KESEHATAN	
			3. Persentase Puskesmas yang melakukan usia anak sekolah dan remaja		
				DINAS KESEHATAN	
			4. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia		
				DINAS KESEHATAN	
			5. Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar		
				DINAS KESEHATAN	
			6. Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan reproduksi		
				DINAS KESEHATAN	
			7. Persentase Ketersediaan Bahan Pendukung Penanggulangan Masalah Kesehatan		
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		
				DINAS SOSIAL	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		
				DINAS SOSIAL	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah sesuai Standar		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
			Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
			Persentase Target Konsumsi Pangan		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Persentase Peningkatan Tahan Pangan		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			1. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 - 49 tahun		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			2. Persentase Baduta Stunting		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota		
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
			Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
			Persentase meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan		
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
			Persentase Objek kemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penanyangan keragaman)		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			indeks kearsipan		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
			Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Persentase ASN yang ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Persentase ASN yang ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		
				KECAMATAN PONTIANAK BARAT	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap layanan kesekretariatan		
				KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Persentase tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Persentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Indeks Keamanan Informasi Pemerintah		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Indeks Keamanan Informasi Pemerintah		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			persentase kunjungan ke perpustakaan dan tempat baca		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Indeks Kearsipan		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
			persentase arsip statis dan arsip hasil alih media kab/ kota		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			persentase kegiatan perlindungan penyelamatan arsip		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		
				SEKRETARIAT DPRD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		
				SEKRETARIAT DPRD	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
				SEKRETARIAT DPRD	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
				SEKRETARIAT DPRD	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Konsistensi program RKPd Perangkat daerah ke dalam APBD		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Persentase dokumen data base pajak dan atau retribusi yang tersedia		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	
			Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan atau retribusi yang diselesaikan tepat waktu		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	
			Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan atau retribusi dalam melakukan pembayaran pajak/retribusi		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase kesesuaian capaian kinerja program penelitian dan pengembangan daerah		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		
				KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		
				KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
				KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
				KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan		
				KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan		
			KECAMATAN PONTIANAK TIMUR		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)		
			KECAMATAN PONTIANAK TIMUR		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)		
			KECAMATAN PONTIANAK TIMUR		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum		
			KECAMATAN PONTIANAK TIMUR		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum		
			KECAMATAN PONTIANAK TIMUR		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
			KECAMATAN PONTIANAK TIMUR		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
			KECAMATAN PONTIANAK TIMUR		
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase tingkat kepuasan bidang / bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase tingkat kepuasan bidang / bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Persentase peningkatan penataan bangunan dan lingkungan di Kota Pontianak		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Persentase peningkatan penataan bangunan dan lingkungan di Kota Pontianak		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 (sepuluh) Ha di Kota yang Ditangani		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 (sepuluh) Ha di Kota yang Ditangani		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
			Persentase penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			
			Persentase bidang tanah Pemerintah Kota Pontianak yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukan		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
			Persentase penggunaan tanah		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi		
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase perencanaan lingkungan hidup		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase perencanaan lingkungan hidup		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase pengendalian pencemaran		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase pengendalian pencemaran		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Persentase pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Persentase pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
			Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
			Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Persentase pelaku usaha yang menerapkan izin lingkungan dan izin PPLH		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Persentase pelaku usaha yang menerapkan izin lingkungan dan izin PPLH		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
			Terwujudnya Kearifan Lokal di masyarakat terhadap PPLH		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
			Terwujudnya Kearifan Lokal di masyarakat terhadap PPLH		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Persentase penghargaan lingkungan hidup yang dicapai		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Persentase penghargaan lingkungan hidup yang dicapai		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase pengelolaan sampah		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase pengelolaan sampah		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase Pengelolaan Sampah		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			1. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir		
				DINAS KESEHATAN	
			2. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan balita		
				DINAS KESEHATAN	
			3. Persentase Puskesmas yang melakukan usia anak sekolah dan remaja		
				DINAS KESEHATAN	
			4. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia		
				DINAS KESEHATAN	
			5. Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar		
				DINAS KESEHATAN	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			6. Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan reproduksi		
				DINAS KESEHATAN	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
			Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Persentase Penduduk yang menikah menerima Akta Perkawinan tepat waktu pelaporan		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akta Kematian tepat waktu pelaporan		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan		
				SEKRETARIAT DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan		
				SEKRETARIAT DAERAH	

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
53	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		
				DINAS TENAGA KERJA	3.939.752.528
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase Peserta Pelatihan Yang Lulus Dan Mendapatkan Sertifikat Kompetensi		
				DINAS TENAGA KERJA	236.331.300
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase tenaga kerja yang dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku		
				DINAS TENAGA KERJA	214.020.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	9.176.172.470
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
			Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	3.828.800
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.291.593.524
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Persentase pengembangan iklim penanaman modal yang dilaksanakan		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	123.156.900
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Persentase Informasi Penanaman Modal yang didapat oleh masyarakat dan dunia usaha		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	16.448.000
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang sesuai dengan SOP		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.250.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase perusahaan PMA/PMDN yang melaporkan investasi penanaman modal sesuai SOP		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	378.350.400
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Persentase sistem pengolahan data dan informasi pelayanan publik yang terintergrasi		
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	57.177.100
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Persentase peningkatan jumlah kelompok pembudidaya yang dilayani/didampingi/dibina		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	817.284.400
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Luas pertanaman keladi		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	488.943.424
			Luas pertanaman ubi kayu yang menggunakan pupuk		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	488.943.424
			Nilai indeks pertanaman (IP)		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	488.943.424
			Persentase bibit Sumber Daya Genetik (SDG) bersertifikat		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	488.943.424
			Persentase luas lahan yang ditanami dengan benih bersertifikat		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	488.943.424
			Persentase luas panen tanaman hortikultura		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	488.943.424
			Persentase Peningkatan Jumlah Benih/Bibit Ternak, Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Ternak yang cukup secara kuantitas dan kualitas		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	16.661.700
			Persentase Peningkatan Keberhasilan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB)		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	16.661.700
			Persentase Peternak dan Pelaku Usaha Peternakan yang Menerapkan Teknologi Unggul		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	16.661.700
			Persentase sarana yang memenuhi standar		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	488.943.424
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.004.919.510
			Persentase peningkatan pelayanan prima di UPTD agribisnis		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.004.919.510
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Persentase Peningkatan pelayanan di Kawasan Usaha Peternakan		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.744.194.361
			Persentase Peningkatan Pelayanan di Puskesmas		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.744.194.361
			Persentase Peningkatan Pelayanan di RPH Sapi		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.744.194.361
			Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat yang menerapkan standar keamanan produk hewan		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.744.194.361
			Persentase Penurunan Hewan yang Terkena Penyakit Menular Ternak		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.744.194.361
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	2.479.928.125
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	28.450.100
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	36.769.300
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
			Persentase informasi industri secara lengkap dan terkini		
				DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	5.443.500
54	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	15.594.128.352
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara preventif dan represif, non yustisi maupun yustisi		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.260.947.424
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Prosentase Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	198.599.808
			Prosentase Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran 0		
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	124.549.920
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		
				DINAS TENAGA KERJA	53.792.600
			persentase tingkat kepuasan bidang atau bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	24.178.500
			persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.614.230.020
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Persentase Peningkatan Wawasan kebangsaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	891.606.100
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			Persentase Jumlah Pemahaman tentang Pendidikan Politik		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	22.881.005.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Persentase Jumlah organisasi Masyarakat di Kota Pontianak		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	503.300.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			Persentase Jumlah Pembentukan Kelompok Keagamaan serta Pembentukan Kader P4GN		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	121.600.000
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			Persentase Jumlah Konflik yang dapat ditangani		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	716.630.000
55	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah				
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			

				DINAS KESEHATAN	9.211.796.840
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan		
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	74.101.900
			Persentase tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.728.000
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50.971.800
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Persentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50.335.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Indeks Keamanan Informasi Pemerintah		
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.965.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.248.645.302
			Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	15.535.000
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			persentase kunjungan ke perpustakaan dan tempat baca		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	545.869.000
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			indeks kearsipan		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	62.472.400
			Indeks kearsipan		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.140.000
			Indeks Kearsipan		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	164.083.200
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
			persentase arsip statis dan arsip hasil alih media kab/ kota		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10.450.000
			persentase kegiatan perlindungan penyelamatan arsip		
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.882.400
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan		
				SEKRETARIAT DAERAH	1.444.431.500
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				SEKRETARIAT DAERAH	22.305.400
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		
				SEKRETARIAT DPRD	4.879.923.667
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
				SEKRETARIAT DPRD	1.276.056.300
			Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
				SEKRETARIAT DPRD	270.401.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.888.425
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase pencapaian target program pembangunan daerah		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	34.923.300
			Persentase terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	60.181.300
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Konsistensi program RKPD Perangkat daerah ke dalam APBD		
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	16.512.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	3.255.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	2.179.525.925
			Persentase dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	222.189.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase dokumen data base pajak dan atau retribusi yang tersedia		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	283.700.000
			Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan atau retribusi yang diselesaikan tepat waktu		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	283.700.000
			Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan atau retribusi dalam melakukan pembayaran pajak/retribusi		
				BADAN KEUANGAN DAERAH	283.700.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.205.129.110
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	238.785.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan		
				INSPEKTORAT	8.613.761.318
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Persentase kategori hasil evaluasi SPIP PD dengan score 3,5		
				INSPEKTORAT	113.450.000
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Persentase unit kerja yang memenuhi standar untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM		
				INSPEKTORAT	5.370.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		
				KECAMATAN PONTIANAK BARAT	35.747.500
			Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan		
				KECAMATAN PONTIANAK KOTA	1.466.745.258
			Presentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	2.310.000
				Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	
				KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	756.109.472
				Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap layanan kesekretariatan	
				KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	1.274.016.980
				Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	
				KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	10.621.765.012
				Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	
				KECAMATAN PONTIANAK UTARA	7.915.726.526
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	
				KECAMATAN PONTIANAK KOTA	74.614.100
				Persentase terlaksananya kegiatan Pemerintah dan Pelayanan Publik	
				KECAMATAN PONTIANAK KOTA	1.032.325.000
				persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	
				KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	388.971.600
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	831.690.400
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan	
				KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	600.000
				Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	
				KECAMATAN PONTIANAK UTARA	1.157.639.500
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				1. Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kecamatan	
				KECAMATAN PONTIANAK BARAT	771.857.500
				2. Persentase LPM aktif	
				KECAMATAN PONTIANAK BARAT	522.161.000
				persentase keterlibatan masyarakat	
				KECAMATAN PONTIANAK KOTA	23.377.000

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di kecamatan		
				KECAMATAN PONTIANAK KOTA	1.485.978.232
			Persentase LPM aktif		
				KECAMATAN PONTIANAK KOTA	1.485.978.232
			Persentase Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan		
				KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	19.470.000
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif		
				KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	19.470.000
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak,		
				KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	310.499.900
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, Rt/RW, posyandu)		
				KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	303.650.000
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)		
				KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	706.545.370
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)		
				KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	2.941.669.346
			Persentase keterlibatan masyarakat Yang Aktif		
				KECAMATAN PONTIANAK UTARA	1.796.477.500
			Persentase keterlibatan masyarakat Yang Aktif (LPM,PKK,Karang Taruna/Forum Anak,Rt/Tw)		
				KECAMATAN PONTIANAK UTARA	130.698.200
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			1. Persentase koordinasi gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		
				KECAMATAN PONTIANAK BARAT	20.250.000
			Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		
				KECAMATAN PONTIANAK KOTA	56.912.320
			Presentase Koordinasai Gangguan trantibum yang dapat diselesaikan		
				KECAMATAN PONTIANAK KOTA	37.532.400

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Presentase koordinasi gangguan trantibum yang dapat diselesaikan		
				KECAMATAN PONTIANAK KOTA	32.690.000
			Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan		
				KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	21.125.000
			Persentase Koordinasi gangguan trantibum yang dapat diselesaikan		
				KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	11.875.000
			Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		
				KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	80.284.000
			Persentase koordinasui Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		
				KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	15.000.000
			Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum		
				KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	57.800.000
			Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		
				KECAMATAN PONTIANAK UTARA	35.180.000
			Presentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		
				KECAMATAN PONTIANAK UTARA	7.350.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			1. Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		
				KECAMATAN PONTIANAK BARAT	50.256.200
			Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		
				KECAMATAN PONTIANAK KOTA	439.970.690
			Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		
				KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	390.390.300
			Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		
				KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	50.484.100
			Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum		
				KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	17.000.000
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
				KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	639.824.000

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
				KECAMATAN PONTIANAK UTARA	514.610.880
56	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan				
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Persentase jumlah KK yang dilayani sanitasi		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	231.065.300
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			"Persentase penambahan kinerja jalan kota "		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.395.731.721
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.580.000
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 (sepuluh) Ha di Kota yang Ditangani		
				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.120.079.500
57	Meningkatnya Kualitas SDM				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Presentase tingkat kepuasan bagian/bidang pada kesekretariatan		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	192.371.100
			Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	234.501.262.487
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase Warga Negara Usia 5-6 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	10.620.764.815
			Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	150.958.284.508

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.216.892.681
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
			Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki kualifikasi DIV dan S1 bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	171.315.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			
			Persentase terlaksananya pengembangan bahasa dan sastra		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	499.092.700
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan		
				DINAS KESEHATAN	716.988.174
			Presentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		
				DINAS KESEHATAN	124.719.654.524

				DINAS KESEHATAN	17.773.873.078
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			1. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir		
				DINAS KESEHATAN	48.808.431.202
			2. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan balita		
				DINAS KESEHATAN	48.808.431.202
			3. Persentase Puskesmas yang melakukan usia anak sekolah dan remaja		
				DINAS KESEHATAN	48.808.431.202
			4. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia		
				DINAS KESEHATAN	48.808.431.202
			5. Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar		
				DINAS KESEHATAN	51.690.691.438
			6. Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan reproduksi		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				DINAS KESEHATAN	48.808.431.202
			7. Persentase Ketersediaan Bahan Pendukung Penanggulangan Masalah Kesehatan		
				DINAS KESEHATAN	22.701.923.836
			Tersedianya Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas (APBD)		
				DINAS KESEHATAN	1.521.316.185

				DINAS KESEHATAN	112.680.639.034
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			

				DINAS KESEHATAN	31.400.000
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			1. Persentase fasilitas kesehatan farmasi, makan, minuman sesuai standar.		
				DINAS KESEHATAN	421.988.450

				DINAS KESEHATAN	156.854.160
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			

				DINAS KESEHATAN	753.803.758
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.540.662.295
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah sesuai Standar		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	416.937.980
			Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	416.937.980
			Persentase Target Konsumsi Pangan		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	416.937.980
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase kasus pangan yang tidak sesuai standar mutu yang telah ditetapkan		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	42.500.000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			1. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	80.000.000
			2. Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	80.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase meningkatnya kepuasan bidang terhdap pelayanan kesekretiatan		
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	6.167.696.640
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Persentase peningkatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota		
				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	107.075.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Invetarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Pontianak,Fasilitasi Penyelenggaraan Pentas Seni dan Budaya,Terlaksananya Fasilitasi Pekan Kebudayaan Daerah/Lomba Cipta lagu Pontianak,Misi Kebudayaan Keluar Daerah,Terlaksananya Pembinaan Seni dan Budaya di Kota Pontianak		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.627.886.400
			Persentase Pengembangan Kebudayaan yang di kelola dan dilestarikan		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.039.979.400
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
			Penyelenggaraan Sosialisasi Dapobud/Workshop Kesenian Tradisional Seni Tari/Seni Teater/Desain Poster/Musik Tradisional/Gambar Bercerita/Kriya		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	196.633.800
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
			Persentase Objek kemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penanyangan keragaman)		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	75.000.000

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Persentase Teregister cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		
				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	137.776.600
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi		
				DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	70.000.000
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah		
				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	47.873.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan		
				KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	1.985.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kelurahan		
				KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	1.085.727.880
58	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Presentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		
				DINAS KESEHATAN	308.099.300

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan							

			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
				Persentase berkurangnya jumlah pembuangan sampah ke TPA				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.549.308.918		
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
				Persentase peningkatan penataan bangunan dan lingkungan di Kota Pontianak				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	22.758.073.493		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				Persentase capaian penyelenggaraan tata ruang				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.465.371.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	15.594.128.352		
				Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.097.544.473		
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara preventif dan represif, non yustisi maupun yustisi				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.646.567.424		
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Perentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	660.696.400	
				Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi			
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	220.440.100	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
				Prosentase Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran			
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	198.599.808	
				Prosentase Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran 0			
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	124.549.920	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14.350.699.625	
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase perencanaan lingkungan hidup			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	381.020.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase pengendalian pencemaran			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	888.184.855	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
				Persentase pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	62.672.500	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	127.587.000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
				Persentase pelaku usaha yang menerapkan izin lingkungan dan izin PPLH			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	224.499.300	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
				Persentase peningkatan kapasitas kader masyarakat peduli lingkungan			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.264.684.150	
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
				Persentase penghargaan lingkungan hidup yang dicapai			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	280.589.800	
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	48.023.500	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
				Persentase pengelolaan sampah			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	37.855.265.443	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				persentase tingkat kepuasan bidang atau bagian terhadap pelayanan kesekretariatan			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	24.178.500	
				persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.387.910.020	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					
				Persentase Peningkatan Wawasan kebangsaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	891.606.100		
			PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik					
				Persentase Jumlah Pemahaman tentang Pendidikan Politik				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	22.881.005.000		
			PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat					
				Persentase Jumlah organisasi Masyarakat di Kota Pontianak				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	503.300.000		
			PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya					
				Persentase Jumlah Pembentukan Kelompok Keagamaan serta Pembentukan Kader P4GN				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	121.600.000		
			PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial					
				Persentase Jumlah Konflik yang dapat ditangani				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	716.630.000		
2	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Perkotaan							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	509.846.600		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase tingkat kepuasan bidang / bagian terhadap pelayanan kesekretariatan			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.562.739.564	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
				Persentase berkurangnya luas genangan hujan / pasang tiap tahun			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.399.472.300	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
				"Persentase sarana prasarana perpipaan terakses ke Rumah Tangga "			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.925.269.600	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
				Persentase jumlah KK yang dilayani sanitasi			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.699.691.692	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
				Persentase optimalisasi sistem jaringan drainase yang dipelihara			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	29.068.058.507	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				
				Persentase pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman			
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.747.182.711	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
				Persentase capaian penataan bangunan gedung dan pelaksanaan kegiatan penataan dalam penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah dan pelayanan publik serta pemberian IMB dan SLF bangunan gedung			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	45.473.974.797		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				"Persentase penambahan kinerja jalan kota "				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	144.777.811.491		
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
				Persentase capaian pengembangan jasa konstruksi Persentase capaian pengembangan jasa konstruksi				
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	569.652.600		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.669.493.289		
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.218.538.600		
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 (sepuluh) Ha di Kota yang Ditangani				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.489.055.570		
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
				Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak layak Huni)				
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.318.974.000		
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas dalam kondisi baik			
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	161.736.816.200	
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				
				Prosentase Penyelesaian konflik pertanahan yang dimediasi			
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	90.451.000	
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				
				Persentase penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan			
					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17.538.800.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan			
					DINAS PERHUBUNGAN	11.664.600.972	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
				Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar			
					DINAS PERHUBUNGAN	1.603.711.200	
				Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan			
					DINAS PERHUBUNGAN	513.979.500	
				Persentase Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan			
					DINAS PERHUBUNGAN	25.433.037.529	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
				Persentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan			
					DINAS PERHUBUNGAN	1.100.400.000	
3	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia						
		1.1.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Presentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan			
					DINAS KESEHATAN	124.719.654.524	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				1. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir			
					DINAS KESEHATAN	34.176.918.002	
				2. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan balita			
					DINAS KESEHATAN	34.176.918.002	
				3. Persentase Puskesmas yang melakukan usia anak sekolah dan remaja			
					DINAS KESEHATAN	34.176.918.002	
				4. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia			
					DINAS KESEHATAN	34.176.918.002	
				5. Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar			
					DINAS KESEHATAN	37.059.178.238	
				6. Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan reproduksi			
					DINAS KESEHATAN	34.176.918.002	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
				1. Persentase fasilitas kesehatan farmasi, makan, minuman sesuai standar.			
					DINAS KESEHATAN	421.988.450	
		1.1.3. Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Presentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan			
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.277.636.562	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
				1. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	253.874.750		
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				1. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	829.100.000		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				1. TFR (Angka Kelahiran Total)				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.980.000		
				2. Angka Kelahiran Remaja umur 15 - 19 tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15 - 19)				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.980.000		
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				1. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.096.375.000		
				2. Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.096.375.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				1. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 - 49 tahun				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	937.460.000		
				2. Persentase Baduta Stunting				
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	937.460.000		

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Presentase tingkat kepuasan bagian/bidang pada kesekretariatan				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	192.371.100		
				Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	234.501.262.487		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Persentase Warga Negara Usia 5-6 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	10.620.764.815		
				Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	149.236.452.708		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.216.892.681	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
				Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki kualifikasi DIV dan S1 bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	171.315.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				
				Persentase terlaksananya pengembangan bahasa dan sastra			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	499.092.700	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan			
					DINAS KESEHATAN	587.238.174	

					DINAS KESEHATAN	18.279.473.078	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				7. Persentase Ketersediaan Bahan Pendukung Penanggulangan Masalah Kesehatan			
					DINAS KESEHATAN	8.070.410.636	
				Tersedianya Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas (APBD)			
					DINAS KESEHATAN	1.521.316.185	

					DINAS KESEHATAN	112.680.639.034	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				

					DINAS KESEHATAN	31.400.000	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	

					DINAS KESEHATAN	156.854.160		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					

					DINAS KESEHATAN	753.803.758		
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					

					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	46.812.800		
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					

					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	68.693.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan				
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	10.613.311.917		
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah sesuai Standar				
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	416.937.980		
				Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan				
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	416.937.980		
				Persentase Target Konsumsi Pangan				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	416.937.980		
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				Persentase kasus pangan yang tidak sesuai standar mutu yang telah ditetapkan				
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	42.500.000		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					

					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	100.200.000		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				Persentase peningkatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota				
					DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	107.075.000		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
				Persentase meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan				
					DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	150.000.000		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Pontianak, Fasilitas Penyelenggaraan Pentas Seni dan Budaya, Terlaksananya Fasilitas Pekan Kebudayaan Daerah/Lomba Cipta lagu Pontianak, Misi Kebudayaan Keluar Daerah, Terlaksananya Pembinaan Seni dan Budaya di Kota Pontianak				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.627.886.400		
				Persentase Pengembangan Kebudayaan yang di kelola dan dilestarikan				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.039.979.400		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
				Penyelenggaraan Sosialisasi Dapobud/Workshop Kesenian Tradisional Seni Tari/Seni Teater/Desain Poster/Musik Tradisional/Gambar Bercerita/Kriya				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	196.633.800		
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
				Persentase Objek kemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penanyangan keragaman)				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	75.000.000		
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
				Persentase Teregister cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)				
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	137.776.600		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
				Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi				
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	70.000.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.000.000		
				Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan				
					KECAMATAN PONTIANAK BARAT	525.320.000		
				Presentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan				
					KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	2.310.000		
				Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	756.109.472		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan				
					KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	19.470.000		
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif				
					KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	19.470.000		
4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah							
		1.1.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Presentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan				
					DINAS KESEHATAN	308.099.300		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				1. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir				
					DINAS KESEHATAN	14.631.513.200		
				2. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan balita				
					DINAS KESEHATAN	14.631.513.200		
				3. Persentase Puskesmas yang melakukan usia anak sekolah dan remaja				
					DINAS KESEHATAN	14.631.513.200		
				4. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia				
					DINAS KESEHATAN	14.631.513.200		
				5. Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar				
					DINAS KESEHATAN	14.631.513.200		
				6. Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan reproduksi				
					DINAS KESEHATAN	14.631.513.200		
		3.1.4. Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan			
					KECAMATAN PONTIANAK BARAT	51.906.100	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				1. Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kecamatan			
					KECAMATAN PONTIANAK BARAT	983.474.700	
				2. Persentase LPM aktif			
					KECAMATAN PONTIANAK BARAT	733.778.200	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				1. Persentase koordinasi gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			
					KECAMATAN PONTIANAK BARAT	30.506.400	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
				1. Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			
					KECAMATAN PONTIANAK BARAT	65.569.200	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan			
					DINAS KESEHATAN	129.750.000	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				7. Persentase Ketersediaan Bahan Pendukung Penanggulangan Masalah Kesehatan			
					DINAS KESEHATAN	14.631.513.200	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan			
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.212.641.248	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	88.459.200		
				Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	88.459.200		
				Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	88.459.200		
				Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	88.459.200		
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
				Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	101.253.500		
				Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	28.788.900		
				Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	202.261.400		
				Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	130.042.400		
				Persentase Penduduk yang menikah menerima Akta Perkawinan tepat waktu pelaporan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	57.823.400		
				Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akta Kematian tepat waktu pelaporan				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	130.042.400		
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	232.140.020		
				Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	232.140.020		
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
				Persentase Penyusunan Profil Kependudukan				
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.944.600		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.867.228.082		
				Persentase tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23.044.800		
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	538.943.720		
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.488.487.237		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
				Persentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	399.990.500		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
				Indeks Keamanan Informasi Pemerintah				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	121.716.987		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.248.645.302		
				Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	15.535.000		
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				persentase kunjungan ke perpustakaan dan tempat baca				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	545.869.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
				indeks kearsipan				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	62.472.400		
				Indeks kearsipan				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.140.000		
				Indeks Kearsipan				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	164.083.200		
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
				persentase arsip statis dan arsip hasil alih media kab/ kota				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10.450.000		
				persentase kegiatan perlindungan penyelamatan arsip				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.882.400		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai RB pada komponen penataan dan penguatan organisasi; penataan ketatalaksanaan				
					SEKRETARIAT DAERAH	1.553.081.525		
				persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan				
					SEKRETARIAT DAERAH	2.157.318.708		
				Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan				
					SEKRETARIAT DAERAH	17.002.044.761		
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Nilai RB pada komponen penataan produk hukum daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	1.402.347.240		
				persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi				
					SEKRETARIAT DAERAH	10.769.206.600		
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa				
					SEKRETARIAT DAERAH	1.951.971.240		
				persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi				
					SEKRETARIAT DAERAH	2.362.594.125		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan				
					SEKRETARIAT DPRD	42.159.745.807		
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				
					SEKRETARIAT DPRD	16.156.293.500		
				Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				
					SEKRETARIAT DPRD	835.258.000		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.384.138.063		
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				persentase pencapaian target program pembangunan daerah				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	825.004.200		
				Persentase pencapaian target program pembangunan daerah				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	347.279.900		
				Persentase terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	136.862.400		
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Konsistensi program RKPD Perangkat daerah ke dalam APBD				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	724.216.280		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan				
					BADAN KEUANGAN DAERAH	18.255.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan				
					BADAN KEUANGAN DAERAH	2.365.468.025		
				Persentase dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					BADAN KEUANGAN DAERAH	222.189.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				Persentase barang milik daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku				
					BADAN KEUANGAN DAERAH	640.519.597		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
				Persentase dokumen data base pajak dan atau retribusi yang tersedia				
					BADAN KEUANGAN DAERAH	283.700.000		
				Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan atau retribusi yang diselesaikan tepat waktu				
					BADAN KEUANGAN DAERAH	283.700.000		
				Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan atau retribusi dalam melakukan pembayaran pajak/retribusi				
					BADAN KEUANGAN DAERAH	283.700.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.922.113.761		
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.172.933.085		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
				Persentase ASN yang ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.503.936.264		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Persentase kesesuaian capaian kinerja program penelitian dan pengembangan daerah				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.358.066.500		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan				
					INSPEKTORAT	8.613.761.318		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				Persentase kategori hasil evaluasi SPIP PD dengan score 3,5				
					INSPEKTORAT	113.450.000		
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
				Persentase unit kerja yang memenuhi standar untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM				
					INSPEKTORAT	5.370.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan				
					KECAMATAN PONTIANAK BARAT	7.104.568.790		
				Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan Target Kinerja (Outcome)				
					KECAMATAN PONTIANAK BARAT	135.200.000		
				Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan				
					KECAMATAN PONTIANAK BARAT	146.067.900		
					KECAMATAN PONTIANAK KOTA	8.866.374.363		
					KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	8.054.980.166		
				Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap layanan kesekretariatan				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	7.328.912.885	
				Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan			
					KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	10.644.565.012	
				Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah			
					KECAMATAN PONTIANAK UTARA	7.915.726.526	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik			
					KECAMATAN PONTIANAK BARAT	1.109.324.900	
					KECAMATAN PONTIANAK KOTA	74.614.100	
				Persentase terlaksananya kegiatan Pemerintah dan Pelayanan Publik			
					KECAMATAN PONTIANAK KOTA	1.032.325.000	
				Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik			
					KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	771.375.000	
				Presentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik			
					KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	39.508.000	
				persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik			
					KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	455.261.400	
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
					KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	831.690.400	
				Persentase Terlaksanya Kegiatan Pemerintahan			
					KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	600.000	
				Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					KECAMATAN PONTIANAK UTARA	1.157.639.500		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan					
					KECAMATAN PONTIANAK BARAT	76.499.100		
			Persentase Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan					
					KECAMATAN PONTIANAK BARAT	71.641.600		
			persentase keterlibatan masyarakat					
					KECAMATAN PONTIANAK KOTA	23.377.000		
			Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di kecamatan					
					KECAMATAN PONTIANAK KOTA	1.485.978.232		
			Persentase LPM aktif					
					KECAMATAN PONTIANAK KOTA	1.485.978.232		
			Persentase Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kelurahan					
					KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	1.085.727.880		
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak,					
					KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	310.499.900		
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, Rt/RW, posyandu)					
					KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	303.650.000		
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)					
					KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	706.545.370		
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	2.941.669.346	
				Presentase keterlibatan masyarakat Yang Aktif			
					KECAMATAN PONTIANAK UTARA	1.796.477.500	
				Presentase keterlibatan masyarakat Yang Aktif (LPM,PKK,Karang Taruna/Forum Anak,Rt/Tw)			
					KECAMATAN PONTIANAK UTARA	130.698.200	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Presentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			
					KECAMATAN PONTIANAK BARAT	25.000.000	
				Presentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			
					KECAMATAN PONTIANAK KOTA	56.912.320	
				Presentase Koordinasi Gangguan trantibum yang dapat diselesaikan			
					KECAMATAN PONTIANAK KOTA	37.532.400	
				Presentase koordinasi gangguan trantibum yang dapat selesai			
					KECAMATAN PONTIANAK KOTA	32.690.000	
				Presentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			
					KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	23.300.000	
				Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan			
					KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	21.125.000	
				Presentase Koordinasi gangguan trantibum yang dapat diselesaikan			
					KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	11.875.000	
				Presentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			
					KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	80.284.000	
				Presentase koordinasui Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	15.000.000	
				Presentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum			
					KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	57.800.000	
				Presentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			
					KECAMATAN PONTIANAK UTARA	35.180.000	
				Presentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			
					KECAMATAN PONTIANAK UTARA	7.350.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
				Presentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			
					KECAMATAN PONTIANAK BARAT	345.335.200	
				Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			
					KECAMATAN PONTIANAK KOTA	439.970.690	
				Presentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			
					KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	339.254.500	
				Presentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			
					KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	390.390.300	
				Presentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			
					KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	50.484.100	
				Presentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum			
					KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	17.000.000	
				Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
					KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	639.824.000	
				persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					KECAMATAN PONTIANAK UTARA	514.610.880	
5	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat						
		1.1.3. Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
				1. Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan			
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.409.491.000	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan			
					DINAS SOSIAL	7.742.394.640	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
				Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial			
					DINAS SOSIAL	760.841.800	
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				
				Persentase Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan			
					DINAS SOSIAL	2.480.000	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
				Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial			
					DINAS SOSIAL	959.053.400	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
				Persentase Penerima Bantuan			
					DINAS SOSIAL	3.001.211.400	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
				Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS SOSIAL	386.610.600		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan				
					DINAS TENAGA KERJA	3.993.545.128		
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Persentase Peserta Pelatihan Yang Lulus Dan Mendapatkan Sertifikat Kompetensi				
					DINAS TENAGA KERJA	236.331.300		
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Persentase tenaga kerja yang dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku				
					DINAS TENAGA KERJA	214.020.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah				
					DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	9.392.785.105		
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
				Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi				
					DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	19.958.000		
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
				Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT				
					DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	2.670.700		
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
				Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				
					DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	427.259.700		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
				Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	3.828.800		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan					
					DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	12.700.000		
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya					
					DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	1.445.924.194		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan					
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.321.373.524		
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Persentase pengembangan iklim penanaman modal yang dilaksanakan					
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	123.156.900		
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
			Persentase Informasi Penanaman Modal yang didapat oleh masyarakat dan dunia usaha					
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	16.448.000		
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Persentase Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang sesuai dengan SOP					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.250.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
				Persentase perusahaan PMA/PMDN yang melaporkan investasi penanaman modal sesuai SOP			
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	378.350.400	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
				Persentase sistem pengolahan data dan informasi pelayanan publik yang terintergrasi			
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	57.177.100	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
				Persentase peningkatan jumlah kelompok pembudidaya yang dilayani/didampingi/dibina			
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	817.284.400	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				Luas pertanaman keladi			
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.417.115.984	
				Luas pertanaman ubi kayu yang menggunakan pupuk			
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.417.115.984	
				Nilai indeks pertanaman (IP)			
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.417.115.984	
				Persentase bibit Sumber Daya Genetik (SDG) bersertifikat			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.417.115.984	
				Persentase luas lahan yang ditanami dengan benih bersertifikat			
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.417.115.984	
				Persentase luas panen tanaman hortikultura			
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.417.115.984	
				Persentase Peningkatan Jumlah Benih/Bibit Ternak, Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Ternak yang cukup secara kuantitas dan kualitas			
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	16.661.700	
				Persentase Peningkatan Keberhasilan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB)			
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	16.661.700	
				Persentase Peternak dan Pelaku Usaha Peternakan yang Menerapkan Teknologi Unggul			
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	16.661.700	
				Persentase sarana yang memenuhi standar			
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.417.115.984	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
				Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian			
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.769.424.032	
				Persentase peningkatan pelayanan prima di UPTD agribisnis			
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.769.424.032	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				Persentase Peningkatan pelayanan di Kawasan Usaha Peternakan				
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.744.194.361		
				Persentase Peningkatan Pelayanan di Puskesmas				
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.744.194.361		
				Persentase Peningkatan Pelayanan di RPH Sapi				
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.744.194.361		
				Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat yang menerapkan standar keamanan produk hewan				
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.744.194.361		
				Persentase Penurunan Hewan yang Terkena Penyakit Menular Ternak				
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.744.194.361		
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan peyuluh pertanian				
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	495.294.000		
				Persentase peningkatan kapasitas petani dan pelaku agribisnis				
					DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	495.294.000		
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
				Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	15.188.900		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan				
					DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	3.903.106.725		
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
					DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	94.364.900		
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTPP) bertanda tera sah yang berlaku				
					DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	353.393.926		
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
				Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis.				
					DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	10.000.000		
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP				
					DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	147.393.900		
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
				Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota				
					DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	900.200		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase informasi industri secara lengkap dan terkini			
					DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	5.443.500	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	226.320.000	

Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat kepuasan bagian/bidang pada kesekretariatan	100 persen	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
							1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
							1.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen
							1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan
							1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan Guru dan Tunjangan bagi Guru yang memperoleh Sertifikasi, serta Jasa Administrasi Pengelola Keuangan, Pengurus dan Penyimpan Barang Tersedianya Jasa Administrasi Pengelola Keuangan, Pengurus dan Penyimpan Barang Tersedianya Tambahan Penghasilan Guru dan Tunjangan bagi Guru yang memperoleh Sertifikasi	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2118 Orang/bulan
							1.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan-peraturan yang ditetapkan Jumlah PNS yang menerima Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah PNS yang menerima Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi serta sosialisasi peraturan-peraturan yang ditetapkan	2 kegiatan 1 kegiatan 110 orang 110 orang	1.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket
							1.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	110 Orang
							1.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	248 Orang
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya alat tulis kantor, tersedianya makan minum rapat kantor dan kegiatan layanan publik dalam pengelolaan Manajemen PNS, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan, Tersedianya bahan bacaan, Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait di luar daerah Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 persen 100 persen	1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
							1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
							1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen
							1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan
							1.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen
			1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<p>pengadaan alat peraga sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan , Persentase Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung operasional kantor</p> <p>Pengadaan alat peraga sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan , Persentase Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung operasional kantor</p>	100 persen 100 persen		1.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit
							1.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit
			1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa surat menyurat, Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik , Tersedianya Jasa Pelayanan umum kantor	12 bulan		1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
							1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan
							1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan
			1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<p>Jumlah kendaraan yang memerlukan pemeliharaan dan perawatan untuk operasional kantor, umlah kegiatan pemeliharaan dan perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor dan Kegiatan Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan dan Infrastruktur ICT</p> <p>Tersedianya jasa surat menyurat, Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik , Tersedianya Jasa Pelayanan umum kantor</p> <p>Tersedianya jasa surat menyurat, Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik , Tersedianya Jasa Pelayanan umum kantor</p>	2 kegiatan 12 bulan 12 Laporan		1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit
							1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 persen	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Presentase Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kepsek/Guru/TU RKB, Laboratorium melalui Dana DAK, Perpustakaan dan Peningkatan Mutu Peserta Didik dan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dibidang Akademi/Non Akademi, Jumlah Sekolah yang melaksanakan PPDB dan sekolah yang melaksanakan Assesmen tingkat SD/MI/SDLB Kota Pontianak, jumlah sekolah yang melaksanakan pengelolaan BOS.	100 persen	1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang
							1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang
							1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah DibaŃgung	2 Unit
							1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang
							1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang
							1.01.02.2.01.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang
							1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang
							1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	25 Unit
							1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik
							1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	20 Paket
							1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	168 Satuan Pendidikan
							1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Pendidikan	166 Satuan Pendidikan
							1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik
							1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	214 Orang
							1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naiskatan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang
							1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	166 Satuan Pendidikan
							1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	168 Satuan Pendidikan
							1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	5 Ruang
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		100 persen		1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun jumlah sekolah yg mendapat meubelair	2 Unit 3 unit
							1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang
							1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang
							1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	8 Ruang
							1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit
							1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang
							1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang
							1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang
							1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang
							1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit
							1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket
							1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik
							1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	20 Paket
							1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	27220 Peserta Didik
							1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	70 Satuan Pendidikan
							1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik
							1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	92 Orang
							1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang
							1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	70 Satuan Pendidikan
							1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	70 Satuan Pendidikan
							1.01.02.2.02.44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang
							1.01.02.2.02.45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Presentase Rehabilitasi dan Pembangunan APE dalam dan APE Luar melalui Dana DAK, dan Peningkatan Mutu Peserta Didik dan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dibidang Akademi/Non Akademi, jumlah sekolah PAUD yang melaksanakan pengelolaan BOP.	100 persen		1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	8 Unit
							1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit
							1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	70 Peserta Didik
							1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	30 Paket
							1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	3341 Peserta Didik
							1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang
							1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	275 Satuan Pendidikan
							1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	275 Satuan Pendidikan

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase warga negara usia 7--18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 persen	1.01.02.2.04.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit
							1.01.02.2.04.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit
							1.01.02.2.04.06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit
							1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30 Peserta Didik
							1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	2125 Peserta Didik
							1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	15 Satuan Pendidikan
							1.01.02.2.04.15 Pembangunan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naisan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang
							1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	15 Satuan Pendidikan
							1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	15 Satuan Pendidikan
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki kualifikasi DIV dan S1 bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 persen	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki kualifikasi DIV dan S1 bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 persen	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen
							1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan
	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase terlaksananya pengembangan bahasa dan sastra	100 persen	1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan operasional UPT Pusat IPTEK dan bahasa, Promosi UPT Pusat Iptek dan Bahasa, Lomba Bahasa dan Sastra Daerah untuk pelajar, Workshop penyusunan kurikulum Bahasa dan Sastra Daerah Terlaksananya Workshop penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah	100 persen	1.01.06.2.01.02 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	6 Bahasa
							1.01.06.2.01.03 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Publikasi
							1.01.06.2.01.06 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Peserta Didik
							1.01.06.2.01.07 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	2 Dokumen
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	80,0 %	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen
								Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	7 dokumen
							1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan
							1.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
							1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
							1.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka Waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan
								Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen
							1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 Bulan	1.02.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penegakan Disiplin Aparatur	100 %	1.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket
							1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
							1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
							1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket
							1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
							1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Paket
							1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit
							1.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit
							1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	68 Unit
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan telepon Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan 12 Laporan
							1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan 0 Laporan 12 Laporan
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit 1 Unit 12 Unit
							1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 Unit
							1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir	85 %	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar	100 %	1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun Jumlah Puskesmas yang dibangun	0 Unit 1 unit
		2. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan balita	95 %						
		3. Persentase Puskesmas yang melakukan usia anak sekolah dan remaja	95 %						
		4. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia	90 %						
		5. Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	100 %						
		6. Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan reproduksi	100 %						
							1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	4 unit
							1.02.02.2.01.04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas yang dibangun	5 unit
							1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit
							1.02.02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dilakukan pengembangan Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 unit 0 Unit
							1.02.02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	0 Unit
							1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 unit
							1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas lainnya yang dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	0 unit

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
						1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	
						1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	
						1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	6 Unit	
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	52 Unit	
						1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	0 Paket	
							Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2 Paket	
						1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	0 Paket	
							Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	
							Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	3 Paket	
						1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	6 Unit	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13. Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12527 Orang	
				3. Persentase anak usia 0- 11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	95 %				
				5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %				
				6. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %				
				9. Persentase masyarakat miskin dan tidak mampu serta kelompok tertentu memperoleh jaminan kesehatan	100 %				
				Persentase ketersediaan bahan pendukung penanggulangan masalah kesehatan	100 %				
				Tersedianya Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas (APBD)	100 %				
						1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11958 Orang	
						1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11388 Orang	
						1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	57107 Orang	
						1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	96730 Orang	
						1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	438251 Orang	
						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	66193 Orang	
						1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165559 Orang	
						1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13620 Orang	
						1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1407 Orang	
						1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah kader TBC yang ditingkatkan kapasitasnya	60 orang	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	
						1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15467 Orang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah tenaga harian lepas pengolah makanan	12 Dokumen 8 orang
							1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen
							1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen 12 Dokumen
							1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen
							1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	12 Dokumen
							1.02.02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12 Dokumen
							1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen
							1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penduduk yang mendapatkan Pembayaran Premi PBI Kota Pontianak	35219 orang
							1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Persentase kebutuhan operasional pelayanan RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie	12 Dokumen 100 %
							1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen
							1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen
							1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	0 Unit 94 Unit
							1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, 1 Unit Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	12 Dokumen	1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	0 Dokumen 12 Dokumen
							1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen 12 Dokumen
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya bahan pendukung pengawasan dan pembinaan sarana kesehatan dasar Rumah Sakit Kota Pontianak yang terakreditasi	100 % 100 %	1.02.02.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	12 RS
							1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	94 Unit

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
						Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0 Orang 80 Orang
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1. Persentase fasilitas kesehatan farmasi, makan, minuman sesuai standar.	90 %	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin operasional	85 %	1.02.04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	225 Sarana
				1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			1.02.04.2.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	0 Dokumen
				1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1. Persentase Jumlah Industri Rumah Tangga yang baru dan telah habis masa ijinnya untuk memiliki ijin operasional 2. Persentase pelaku usaha yang memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan	100 % 100 %	1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12 Dokumen
				1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen
				1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri Rumah Tangga	100 %	1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	0 Unit
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 dokumen
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang / bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	1.03.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen / Laporan	1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen
							1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
							1.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan
							1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
			1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan keuangan perangkat daerah	12 Bulan		1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/bulan
							1.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1682 Dokumen
							1.03.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen
			1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	120 ASN		1.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket
							1.03.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen
							1.03.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen
							1.03.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen
							1.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang
							1.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang
			1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan		1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
							1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
							1.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket
							1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
							1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
							1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen
							1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
							1.03.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen
			1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	12 Unit		1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit
							1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							1.03.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit
							1.03.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit
			1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan		1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
							1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
							1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
			1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	24 Unit		1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit
							1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	62 Unit
							1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	418 Unit
							1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase berkurangnya luas genangan hujan / pasang tiap tahun	33,33 %	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang fungsi saluran yang dipelihara	33,33 %	1.03.02.2.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0.145 KM
							1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	180 KM
							1.03.02.2.01.55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	"Persentase sarana prasarana perpipaan terakses ke Rumah Tangga "	100 %	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan perkotaan	100 %	1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	57 Liter/Detik
							1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	1.002 Liter/Detik
							1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase berkurangnya jumlah pembuangan sampah ke TPA	87.50 %	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian kegiatan pengembangan sistem dan persampahan di kota Pontianak	87.5 %	1.03.04.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen
							1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	150243 Rumah Tangga
							1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	1 Unit
							1.03.04.2.01.05 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	150243 Rumah Tangga
							1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	2 Unit
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah KK yang dilayani sanitasi	92.03 %	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah KK yang dilayani sanitasi	92.03 %	1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	7 Rumah Tangga

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
							Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
						1.03.05.2.01.14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	90 Rumah Tangga	
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase optimalisasi sistem jaringan drainase yang dipelihara	33.33 %	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase optimalisasi sistem jaringan drainase yang dipelihara Yang berfungsi baik	33.33 %	1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	30 Dokumen
						1.03.06.2.01.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	15 Dokumen	
						1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	2421 M	
						1.03.06.2.01.06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	246 M	
						1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	400 M	
	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan pemukiman	100 %	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penyelenggaraan infrastruktur pemukiman di kawasan strategis kota (waterfront city)	100 %	1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Sistem Jaringan
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase capaian penataan bangunan gedung dan pelaksanaan kegiatan penataan dalam penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah dan pelayanan publik serta pemberian IMB dan SLF bangunan gedung	100 %	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase peningkatan layanan penyelenggaraan bangunan gedung	100 %	1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	200 Dokumen
						1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	9 Dokumen	
						1.03.08.2.01.03 Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	
						1.03.08.2.01.06 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	1 Unit	
						1.03.08.2.01.09 Penilaian Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	50 Unit	
						1.03.08.2.01.11 Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	20 Unit	
						1.03.08.2.01.12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	14 Unit	
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase peningkatan penataan bangunan dan lingkungan di Kota Pontianak	18,95 %	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian peningkatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	18,95 %	1.03.09.2.01.02 Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	6 Kawasan
						1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	6 Kawasan	
						1.03.09.2.01.04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	6 Kawasan	
						1.03.09.2.01.06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	"Persentase penambahan kinerja jalan kota "	2 %	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap	2 %	1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advise dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	8 Dokumen
							1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	25000 M ²
							1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen
							1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	4.62 KM
							1.03.10.2.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah panjang jalan yang dilebarkan Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	500 Meter 0 KM
							1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	0.54 KM
							1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.272 KM
							1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	2.3 KM
							1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	13 KM
							1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2 Unit
							1.03.10.2.01.16 Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilakukan Penggantian	1 Unit
							1.03.10.2.01.17 Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilakukan Pelebaran Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	2 Unit 0 M
							1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang dipelihara	5 Unit
	1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4 Dokumen						
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase capaian pengembangan jasa konstruksiPersentase capaian pengembangan jasa konstruksi	100 %	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta tenaga terampil konstruksi yang dilatih	50 peserta	1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	50 Orang
							1.03.11.2.01.06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	50 Orang
							1.03.11.2.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	50 Orang
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase capaian penyelenggaraan tata ruang	98.18 %	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	persentase capaian penetapan RTRW dan RRTR sesuai ketentuan	98.18 %	1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen
							1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen
							1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	2 Dokumen
							1.03.12.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen
							1.03.12.2.02.03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	2 Dokumen
							1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	6 Dokumen
				1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian ruang di Kota Pontianak	100 %	1.03.12.2.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	6 Dokumen
							1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	5 Dokumen
							1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	32 Dokumen/ Laporan	1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen
							1.04.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan
							1.04.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang
							1.04.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
							1.04.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	13 Dokumen
				1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaianya	35 ASN	1.04.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket
							1.04.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
							1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
							1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
							1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
							1.04.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	365 Dokumen
							1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	5 Unit	1.04.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	1.04.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
							1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
			1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	15 Unit		1.04.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit
							1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit
							1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 %	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah yang direhabilitasi dan dibangun kembali Bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten /kota Pontianak	58 Unit	1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	51 Unit Rumah
							1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit Rumah
				1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rusunawa yang dikelola	7 Tower	1.04.02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen
				1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 (sepuluh) Ha di Kota yang Ditangani	12,67 %	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen/ laporan lokasi kumuh dan rencana pencegahan serta penanganan perumahan dan permukiman kumuh	4 Dokumen/ Laporan	1.04.03.2.02.01 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen
							1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen
							1.04.03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	14 Ha	1.04.03.2.03.01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	2 Dokumen
							1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Jumlah Water Closet (WC) Rumah yang Diperbaiki	134 Unit Rumah 57 Unit WC
							1.04.03.2.03.03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen
							1.04.03.2.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan
							1.04.03.2.03.05 Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	0 Dokumen
							1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	14 Ha

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak layak Huni)	2.47 %	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Berkurangnya jumlah unit RTLH di luar kawasan kumuh	50 Unit	1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	77 Unit Rumah
							1.04.04.2.01.02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	0 Dokumen
							1.04.04.2.01.03 Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	0 Dokumen
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas dalam kondisi baik	87.70 %	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Penyelenggaraan PSU Perumahan	370 Lokasi	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen
							1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	370 Lokasi
							1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	17 Dokumen	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen
							1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
							1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan 12 Bulan	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan 1428 Orang/bulan
							1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
							1.05.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya Jumlah ASN yang Dikelola Administrasi Kepegawaiannya	19 Orang 102 Orang	1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket 2 Paket
							1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang
							1.05.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
			1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan 12 Bulan	1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket 4 Paket	
						1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket 1 Paket	
						1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket 1 Paket	
						1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket 1 Paket	
						1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen 12 Dokumen	
						1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan 1 Laporan	
						1.05.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11 Dokumen	
			1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan 12 Bulan	1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
						1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
			1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	12 Bulan 52 Unit	1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit 32 Unit	
						1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 42 Unit	
						1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara preventif dan represif, non yustisi maupun yustisi	100 Persen	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	100 Persen	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	0 Kasus
						1.05.02.2.01.02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	0 Kasus	
						1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen	
						1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermanfaat Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	102 Orang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							1.05.02.2.01.06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	360 Dokumen
			1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perwa	100 Persen		1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	1 Laporan
							1.05.02.2.02.02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan
							1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	0 Laporan
			1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	4 Laporan		1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	4 Laporan
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kejadian bencana yang berhasil ditanggulangi	100 %	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	1.05.03.2.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen
							1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	50 Orang
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	1.05.03.2.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen
							1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50 Orang
							1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen
							1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	2 Unit
							1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan
							1.05.03.2.02.09 Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen
							1.05.03.2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	50 Orang
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPD yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen
							1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	27 Orang
							1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	55 Orang
							1.05.03.2.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggara Penanggulangan Bencana yang di buat	100 %	1.05.03.2.04.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Prosentase Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran	100 persen 0	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan pengaduan masyarakat kasus kebakaran terlayani	100 persen	1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen
							1.05.04.2.01.05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	12 Dokumen
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Kecamatan yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1 Kecamatan 100 Orang	1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	0
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesejahteraan	100 %	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen
							1.06.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
							1.06.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
							1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan
							1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan
							1.06.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
							1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan
				1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.06.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
				1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.06.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	66 Paket
							1.06.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket
							1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
							1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
						1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	
						1.06.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	
						1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	
						1.06.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	
			1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.06.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	
			1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	
						1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
						1.06.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	
						1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
			1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	
						1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	
						1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	100 %	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota		1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6500 Orang	
						1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Orang	
						1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Keluarga	
						1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	
						1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Sertifikat	
	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100 %	1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		1.06.03.2.01.01 Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debaraksi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	85 %	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	6570 Orang
							1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang
							1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang
							1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang
							1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
							1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
							1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
							1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang
							1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang
							1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
							1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang
							1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
							1.06.04.2.02.08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Bantuan	100 %	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data penerima bantuan	100 %	1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	34900 Orang
							1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operator SIKS-NG yang di Fasilitasi	30 Orang
							1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Keluarga
							1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pendamping Program Bantuan Sosial	1250 Keluarga
							1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	100 %	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2846 Orang
							1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sandang yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang
							1.06.06.2.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	88 Unit
							1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Kelompok Rentan yang mendapat bantuan	4 Kelompok
							1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	179 Orang
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Makam Pahlawan Yang Dikelola	100 %	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	0 Makam
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen	2.07.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen
							2.07.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
							2.07.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan
							2.07.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
							2.07.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen
				2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	2.07.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket
							2.07.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.07.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket
							2.07.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
							2.07.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
							2.07.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket yang Disediakan
							2.07.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen
							2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	2.07.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit
							2.07.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	43 Unit
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	2.07.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
							2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah	12 Bulan	2.07.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit
							2.07.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit
							2.07.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase penyusunan rencana tenaga kerja	100 %	2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 Dokumen	2.07.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	100 Persen
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peserta Pelatihan Yang Lulus Dan Mendapatkan Sertifikat Kompetensi	100 %	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pecari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	30 Orang	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pecari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	50 Orang
				2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	38 Lembaga	2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	38 Lembaga
				2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/ kota	1 Dokumen	2.07.03.2.05.01 Pengukuran kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job fair	100 %	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	120 Orang	2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	120 Orang
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya pengelolaan informasi pasar kerja	12 Bulan	2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	100 Orang
							2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1100 Orang
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase tenaga kerja yang dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku	100 %	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kab/kota	12 Bulan	2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	60 Perusahaan
							2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	30 Laporan

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan Terlaksananya pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kab/kota		2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	30 Perkara
							2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	30 Perkara
							2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	9 Lembaga
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat kepuasan 95 % bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 dokumen Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah		2.08.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen
							2.08.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan
							2.08.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah		2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan
							2.08.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
							2.08.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen
				2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32 ASN Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaianya		2.08.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32 Paket
							2.08.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah		2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket
							2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket
							2.08.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket
							2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
							2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
							2.08.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen
							2.08.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan
			2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.08.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit
			2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan		2.08.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
							2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
							2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
			2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	140 unit		2.08.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit
							2.08.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
							2.08.02.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah
			2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
			2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100 %		2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
			2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	35 %		2.08.03.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
							2.08.03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 Organisasi
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
							2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota	100 %	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100 %	2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang
							2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Layanan
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	30 %	2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
							2.08.07.2.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	3 kegiatan	2.09.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen
							2.09.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Laporan
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan
							2.09.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 Dokumen
				2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Dikelola Administrasinya	59 ASN	2.09.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
							2.09.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	58 Orang

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							2.09.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang
			2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan		2.09.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
							2.09.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
							2.09.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
							2.09.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
							2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
							2.09.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen
							2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
							2.09.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen
			2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 unit		2.09.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit
							2.09.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit
							2.09.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit
			2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		2.09.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
							2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
							2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
			2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	115 unit		2.09.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit
							2.09.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	71 Unit
							2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit
							2.09.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit
							2.09.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah sesuai Standar Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Persentase Target Konsumsi Pangan	70 % 91 % 84 %	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pengawasan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	12 laporan	2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	13 Laporan
							2.09.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	0 Laporan
							2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12 Dokumen
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah	12 laporan	2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	28 Ton
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Koordinasi dan Pembinaan	0 kali	2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	0 Dokumen
							2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0 laporan
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Peningkatan Tahan Pangan	92 %	2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penanganan Kerawanan Pangan	6 kecamatan	2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	0 laporan
							2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 dokumen
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase kasus pangan yang tidak sesuai standar mutu yang telah ditetapkan	19 %	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	4 kali	2.09.05.2.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen
							2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGGKETA TANAH GARAPAN	Prosentase Penyelesaian konflik pertanian yang dimediasi	100 %	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara sengketa tanah yang difasilitasi/mediasi	7 Kasus	2.10.04.2.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7 Berita Acara
	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan	100 %	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk jalan dan bangunan	20 Bidang Tanah	2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 persen	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen
							2.11.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
							2.11.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan
							2.11.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan
			2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan
							2.11.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
							2.11.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen
							2.11.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan
							2.11.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen
							2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan
							2.11.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen
			2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	77 asn		2.11.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
							2.11.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang
			2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
							2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
							2.11.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
							2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
							2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
							2.11.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen
							2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
							2.11.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen
			2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
							2.11.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
							2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
			2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit
							2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit
							2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
							2.11.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	122 Unit
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan lingkungan hidup	100 persen	2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen
							2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen
				2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			2.11.02.2.02.03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran	65 persen	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah upaya pemantauan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan LH	2 upaya	2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen
							2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen
							2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	30 Dokumen
				2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah media lingkungan yang dipantau	3 media lingkungan	2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	12 Laporan
							2.11.03.2.02.02 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	2 Lokasi
							2.11.03.2.02.03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 Titik
				2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5 upaya pemulihan	2.11.03.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen
							2.11.03.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1 Dokumen
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100 persen	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terwujudnya Taman KEHATI	1 lokasi	2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 persen	2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan	15 kegiatan	2.11.05.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen
							2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10 Laporan
				2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	2.11.05.2.02.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen
							2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang menerapkan izin lingkungan dan izin PPLH	100 persen	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi	245 pelaku usaha	2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	50 Dokumen
							2.11.06.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	3 Orang
							2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	245 Laporan
							2.11.06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	0 Dokumen
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	1 Dokumen
	2.11.07 PROGRAM PENGUKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terwujudnya Kearifan Lokal di masyarakat terhadap PPLH	100 persen	2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah peserta Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	400 Orang	2.11.07.2.02.01 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	0 Dokumen
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan kapasitas kader masyarakat peduli lingkungan	100 persen	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan dan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	100 orang	2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	2 Lembaga
							2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen
							2.11.08.2.01.03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	150 Orang
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang dicapai	100 persen	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerima penghargaan Lingkungan Hidup	18 penerima	2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	8 Entitas

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 persen	2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang tertangani	75 kasus	2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 Dokumen
							2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	1 Dokumen
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	100 persen	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola (ton)	144652 ton	2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	2 Dokumen
							2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2 Laporan
							2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	109849.88 Ton
							2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	20 Kelompok
							2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen
							2.11.11.2.01.06 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen
							2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	4 Unit
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatian	100 %	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	15 dokumen	2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
							2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
							2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan
							2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan
							2.12.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
							2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
				2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	55 ASN	2.12.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
							2.12.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang
							2.12.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket
							2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
							2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
							2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
							2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 unit	2.12.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
							2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
							2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	42 unit	2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit
							2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga	89.50 %	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 %	2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	660 Dokumen
		Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	86.50 %						
		Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	81.50 %						
		Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	98.50 %						
							2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12000 Dokumen
							2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	80 Laporan
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 %	2.12.02.2.03.02 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	80 Dokumen

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status tepat waktu pelaporan	37,50 %	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	100 %	2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	10000 Dokumen
		Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang menerima Akta Kelahiran tepat waktu pelaporan	47,50 %						
		Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai tepat waktu pelaporan	37,50 %						
		Persentase Penduduk yang menikah menerima Akta Perkawinan tepat waktu pelaporan	57,50 %						
		Persentase Penduduk yang meninggal menerima Akta Kematian tepat waktu pelaporan	37,50 %						
							2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	12 Layanan
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %	2.12.03.2.02.03 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan
							2.12.03.2.02.04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	29 Laporan
				2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %	2.12.03.2.03.03 Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	2 Laporan
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data penduduk anomali dalam database SIAK	1 %	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100 %	2.12.04.2.01.02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen
		Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH	82,50 %						
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	2.12.04.2.03.03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan
							2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2 Laporan
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100 %	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregat kependudukan	100 %	2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
							2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1. Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan	60 %	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase lembaga kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan	75 %	2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	36 Lembaga
							2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							2.13.05.2.01.09 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1. TFR (Angka Kelahiran Total) 2,21 2. Angka Kelahiran Remaja umur 15 - 19 tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15 - 19) 400	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk 90 %	2.14.02.2.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)		Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dokumen	
					2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
					2.14.02.2.01.14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga		Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Laporan	
					2.14.02.2.01.15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK		Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Laporan 1 Laporan	
			2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		2.14.02.2.02.08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain		Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	2 Unit	
					2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	
					2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR) 70,52 % 2. Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 8 %	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) 100 %	2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Organisasi	
					2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	
					2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	
					2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	
					2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Laporan	
					2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	
			2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berdayaguna 100 %	2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	3215 Orang	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP 100 %	100 %	2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan
							2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	20093 Orang
							2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	3 Unit
							2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan
							2.14.03.2.03.10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	92 Orang
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah organisasi masyarakat yang terlibat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	15	2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	7 Kampung
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 - 49 tahun 2. Persentase Baduta Stunting	20,9 % 24 %	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	8 Unit
							2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan
							2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1521 Orang
							2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	23 Dokumen	2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen
							2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan
							2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan
							2.15.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan
			2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaianya	67 Orang		2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
							2.15.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang
			2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan		2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
							2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
							2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket
							2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
							2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2920 Dokumen
							2.15.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan
							2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan
							2.15.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen
			2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Paket		2.15.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit
							2.15.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit
			2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum	12 Bulan		2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
							2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
							2.15.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan
							2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
			2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	178 Unit		2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
							2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit
							2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	155 Unit
							2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							2.15.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan	82 %	2.15.02.2.02 Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas	13 Jenis	2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit
							2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	48 Unit
							2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	968 Unit
				2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik parkir	300 Titik	2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji	17000 Unit	2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit
							2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	7 Unit
							2.15.02.2.05.10 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2 Kegiatan	2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0 Laporan
							2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan
							2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan
				2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Orang yang Tersedia	10 Bus	2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit
							2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pembangunan Fasilitas yang dibangun, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	82 %	2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Kegiatan Pembangunan Pemeliharaan dan Pengawasan pada Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan	3 Kegiatan	2.15.03.2.13.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	1 Unit
							2.15.03.2.13.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	5 Unit
							2.15.03.2.13.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	12 Laporan
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat Kepuasan Bidang / Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	96 Persen	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22 dokumen	2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen
							2.16.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							2.16.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 1 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
							2.16.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen
							2.16.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 0 Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
							2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
							2.16.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
			2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 bulan Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah 12 bulan			2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan
							2.16.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
							2.16.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
							2.16.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen
							2.16.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
							2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan
			2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka waktu pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12 bulan			2.16.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket
							2.16.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang
							2.16.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang
			2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 bulan			2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
							2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket
							2.16.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket
							2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket
							2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
							2.16.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
						2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	
			2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 unit	2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	
						2.16.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	
						2.16.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	
			2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	
						2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
						2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	
			2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	71 Unit	2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	
						2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89 Unit	
						2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	92 Persen	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	14 Informasi	2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen
						2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	
						2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	
						2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	13 Dokumen	
						2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan	
						2.16.02.2.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	4 Dokumen	
						2.16.02.2.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	4 Dokumen	
						2.16.02.2.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2 Dokumen	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	97 Persen	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	31 Domain/Sub Domain	2.16.03.2.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
						2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	2 Layanan Publik	2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen
							2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit
							2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit
							2.16.03.2.02.08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan
							2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen
							2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen
							2.16.03.2.02.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	85 %	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
							2.17.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
							2.17.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
							2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
							2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Keuangan	12 Bulan	2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan
							2.17.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen
							2.17.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen
							2.17.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
							2.17.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen
							2.17.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
				2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka waktu Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	2.17.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
				2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	2.17.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							2.17.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang
			2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum	12 Bulan		2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
							2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
							2.17.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
							2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
							2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
							2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen
							2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
							2.17.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
			2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket pengadaan barang milik daerah	1 Paket		2.17.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit
							2.17.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit
			2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan		2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
							2.17.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan
							2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
			2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan		2.17.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit
							2.17.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit
							2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit
							2.17.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit
							2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit
							2.17.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam	1.15 %	2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jangka waktu fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	12 Bulan	2.17.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit Usaha
				2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jangka waktu fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	12 Bulan	2.17.02.2.02.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit Usaha
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	29.35 %	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang dimonev	40 Unit Usaha	2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Unit Usaha
							2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	150 Unit Usaha
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT	20 %	2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	30 Unit Usaha	2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	30 Unit Usaha
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	23 %	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	160 Unit Usaha	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	160 Orang
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	14 %	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Unit)	15 Unit Usaha	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	30 Orang
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	9 %	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1300 Unit Usaha	2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Unit Usaha
							2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	20 Unit Usaha
							2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	1613 Unit Usaha
							2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	90 Unit Usaha
							2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	150 Orang
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	0.05 %	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	150 Unit Usaha	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	150 Unit Usaha
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Bldang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
							2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
							2.18.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Bldang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan
							2.18.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
							2.18.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	13 Dokumen
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Bldang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	2.18.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
							2.18.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Bldang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
							2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
							2.18.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket
							2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
							2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket
							2.18.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen
							2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Bldang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	2.18.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	116 Unit
							2.18.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	152 Unit
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Bldang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
							2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
							2.18.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Bldang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	2.18.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit
							2.18.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit
							2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89 Unit
							2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pengembangan iklim penanaman modal yang dilaksanakan	100 %	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah/kota	100 %	2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4 Dokumen
							2.18.02.2.01.02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	0 Kegiatan Usaha
				2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembuatan peta potensi investasi kota	100 %	2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen
							2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Informasi Penanaman Modal yang didapat oleh masyarakat dan dunia usaha	100 %	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah/kota	100 %	2.18.03.2.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
							2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang sesuai dengan SOP	100 %	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota	100 %	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha
							2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	190 Kegiatan Usaha
							2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	5 Orang
							2.18.04.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2903479430 Kegiatan Usaha
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan PMA/PMDN yang melaporkan investasi penanaman modal sesuai SOP	100 %	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah/kota	100 %	2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	8 Kegiatan Usaha
							2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	300 Pelaku Usaha
							2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	120 Kegiatan Usaha
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sistem pengolaan data dan informasi pelayanan publik yang terintegrasi	100 %	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Telaksananya pengelolaan data dan informasi perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kota Pontianak	100 %	2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	7 Dokumen

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA									
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase meningkatnya kepuasan bidang terhdap pelayanan kesekretiatan	100 %	2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Derah	100 %	2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
							2.19.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
							2.19.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
							2.19.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
							2.19.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
							2.19.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan
							2.19.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan
				2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatian	100 %	2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan
							2.19.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
							2.19.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan
				2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.19.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
							2.19.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.19.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
							2.19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
							2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
							2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
							2.19.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen
							2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
				2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.19.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan
						2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
						2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
			2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan		2.19.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit
						2.19.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 41 Unit
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan 25,81 %	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 7 Orang		2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 7 Orang
						2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 50 Orang
						2.19.02.2.01.04 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan 45 Orang
						2.19.02.2.01.07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan 7 Orang
						2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan 9 Orang
						2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan 25 Orang
			2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan 1 dokumen		2.19.02.2.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha 40 Orang
						2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan 2 Dokumen
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase peningkatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota 2,67 %	2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota, Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 1 dokumen		2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen
						2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
			2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Jumlah Atlet yang difasilitasi untuk mengikuti POPDA Tingkat Provinsi	100 Atlet 100 Atlet 100 orang 100 Atlet	2.19.03.2.03.01 Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	55 Orang	
						2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	0 Orang	
			2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Hibah KONI dan NPC	1 Tahun	2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Organisasi	
			2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai Meningkatnya Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	100 Orang 100 Orang 1 organisasi 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 7 unit 7 unit 1 5 dokumen 7 Kegiatan	2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	5 Dokumen	
						2.19.03.2.05.03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	7 Unit	
						2.19.03.2.05.04 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	0 Dokumen	
						2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase meningkatnya kapasitas daya saing kepemudaan	25,81 %	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 laporan	2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi
						2.19.04.2.01.05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 laporan	
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	95 Persen	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral di Kota Pontianak yang terbaru/terupdate	1800 Data	2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen
							2.20.02.2.01.02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	30 Orang
							2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2 Dokumen

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							2.20.02.2.01.04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	30 Orang
							2.20.02.2.01.06 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	2 Dokumen
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah	Baik Indeks	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandian	1 Area	2.21.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen
							2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan
							2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	20 Laporan
							2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	10 Perangkat Daerah
				2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS)	5 OPD	2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	6 Perangkat Daerah
					Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	50 Persen			
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan yang di kelola dan dilestarikan	100 persen	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Dokumen Warisan Budaya Tak Benda, Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Gawai Dayak, Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Cap Go Meh, pemilihan dan Fasilitasi Bujang dan Dare Kota Pontianak, Festival Permainan Rakyat Meriam karbit, dan Festival Saprahan Pelajar SMP, Jumlah kegiatan seminar budaya	100 persen	2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6 Objek
							2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pendokumentasiannya hasil Karya Seni Seniman Kota Pontianak, Menghibur Masyarakat Kota Pontianak, Kegiatan Kebudayaan Pada Hari Jadi Kota Pontianak, Membawa Tim Kesenian Keluar Daerah, Penayangan/Promosi Kegiatan Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Pontianak	100 Persen	2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Dokumentasi Objek Pemajuan Kebudayaan (Seni), Fasilitasi Pentas Seni dan Budaya Kota Pontianak, Fasilitasi Pekan Kebudayaan Daerah/Lomba Cipta Lagu Pontianak	3 Laporan
							2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Fasilitasi Misi Kesenian Luar Daerah (APEKSI/PKN/PAWAI/PARADE), Fasilitasi Promosi/Dokumentasi/Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya Kota Pontianak	2 Laporan
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Penyelenggaraan Sosialisasi Dapobud/Workshop Kesenian Tradisional Seni Tari/Seni Teater/Desain Poster/Musik Tradisional/Gambar Bercerita/Kriya	100 Persen	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keikutsertaan Guru SD/SMP se-Kota Pontianak/Kelompok Seni/Pelajar/Komunitas/Tenaga Kebudayaan/Sarana Prasarana Kebudayaan/Objek Pemajuan Kebudayaan/Cagar Budaya	100 Persen	2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Fasilitasi Sosialisasi Dapobud/Workshop/Seminar/FGD Kesenian Kota Pontianak	100 Orang
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Objek kemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penanyangan keragaman)	100 persen	2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan sarana prasarana sejarah lokal	100 persen	2.22.04.2.01.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 Unit
					Persentase Objek kemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penanyangan keragaman)	100 persen			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Teregister cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	100 persen	2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Teregister cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	100 persen	2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek Budaya
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen
							2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan
							2.23.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan
							2.23.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen
							2.23.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 Dokumen
				2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	2.23.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket
							2.23.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	100 persen	2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
							2.23.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
							2.23.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
							2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
							2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
							2.23.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen
							2.23.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan
							2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	2.23.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	2.23.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan
							2.23.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
							2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan
			2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terseleenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		2.23.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit
							2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit
							2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	persentase kunjungan ke perpustakaan dan tempat baca	95 persen	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/ kota	100 persen	2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan
							2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan
							2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	0 Perpustakaan
							2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang
							2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	0 Eksemplar
							2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	71761 Eksemplar
							2.23.02.2.01.10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen
			2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/ kota	100 persen		2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	35 Lokus
							2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0 Perpustakaan
							2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	12 Orang
							2.23.02.2.02.05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Keaktifannya	0 Orang
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	100 persen	2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	persentase naskah kuno milik daerah kab/ kota yang dilestarikan	100 persen	2.23.03.2.01.02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	0 Eksemplar
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Indeks Kearsipan	8 baik	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/ kota	80 %	2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	29 Berkas
							2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1 Berkas

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Laporan
			2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/ kota	85 persen		2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2000 Arsip
			2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/ kota melalui JIKN	75 %		2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	10 Pengguna
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	persentase arsip statis dan arsip hasil alih media kab/ kota	85 persen	2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	persentase arsip perangkat daerah yang dimusnahkan	75 persen	2.24.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Arsip
							2.24.03.2.01.02 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	50 Berkas
			2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	persentase arsip perangkat daerah yang diselamatkan	60 persen		2.24.03.2.03.01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Daftar
							2.24.03.2.03.02 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	5 Arsip
			2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	persentase arsip alih media dan arsip yang telah diinput	85 %		2.24.03.2.04.02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	100 Arsip
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi	100 %	3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan perikanan tangkap	1 kali	3.25.03.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen
							3.25.03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	74 Unit
				3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi bagi Nelayan	1 kali	3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	80 Orang
							3.25.03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	4 Kelompok
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan jumlah kelompok pembudidaya yang dilayani/didampingi/dibina	53,33 %	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pendampingan dalam rangka pengembangan usaha perikanan budidaya	2 kali	3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	24 Kelompok
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah jenis sarana perikanan budidaya	3 jenis	3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit
							3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit
							3.25.04.2.04.04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 dokumen

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase jumlah pelaku usaha mikro dan kecil pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dilayani/didampingi/dibina	85,71 %	3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kegiatan pelayanan Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	3 kali	3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	6 unit usaha
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3,43 %	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 dokumen	3.26.02.2.01.01 Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0 Lokasi
							3.26.02.2.01.02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0 Dokumen
							3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi
							3.26.02.2.01.04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen
				3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	0 Dokumen	3.26.02.2.02.01 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Dokumen
							3.26.02.2.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	0 Kawasan
							3.26.02.2.02.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Unit
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12 laporan		3.26.02.2.03.01 Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0 Lokasi
							3.26.02.2.03.02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Dokumen
							3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi
							3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit
							3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12 Laporan
							3.26.02.2.03.07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Lokasi
				3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			3.26.02.2.04.01 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Dokumen
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota	3,43 %	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Hibah untuk Kegiatan Susur Sungai Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan 1 laporan	3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen
		Persentase peningkatannya pemasaran pariwisata	3,43 %				3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Laporan
							3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspres, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota			3.26.04.2.01.01 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	0 Unit
				3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1 dokumen	3.26.04.2.02.07 Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen
							3.26.04.2.02.10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0 Dokumen
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3,43 %	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) Jumlah peserta festival ramadan Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1 laporan 30 Orang 20 Orang 30 Orang	3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	40 Orang
							3.26.05.2.01.03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	40 Orang
							3.26.05.2.01.05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5 Laporan
							3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	70 Orang
				3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	30 Orang	3.26.05.2.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	30 Orang
							3.26.05.2.02.02 Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	0 Laporan
							3.26.05.2.02.03 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	0 Orang
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas pertanaman keladi Luas pertanaman ubi kayu yang menggunakan pupuk Nilai indeks pertanaman (IP) Persentase bibit Sumber Daya Genetik (SDG) bersertifikat Persentase luas lahan yang ditanami dengan benih bersertifikat Persentase luas panen tanaman hortikultura Persentase sarana yang memenuhi standar	4,5 Ha 6 Ha 1,30 1,4 % 0,34 % 4,5 % 6,05 %	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Penerapan IPTEK Pertanian	3 jenis	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	7 laporan
							3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	7 Laporan
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengembangan Bibit Unggul pertanian	2 jenis	3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen
							3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
				3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan kelompok tani/ternak	24 kali	3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan
				3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	4 kali	3.27.02.2.05.05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	0 Ton
							3.27.02.2.05.06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 Laporan
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian	40 %	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana pertanian	2 jenis	3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	5 Unit
		Persentase peningkatan pelayanan prima di UPTD agribisnis	2,98 %				3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit
							3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit
							3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit
							3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan pelayanan di Kawasan Usaha Peternakan	5 %	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan	2 kali	3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Laporan
		Persentase Peningkatan Pelayanan di Puskesmas	10 %						
		Persentase Peningkatan Pelayanan di RPH Sapi	8 %						
		Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat yang menerapkan standar keamanan produk hewan	10 %						
		Persentase Penurunan Hewan yang Terkena Penyakit Menular Ternak	0 %						
				3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Jasa Medik Veteriner	300 kali	3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3 Laporan
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (RPH & RPU)	2 kali	3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	0 Laporan dan Produk Hewan
							3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	2 Laporan
							3.27.04.2.04.03 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	2 Laporan
				3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan hewan	4 kali	3.27.04.2.05.01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	2 Laporan
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian	75 %	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kegiatan penyuluhan pertanian	7 kegiatan	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Unit
		Persentase peningkatan kapasitas petani dan pelaku agribisnis	7,68 %						

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	33 unit
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	100 %	3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase perijinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin : a. Pusat perbelanjaan dan b. Toko swalayan	100 %	3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen
				3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang Yang dimonitoring	72 Unit	3.30.02.2.02.01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen
				3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase penerbitan STPW Dalam Negeri yang tepat waktu	80 %	3.30.02.2.03.01 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen
				3.30.02.2.04 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Persentase penerbitan STPW Luar Negeri yang tepat waktu	80 %	3.30.02.2.04.02 Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	1 Dokumen
				3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Fasilitasi Penerbitan SIUP Minol Gol B dan C	3 Izin	3.30.02.2.05.01 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen
				3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	36 Unit	3.30.02.2.06.03 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	12 Laporan
				3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	90 %	3.30.02.2.07.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3 Dokumen
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang ditingkatkan	44 %	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	14 Unit	3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit
							3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	14 Unit
				3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	14 Unit	3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen
							3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100 %	3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jangka waktu Jaminan ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 Bulan	3.30.04.2.01.03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase koefisien variasi harga antar waktu <	4 %	3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan
							3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan
				3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jangka waktu Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	12 Bulan	3.30.04.2.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pelaku Usaha ekspor yang dibina	100 %	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang	1 Kali	3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	105 Pelaku Usaha
							3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 Pelaku Usaha
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTTP) bertanda tera sah yang berlaku	98 %	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	10948 uttp	3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	10948 Unit
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis.	100 %	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jangka waktu Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam negeri	12 Bulan	3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	40 UMKM
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100 %	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	1 Dokumen	3.31.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2 Dokumen
							3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3 Dokumen
							3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen
							3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	9 Dokumen
							3.31.02.2.01.06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	92 %	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (UKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jangka waktu Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	12 Bulan	3.31.03.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	60 Dokumen
							3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase informasi industri secara lengkap dan terkini	28 %	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IU, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri dikab/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan Industri di kab/kota	400 IKM	3.31.04.2.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen
							3.31.04.2.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen
4.01 SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Dokumen	4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
							4.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
							4.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen
							4.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan Daerah
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	142 Orang/bulan
							4.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
							4.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen
				4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 bulan	4.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen
					Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %			
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	142 ASN	4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
							4.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen
							4.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen
							4.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen
							4.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang
							4.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	304 Orang
							4.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket
							4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
							4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
							4.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
							4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan
							4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
			4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	61 Unit		4.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit
							4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit
							4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit
							4.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit
			4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
							4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
							4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan
							4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
			4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan		4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit
							4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit
							4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	184 Unit
							4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit
							4.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
			4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan		4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan
							4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket
							4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
				4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah	Jangka waktu penyediaan kebutuhan 12 Bulan Sekretariat Daerah	12 Bulan	4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket
							4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Persentase Penyampaian laporan Reformasi Birokrasi	100 %	4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen
							4.01.01.2.13.02 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan
							4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen
							4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen
							4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	persentase penyelenggaraan keprotokol, penyebarluasan informasi dan hasil liputan kepala daerah	100 %	4.01.01.2.14.01 Fasilitas Keprotokol	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokol	4 Laporan
							4.01.01.2.14.02 Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	3 Laporan
							4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang berfungsi	100 %	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Presentase kecamatan dan kelurahan yang mendapatkan pembinaan, Presentase pemenuhan laporan kegiatan pengelolaan administrasi pemerintahan, kewilayahan, Presentase pemenuhan laporan pelaksanaan Rakernas APEKSI dan Muskomwil V Kalimantan, Presentase perangkat daerah yang menyampaikan data dukung kinerja kunci	100 %	4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen
							4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen
							4.01.02.2.01.03 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya fasilitas kehidupan beragama, sosial dan kemasyarakatan	100 %	4.01.02.2.02.01 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen
							4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen
							4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	6 Dokumen
				4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum daerah	100 %	4.01.02.2.03.01 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	780 Dokumen
							4.01.02.2.03.02 Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	5 Kasus
							4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	50 Dokumen
				4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah Yang Difasilitasi	100 %	4.01.02.2.04.01 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	3 Dokumen
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	persentase koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	100 %	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase meningkatnya evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian yang difasilitasi	100 %	4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen
							4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen
							4.01.03.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen
							4.01.03.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen
			4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Fasilitas, Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan yang difasilitasi dan diterbitkan	100 %		4.01.03.2.02.01 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	8 Dokumen
							4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan
							4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan
			4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	100 %		4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	105 Dokumen
							4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	45 Dokumen
							4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	350 Orang
			4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	persentase pemantauan terkait Sumber Daya Alam	100 %		4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen
							4.01.03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen
							4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen
4.02 SEKRETARIAT DPRD									
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan pelayanan kesekretariatan	100 %	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen	4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
							4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
							4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan
			4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan		4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan
							4.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
							4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
							4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan
			4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah	1 dokumen		4.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaianya	37 orang	4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket
							4.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket
							4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket
							4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket
							4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
							4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
							4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	8 Dokumen
							4.02.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	47 Laporan
							4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	120 unit	4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	37 Unit
							4.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	21 Unit
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
							4.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan
							4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	277 unit	4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit
							4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit
							4.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit
							4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	237 Unit
							4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima layanan	45 orang	4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan
							4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang
			4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Jangka waktu penyediaan layanan administrasi DPRD	12 bulan	4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen
						4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	
						4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 Dokumen	
						4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	
						4.02.02.2.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	
			4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen kebijakan anggaran	5 dokumen	4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	
						4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	
						4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	
						4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	
						4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	
			4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	100 %	4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	60 Laporan	
						4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	60 Laporan	
						4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	60 Laporan	
						4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	60 Laporan	
						4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	
						4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	20 Dokumen	
			4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan	100 %	4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	
						4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	
						4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	
						4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	
			4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi	100 %	4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	
						4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	
			4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan kode etik	100 %	4.02.02.2.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	
						4.02.02.2.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Laporan	
			4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	60 Laporan
							4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen
							4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen
5.01 PERENCANAAN									
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen
							5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
							5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
							5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen
							5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen
							5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
							5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan
							5.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
							5.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
							5.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen
							5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan
							5.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Dokumen
							5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan
							5.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen
				5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	5.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen
							5.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen
							5.01.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							5.01.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan
							5.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan
							5.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
							5.01.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	5.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit
							5.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	96 Paket
							5.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
							5.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen
							5.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen
							5.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang
							5.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang
							5.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
							5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket
							5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket
							5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket
							5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen
							5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan
							5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
							5.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen
							5.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
				5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit
				5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
							5.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
							5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
			5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit
							5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit
							5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	persentase pencapaian target program pembangunan daerah	100 %	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen
							5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen
							5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara
							5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	31 Berita Acara
							5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara
							5.01.02.2.01.06 Penyajian Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	757 Usulan
							5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen
			5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase terlaksananya analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	100 %		5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	0 Dokumen
								Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6 Masukan
							5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	75 Orang
							5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku
			5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100 %		5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan
							5.01.02.2.03.02 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	9 Kerja Sama
							5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan
			5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase terlaksananya implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah	100 %		5.01.02.2.04.01 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	0 Dokumen

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							5.01.02.2.04.02 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0 Dokumen
							5.01.02.2.04.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi program RKPD Perangkat daerah ke dalam APBD	100 %	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %	5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen
							5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen
							5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Perangkat Daerah
							5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan
							5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pemerintahan	6 Laporan
							5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen
							5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	8 Perangkat Daerah
							5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	8 Perangkat Daerah
							5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase terlaksananya koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
							5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah
							5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah
							5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Perekonomian	1 Laporan
							5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen
							5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	1 Perangkat Daerah

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
						5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0 Laporan	
						5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang SDA	1 Laporan	
			5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase terlaksananya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 %	5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	
						5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0 Laporan	
						5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0 Laporan	
						5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	
						5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	
						5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	0 Laporan	
						5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	0 Laporan	
						5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Wilayah	1 Laporan	
5.02 KEUANGAN									
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 persen	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	14 dokumen/laporan	5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
							5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
							5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen
							5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan Daerah
			5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	12 bulan		5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan
							5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen
							5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 Laporan
			5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaianya	90 orang		5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
							5.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang
							5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang
			5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan		5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
							5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket
							5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
							5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
							5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
							5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen
							5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
			5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	85 unit		5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit
							5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	77 Unit
			5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan		5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
							5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
							5.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan
							5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	206 unit	5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
							5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit
							5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	261 Unit
							5.02.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit
							5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 persen	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Sesuai Ketentuan	236 dokumen	5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	600 orang			
							5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
							5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen
							5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen
							5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen
							5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	90 Dokumen
							5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen
							5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen
							5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen
							5.02.02.2.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	14 Dokumen
							5.02.02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	29 Dokumen
							5.02.02.2.01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen
							5.02.02.2.01.13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	600 Orang
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	11686 dokumen	5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	11000 Dokumen
					Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	13 laporan			
					"Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota"	200 orang			
							5.02.02.2.02.02 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan
							5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	150 Dokumen

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen
							5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen
							5.02.02.2.02.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen
							5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan
							5.02.02.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 Dokumen
							5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	516 Dokumen
							5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen
							5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang
			5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	26 Lembaga 22 Dokumen 29 Laporan 120 Orang		5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan
							5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen
							5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4 Laporan
							5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan
							5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen
							5.02.02.2.03.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen
							5.02.02.2.03.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							5.02.02.2.03.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen
							5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen
							5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen
							5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang
							5.02.02.2.03.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	26 Lembaga
							5.02.02.2.03.13 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan
			5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6 laporan		5.02.02.2.04.02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan
							5.02.02.2.04.03 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan
							5.02.02.2.04.04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan
							5.02.02.2.04.05 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	1 Laporan
							5.02.02.2.04.06 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1 Laporan
							5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan
			5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	16 dokumen		5.02.02.2.05.01 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	6 Dokumen
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	30 orang		5.02.02.2.05.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	6 Dokumen
							5.02.02.2.05.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	31 Orang
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	100 persen	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	18 dokumen	5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen
				Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	6 Laporan		5.02.03.2.01.02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	250 orang		5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen
							5.02.03.2.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen
							5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan
							5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan
							5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan
							5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	14 Dokumen
							5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan
							5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan
							5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase dokumen data base pajak dan atau retribusi yang tersedia 100 persen	100 persen	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 225815 dokumen	225815 dokumen	5.02.04.2.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen
		Persentase pelayanan kepada wajib pajak dan atau retribusi yang diselesaikan tepat waktu 100 persen	100 persen		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 33 laporan	33 laporan			
		Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dan atau retribusi dalam melakukan pembayaran pajak/retribusi 60 persen	60 persen		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 1 layanan	1 layanan			
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 5 unit	5 unit			
							5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen
							5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan
							5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit
							5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan
							5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan
							5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya	0 Obyek Pajak
							5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen
							5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan
							5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	0 Dokumen
							5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	223800 Dokumen
							5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2000 Dokumen
							5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 Dokumen
							5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	18 Laporan
							5.02.04.2.01.15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
5.03 KEPEGAWAIAN									
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah	100 %	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
							5.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
							5.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
							5.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen
							5.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen
							5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan
							5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan
							5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
							5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
							5.03.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen
							5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan
				5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket
							5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
							5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
							5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen
							5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
						5.03.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	
						5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
						5.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
						5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	
						5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	
						5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	85 %	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	
						5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	
						5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	
						5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	
						5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	16 Dokumen	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN		5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi ASN	5 Dokumen	
						5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	
						5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN		5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	342 Orang	
						5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	
						5.03.02.2.03.03 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	
						5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100 Orang	
						5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen	
						5.03.02.2.03.10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	40 Orang	
						5.03.02.2.03.11 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	1 Laporan	
						5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	300 Orang	
						5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen hasil fasilitasi Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	1 Dokumen	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
						5.03.02.2.03.15 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Dokumen	
			5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Dokumen	
						5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	553 Orang	
						5.03.02.2.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	100 Orang	
						5.03.02.2.04.06 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	0 Dokumen	
						5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	303 Orang	
						5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	3 Laporan	
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional	85 %	5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	
						5.04.02.2.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen	
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja program penelitian dan pengembangan daerah	74,20 %	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase tersedianya laporan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100 %	5.05.02.2.01.01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	12 Laporan
						5.05.02.2.01.12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	
				5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	100 %	5.05.02.2.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	12 Dokumen
				5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase tersedianya dokumen kajian bidang ekonomi dan pembangunan	100 %	5.05.02.2.03.01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen
						5.05.02.2.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	0 Dokumen	
						5.05.02.2.03.06 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	
						5.05.02.2.03.09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	0 Dokumen	
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase tersedianya dokumen/laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	100 %	5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	12 Dokumen
						5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	7 Laporan	
						5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	6 Laporan	
6.01 INSPEKTORAT DAERAH									

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat Kepuasan 100 % Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0 0	6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	6 dokumen
						6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		
						6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		
						6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		
						6.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		
			6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan		
						6.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen		
			6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			6.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		
			6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		
						6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		
						6.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		
						6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		
						6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		
						6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 Dokumen		
						6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan		
			6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		
						6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		
			6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		
						6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		
						6.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
						6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
			6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	
						6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	
						6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase kategori hasil evaluasi SPIP PD dengan score 3,5	3,2 score	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal		6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	39 Laporan	
						6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	38 LHA	
						6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan kinerja	33 LHR	
						6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan keuangan	97 LHR	
						6.01.02.2.01.06 Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	
						6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 Laporan	
						6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	6 LHA	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase unit kerja yang memenuhi standar untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM	10 %	6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6 Rekomendasi	
						6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	45 Rekomendasi	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi		6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 perangkat daerah	
						6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	30 perangkat daerah	
						6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	
						6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	30 perangkat daerah	
	7.01 KECAMATAN								

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah 90 % Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap layanan kesekretariatan 90 % Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan 90 % Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan 100 % Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan 90 % Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan 95 %	90 %	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah Yang Disusun (Renja PD, Renja Perubahan, RKT, Cascading, LFW, KKE, Rencana Aksi , Reformasi dan Birokrasi, Peta Bisnis) 31 Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 70 Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 Dokumen Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10 Dokumen Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (lppd,lakip,spip semester 1,2, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 4 triwulan, Zona Integeritas, PMBRB ,anjab dan Evanjab) 17 Laporan Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah 90 % Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap layanan kesekretariatan 100 % Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah 100 %	17 Dokumen 31 Dokumen 70 Dokumen 100 Dokumen 10 Dokumen 17 Laporan 17 Laporan	17 Dokumen 31 Dokumen 70 Dokumen 100 Dokumen 10 Dokumen 17 Laporan 17 Laporan	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17 Dokumen	10 Dokumen 11 Dokumen 12 Dokumen 13 Dokumen 17 Dokumen
							7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen	
							7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	
							7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen	1 Dokumen	
							7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen	1 Dokumen	
							7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17 Laporan	1 Laporan 4 Laporan 8 Laporan 12 Laporan 17 Laporan	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan Daerah
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan Daerah
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan Daerah
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan Daerah
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan Daerah
			7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Laporan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan Tunjangan ASN	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan Tunjangan ASN	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	12 Bulan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan Tunjangan ASN	
				Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah	100 %		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan Tunjangan ASN	
				Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan Tunjangan ASN	
						7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	
						7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	
						7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan SKPD	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan SKPD	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan SKPD	
						7.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	
						7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	
						7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun (Cat. RKBU dan RKPBU) 2 Laporan Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Yang Disusun (RKBU dan RKPBU) 2 Dokumen Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 12 Laporan Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan 90 % Tersedianya Pengadministrasian/Penatausahaan Barang Milik Daerah 100 %		7.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Laporan	
							7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
							7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 orang Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya 156 Stel Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 73 Stel Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 158 Paket Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap layanan kesekretariatan 100 % Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 %		7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 73 Paket Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 80 Stel Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 90 Paket Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 100 Stel Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 139 Stel	
							7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
							7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen
							7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang
							7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan Jangka waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Bulan Jangka waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan Jangka waktu penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga (Alat Kebersihan Kantor) 12 Bulan Jangka waktu penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket "Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket M Daerah Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Pemeritah 2023 % Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2023 % Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah 90 % Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah 2023 % Meningkatnya Realsidalam Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerahasi Anggaran 90 % Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah 100 % Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayan kesekretariatan 90 % Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan 90 % Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % Tersedianya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket			
					7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 bulan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 27 Paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 178 Paket			
					7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 8 Paket Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 9 Paket Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 13 Paket Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 17 Paket Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 22 Paket			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
						7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80 Paket	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	157 Paket	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	183 Paket	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	325 Paket	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	596 Paket	
						7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7236 Lembar	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8284 Lembar	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10607 Lembar	
						7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	8 Dokumen	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	84 Dokumen	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	96 Dokumen	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	120 Dokumen	
						7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	
						7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	
						7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket mebel yang disediakan	30 unit				
				Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit				
				Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	90 %				
				Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah	100 %				
				Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	90 %				
				Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %				
						7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit
							7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Kebersihan, Pengamanan, Supir dan Tenaga IT 4 Laporan Jumlah Jasa Kebersihan, Pengamanan, Supir dan Tenaga IT 288 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan Jumlah Rekening Air, Listrik, Telpon dan Internet Yang Dibayar 48 Laporan Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah 90 % Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah 100 % Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan 90 % Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 %			7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan	
							7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 288 Laporan	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara 1 Unit Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara 2 Unit Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara 4 Unit Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit "Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara" 50 unit Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara 5 Unit Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara 14 Unit Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara 30 Unit Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah 90 % Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah 2023 % Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah 90 % Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah 2023 % Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah 100 % Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan 90 % Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % Terlaksananya Pemerlihaaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 %	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 18 Unit					
						7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 69 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 48 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit			
						7.01.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Dipelihara 1 Unit			
						7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
						7.01.02.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90 %	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	46 Laporan	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan
		persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	95 %		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	42 Laporan		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan
		Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	90 %		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Vertikal Terkait (Jumlah Kegiatan Survey Kepuasan masyarakat (sKM) Kecamatan dan Kelurahan, Pembinaan Inovasi Unggulan Kantor Camat Pontianak Kota, Terlaksananya Kegiatan Inovasi Kecamatan, Terlaksananya Musrembang Kecamatan, Terlaksananya Pelayanan Prima sesuai standart dan SOP)	42 Laporan		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan
		Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	95 %		Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat	90 %		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8 Laporan
		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	85 %		Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	90 %		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	46 Laporan
		Presentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	90 %		Tercapainya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	85 %		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 kegiatan
					Terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang dilimpahkan di Kecamatan	8 Laporan		Jumlah Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	506 orang
					Terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang dilimpahkan ke kecamatan	95 %		Jumlah RT/RW yang diberikan Bantuan Operasional	
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan efektif pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	3 Laporan	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan
					Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat	90 %		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan
					Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	95 %		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan
					Tercapainya pelayanan prima di Kecamatan	85 %		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan
					Terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang dilimpahkan di Kecamatan	15 Laporan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
					Terlaksananya kegiatan Pelayanan Prima dan IKM	1 Kegiatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Laporan
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	90 %	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitas Kegiatan PKK Kecamatan	12 Laporan	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya kegiatan musrenbang kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM dan berkoordinasi dengan kelurahan	1 Kegiatan
		persentase keterlibatan masyarakat	90 %		Jumlah Kegiatan Forum Anak Kecamatan	1 Laporan		Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM dan berkoordinasi dengan kelurahan	1 Kegiatan
		Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di kecamatan	95 %		Jumlah Kegiatan Pembinaan Gotong Royong	12 Laporan			
		Persentase keterlibatan masyarakat Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/Tw)	90 %		Jumlah Kegiatan Senam ASN	12 Laporan			
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	95 %		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan			
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	82 %		Jumlah Pembinaan Kegiatan Gotong Royong, Fasilitas Kegiatan PKK Kecamatan, Fasilitas Kegiatan Pramuka Kecamatan, Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pembinaan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan dan Kegiatan Forum Anak Kecamatan	35 Kegiatan			
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (LPM, PKK, Karang Taruna/Forum Anak, RT/RW, Posyandu)	95 %		Jumlah Pembinaan Olahraga dan Kesenian	2 Laporan			
		Presentase LPM aktif	95 %		Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	90 %			
		Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	90 %		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	95 %			
					Terwujudnya kegiatan di Kecamatan	82 %			
					umlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33 Laporan

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan Pembinaan Lomba Kelurahan dan Fasilitasi Kegiatan Lomba di Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan Perlombaan yang difasilitasi : Kegiatan Lomba Kelurahan, Perlombaan PHBS dan LBS, Perlombaan PKK KB-KES, Perlombaan Jambore Posyandu Jumlah Laporan Evaluasi Kelurahan (Lomba Kelurahan dan Lomba-lomba Tk. Kecamatan) Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan "Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan" Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan" jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kegiatan Gotong Royong dan PKK Kelurahan) Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan di Kecamatan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan Persentase Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kelurahan Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan Masyarakat Terlaksananya Pembinaan lomba kelurahan dan perlombaan Kecamatan Terwujudnya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	1 Laporan 2 Laporan 4 Laporan 9 Kegiatan 5 Laporan 10 Laporan 1 Laporan 10 Unit 1 Lembaga 1 Lembaga 4 Unit 4 Unit 6 Unit 10 Pokja / Pokmas 10 Pokmas / pokja 24 Pokmas 12 Unit 10 Unit 2023 % 2023 % 90 % 90 % 95 % 95 % 95 % 7 Kegiatan 82 %	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kelurahan Saigon Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Musrenbang Kelurahan) Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kelurahan Dalam Bugis Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kelurahan Parit Mayor Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kelurahan Tambelan Sampit Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kelurahan Tanjung Hilir Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kelurahan Tanjung Hulu Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang (Kelurahan Banjar Serasan) Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan Terlaksananya kegiatan musrenbang kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM dan berkoordinasi dengan kelurahan Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM dan berkoordinasi dengan kelurahan terlaksananya pembinaan lomba kelurahan dan perlombaab kecamatan	1 Laporan 0 Lembaga Kemasyarakatan 5 Ormas/Pokmas 5 Pokmas / Ormas 8 Lembaga Kemasyarakatan 12 Lembaga 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 7 Kegiatan	
					7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit 3 Unit 4 Paket 10 Unit		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	
						7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 Laporan	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7 Laporan	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	10 Laporan	
							Lomba Saprahan Kelurahan	5 kegiatan	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase koordinasi gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90 %	7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergis dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Terlaksananya kegiatan Trantibum, Covid 19, Pembinaan PKL dan Pembinaan Rumah Kost)	12 Laporan	7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0 Laporan
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	95 %		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	
		Persentase Koordinasi gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	95 %		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	
		Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90 %		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	
		Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	95 %		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Terlaksananya Kegiatan Trantibum di Kelurahan, Covid 19, Pembinaan PKL, dan Pembinaan Rumah Kost)	12 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	15 Laporan	
		Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	90 %		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20 Laporan	
		Persentase koordinasi gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	95 %		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20 Laporan	
		Persentase Koordinasi Gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	95 %		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20 Laporan	
		Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90 %		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Terlaksananya kegiatan Trantibum di Kelurahan, Covid 19, Pembinaan PKL dan Pembinaan Rumah Kost)	12 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20 Laporan	
		Persentase koordinasi gangguan trantibum yang dapat selesaiakan	95 %		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20 Laporan	
					Jumlah Pelaksanaan Koordinasi / Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indoensai	12 Laporan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan dan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	
					Jumlah Pelaksanaan Koordinasi / Sinergi Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya Dibidang Penegakan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi / Sinergi Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya Dibidang Penegakan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	
					Jumlah Pelaksanaan Koordinasi / Sinergi Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya Dibidang Penegakan dan Peraturan Perundang-Undangan	15 Laporan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi / Sinergi Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya Dibidang Penegakan dan Peraturan Perundang-Undangan	15 Laporan	
					Meningkatnya Realisasi Anggaran Dalam Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	2023 %			

No	Program		Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		
	Program	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja		
		Hasil Program		Target Capaian	Keluaran Kegiatan		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
				Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90 %				
				Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	95 %				
				Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan	90 %				
				Presentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	2023 %				
				Terlaksananya koordinasi gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	95 %				
				Terlaksananya Koordinasi gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	95 %				
				Terlaksananya Koordinasi Gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	95 %				
				Terlaksananya Koordinasi gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	95 %				
				Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban terhadap layanan masyarakat	20 Kegiatan				
				Terwujudnya Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum Yang Diselesaikan	85 %				

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	90 %	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Hari Besar Keagamaan	2 Kegiatan	7.01.05.2.01.03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1 Kegiatan	
	persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90 %		Jumlah Kegiatan HUT RI	1 Kegiatan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0 Orang	
	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95 %		Jumlah Kegiatan MTQ / STQ	1 Kegiatan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang	
	Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	90 %		Jumlah Kegiatan Saprahan	1 Kegiatan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	200 Orang	
	Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 orang		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	300 Orang	
	Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200 orang		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	554 Orang	
	Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	95 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 Laporan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Terlaksananya Hari Jadi Kota Pontianak/Lomba-lomba)	1 Laporan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 Laporan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
	Presentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	90 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Terlaksananya Kegiatan Hari Jadi Kota Pontianak/Lomba-lomba)	4 Laporan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95 %		"Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa"	300 orang		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Terlaksananya Kegiatan HUT RI di Kecamatan)	1 Laporan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95 %		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terhadap pelayanan masyarakat	90 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95 %		Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terhadap Pelayanan Masyarakat	2023 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95 %		Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	90 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95 %		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95 %		Persentase koordinasi penyelenggraan urusan pemerintahan umum	90 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95 %		Terlaksananya koordinasi penyelengagraan pemerintahan umum	95 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95 %		Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	95 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
	Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95 %		Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95 %		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
Presentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95 %	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
					7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 3 Kegiatan Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 4 Kegiatan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 0 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 10 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 55 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 60 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 65 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 66 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 80 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 86 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 194 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 200 Orang		
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase tingkat kepuasan bidang atau bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	90 %	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase Capaian kinerja opd	87 %	8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen
							8.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji ASN dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan
							8.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
				8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dan pakaian lapangan bagi Non ASN	32 stel	8.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	32 Unit
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi, keuangan serta akuntabilitas kinerja	97 %	8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
							8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
							8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
							8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
							8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen
							8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase Capaian kinerja opd	87 %	8.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
					persentase Capaian kinerja opd	87 %	8.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan
							8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Oprasional Roda dua	90 %	8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit
							8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit
							8.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
	8.01.02 PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Wawasan kebangsaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	100 %	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kegiatan	100 %	8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	700 Orang
	8.01.03 PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Jumlah Pemahaman tentang Pendidikan Politik	80 %	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kegiatan	6 Kegiatan	8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	36 Orang

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian
							8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Orang
							8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Jumlah organisasi Masyarakat di Kota Pontianak	80 %	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	tersedianya Jumlah Organisasi Masyarakat	87 %	8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60 Orang
							8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Jumlah Pembentukan Kelompok Keagamaan serta Pembentukan Kader P4GN	80 %	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	persentase Capaian kinerja opd	87 %	8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500 Orang
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Jumlah Konflik yang dapat ditangani	100 %	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	persentase Capaian kinerja opd	87 %	8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	220 Orang
							8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	401.159.983.291	
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	401.159.983.291	
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	401.159.983.291	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	234.693.633.587	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	192.371.100	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.744.800	
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	44.850.000	
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	45.329.200	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	61.733.500	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.713.600	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	230.294.233.589	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	227.355.877.589	
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.938.356.000	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	222.222.800	
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	62.983.000	
1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000	
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	99.239.800	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.951.335.370	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	745.899.070	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	219.680.300	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	725.043.000	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.420.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.481.000	
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	116.812.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.886.269.128	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.175.000	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	357.060.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.524.034.128	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.201.600	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.140.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.061.600	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	165.795.942.004	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	94.649.369.195	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	3.119.831.400	
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	230.778.600	
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	221.515.300	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.324.958.400	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20.304.104.356	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	235.969.300	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	508.183.800	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	303.369.300	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	998.201.800	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	479.979.600	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.901.527.200	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	492.906.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	972.712.300	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	58.314.553.239	
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	240.778.600	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	56.308.915.313	
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	10.428.698.100	
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	981.206.600	
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	509.846.600	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.151.374.400	
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	107.565.800	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.885.267.758	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	2.011.757.400	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	224.251.500	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	258.042.800	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	150.810.400	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	559.910.300	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	467.069.050	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.439.190.500	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	220.849.400	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	606.335.900	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	32.181.258.005	
1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	125.480.800	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10.620.764.815	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.345.384.400	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	216.776.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	98.287.230	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	566.450.685	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	232.778.800	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.997.407.100	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	6.163.680.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.216.892.681	
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	729.592.000	
1.01.02.2.04.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	74.057.000	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	49.999.900	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	580.878.736	
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	268.430.900	
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	94.389.100	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	474.375.045	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.945.170.000	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	171.315.000	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	171.315.000	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	42.930.700	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	128.384.300	
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	499.092.700	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	499.092.700	
1.01.06.2.01.02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	330.554.950	
1.01.06.2.01.03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	53.170.700	
1.01.06.2.01.06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	68.443.150	
1.01.06.2.01.07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	46.923.900	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	322.286.750.559	
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	322.286.750.559	
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	177.658.693.901	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	133.226.951.911	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.106.017	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.048.517	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.057.500	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	126.622.562.807	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	124.635.548.507	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.678.915.000	
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	308.099.300	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	129.750.000	
1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	129.750.000	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.290.000	
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	74.290.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	594.208.792	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.422.078	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	269.216.096	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.266.943	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.710.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.993.675	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.600.000	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	570.973.235	
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	570.973.235	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.497.162.600	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	383.000.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.114.162.600	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.653.898.460	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	534.350.000	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.460.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.054.088.460	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	43.033.825.622	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	19.432.121.160	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	5.522.613.500	
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	658.956.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.869.349.405	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	4.219.522.609	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.127.896.946	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	33.782.700	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.701.923.836	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	472.519.222	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	162.500.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	215.640.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	197.800.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	45.471.520	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	874.283.044	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	75.271.520	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	64.189.200	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	14.516.200	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	11.512.594	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	595.072.500	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	345.779.800	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	714.169.750	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	861.864.800	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	170.651.884	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	33.813.600	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	32.563.512	
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1.578.648.090	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.309.020.100	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	14.631.513.200	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	295.123.300	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	275.000.000	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	62.731.000	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	212.269.000	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	624.780.626	
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	40.503.900	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	584.276.726	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	65.270.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	31.400.000	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	31.400.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.870.000	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.870.000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	578.842.610	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	96.040.850	
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	96.040.850	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	213.516.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	213.516.600	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	156.854.160	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	156.854.160	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	112.431.000	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	112.431.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	753.803.758	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	753.803.758	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	753.803.758	
1.02.0.00.0.00.01.0001	Puskesmas Gg.Sehat	2.847.146.024	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.847.146.024	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.847.146.024	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.847.146.024	
1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Purnama	1.543.327.722	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.543.327.722	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.543.327.722	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.543.327.722	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Kp. Bangka	1.521.316.185	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.521.316.185	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.521.316.185	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.521.316.185	
1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Paris 2	1.197.777.827	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.197.777.827	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.197.777.827	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.197.777.827	
1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas St.Hilir	3.158.205.657	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.158.205.657	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.158.205.657	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.158.205.657	
1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas St.Hulu	1.863.953.851	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.863.953.851	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.863.953.851	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.863.953.851	
1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas St. Tengah	1.709.448.581	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.709.448.581	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.709.448.581	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.709.448.581	
1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Khatulistiwa	1.682.112.759	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.682.112.759	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.682.112.759	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.682.112.759	
1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Telaga Biru	1.370.934.433	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.370.934.433	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.370.934.433	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.370.934.433	
1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Saigon	1.599.977.905	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.599.977.905	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.599.977.905	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.599.977.905	
1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Kp.Dalam	2.643.373.277	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.643.373.277	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.643.373.277	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.643.373.277	
1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Tambelan Sampit	858.384.702	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	858.384.702	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	858.384.702	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	858.384.702	
1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Tj.Hulu	1.472.442.221	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.472.442.221	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.472.442.221	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.472.442.221	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Banjar Serasan	987.897.329	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	987.897.329	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	987.897.329	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	987.897.329	
1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Parit Mayor	1.056.541.059	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.056.541.059	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.056.541.059	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.056.541.059	
1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Perum I	2.141.797.796	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.141.797.796	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.141.797.796	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.141.797.796	
1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Perum II	2.225.558.550	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.225.558.550	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.225.558.550	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.225.558.550	
1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Komyos Sudarso	1.772.454.744	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.772.454.744	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.772.454.744	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.772.454.744	
1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Pal Lima	1.201.808.218	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.201.808.218	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.201.808.218	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.201.808.218	
1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Kp.Bali	1.770.994.601	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.770.994.601	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.770.994.601	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.770.994.601	
1.02.0.00.0.00.01.0021	Puskesmas Alianyang	2.900.809.176	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.900.809.176	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.900.809.176	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.900.809.176	
1.02.0.00.0.00.01.0022	Puskesmas Pal 3	1.671.988.186	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.671.988.186	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.671.988.186	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.671.988.186	
1.02.0.00.0.00.01.0023	Puskesmas Karya Mulya	1.461.845.946	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.461.845.946	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.461.845.946	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.461.845.946	
1.02.0.00.0.00.01.0024	BKMM	2.882.260.236	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.882.260.236	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.882.260.236	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.882.260.236	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.0.00.0.00.01.0025	Labkes	942.440.692	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	942.440.692	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	942.440.692	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	942.440.692	
1.02.0.00.0.00.01.0026	RSUD Sultan Syarif Mohamad AlKadrie	89.525.525.174	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.431.083.160	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.431.083.160	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.431.083.160	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	84.094.442.014	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	16.223.916.840	
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	9.211.796.840	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.012.120.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	67.870.525.174	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	67.870.525.174	
1.02.0.00.0.00.01.0027	RSUD Pontianak Utara	10.617.733.807	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.126.355.623	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.081.500.000	
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.081.500.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	924.685.654	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.100.000	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	399.340.654	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	498.245.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.843.018.680	
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	505.600.000	
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.337.418.680	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.551.692.865	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	604.692.865	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	947.000.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	725.458.424	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	725.458.424	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.491.378.184	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.491.378.184	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.841.743.359	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	900.000.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	749.634.825	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	305.102.051.713	
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	305.102.051.713	
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	305.102.051.713	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.977.583.204	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207.826.600	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	108.327.100	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.999.750	
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.999.750	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.500.000	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.998.661.489	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.110.386.489	
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	851.040.000	
1.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	37.235.000	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	432.540.000	
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	199.840.000	
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	192.000.000	
1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40.700.000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.241.317.890	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.196.250	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	392.828.200	
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.943.540	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.000.000	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	156.474.900	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.800.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	261.295.000	
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	269.780.000	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	725.212.690	
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	110.830.400	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	476.878.400	
1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	137.503.890	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.864.531.561	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	87.300.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	318.098.402	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.459.133.159	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.507.492.974	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.019.305.074	
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	953.680.000	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	334.507.900	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	20.399.472.300	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.399.472.300	
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	4.533.742.600	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	15.599.729.700	
1.03.02.2.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	266.000.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.925.269.600	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.925.269.600	
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2.887.613.129	
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	461.936.126	
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3.575.720.345	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.549.308.918	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	2.549.308.918	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	258.970.985	
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2.104.660.259	
1.03.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	185.677.674	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.699.691.692	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.699.691.692	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2.468.626.392	
1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	231.065.300	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	29.068.058.507	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.068.058.507	
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	692.860.000	
1.03.06.2.01.03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	522.138.500	
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	9.763.103.937	
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	1.763.499.500	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	16.326.456.570	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	3.747.182.711	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.747.182.711	
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.747.182.711	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	48.587.784.797	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	48.587.784.797	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	793.934.800	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	35.633.340.000	
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	317.269.997	
1.03.08.2.01.06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	3.113.810.000	
1.03.08.2.01.09	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	375.050.000	
1.03.08.2.01.11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	77.050.000	
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8.277.330.000	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	22.758.073.493	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	22.758.073.493	
1.03.09.2.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	306.012.000	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	10.225.322.684	
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	12.226.738.809	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	145.204.451.391	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	145.204.451.391	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.618.789.450	
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	1.000.000.000	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	332.907.880	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	104.701.339.300	
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	1.226.427.880	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	3.440.719.450	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	426.639.900	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	6.657.681.750	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	13.000.000.000	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	7.969.091.821	
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	34.439.950	
1.03.10.2.01.17	Pelebaran Jembatan	65.979.700	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	595.924.860	
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	3.134.509.450	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	569.652.600	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	569.652.600	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	155.356.400	
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	144.757.900	
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	269.538.300	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.615.522.500	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	169.773.500	
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	19.622.000	
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	150.151.500	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	674.681.400	
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	578.647.500	
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	96.033.900	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	397.212.000	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	254.335.000	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	142.877.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	373.855.600	
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	14.460.000	
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	134.014.600	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	225.381.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	179.432.877.659	
1.04.2.10.0.00.02.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	179.432.877.659	
1.04.2.10.0.00.02.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	179.432.877.659	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.669.493.289	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.075.000	
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.400.000	
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.075.000	
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.600.000	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.560.668.659	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.893.428.659	
1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	657.360.000	
1.04.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.880.000	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91.790.000	
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	61.790.000	
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	354.715.150	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.971.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.598.950	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.680.000	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.580.000	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.885.000	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	208.513.100	
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	208.513.100	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.006.222.600	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	772.251.600	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	229.171.000	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410.508.780	
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.930.000	
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.330.000	
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	281.248.780	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.218.538.600	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	499.180.200	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	299.180.200	
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	200.000.000	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.589.358.400	
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.589.358.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	130.000.000	
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	130.000.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.489.055.570	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	219.118.000	
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	99.028.000	
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	96.240.000	
1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	23.850.000	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5.269.937.570	
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	212.324.000	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	884.341.300	
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1.120.079.500	
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	113.750.000	
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	2.939.442.770	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.318.974.000	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.318.974.000	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.318.974.000	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	161.736.816.200	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	161.736.816.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	190.850.000	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	161.491.466.200	
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	54.500.000	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	23.561.089.277	
1.05.0.00.0.00.03.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	17.563.845.504	
1.05.0.00.0.00.03.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	17.563.845.504	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.594.128.352	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.525.829.585	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.525.829.585	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	435.400.000	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	335.400.000	
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	471.430.020	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.076.000	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	338.267.000	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.159.020	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.528.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.654.691.747	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.680.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.605.011.747	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506.777.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	472.947.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.830.000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.646.567.424	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.219.487.424	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	400.510.000	
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	332.020.000	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	87.697.424	
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	399.260.000	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	420.550.000	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	15.980.000	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	18.950.000	
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	385.620.000	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	6.530.000	
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	6.530.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	323.149.728	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	124.549.920	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	25.480.000	
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	99.069.920	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	198.599.808	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	198.599.808	
1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.997.243.773	
1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.997.243.773	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.097.544.473	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.698.500	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.575.000	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.459.500	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.664.000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.249.321.774	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.099.743.774	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	145.800.000	
1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.778.000	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.646.608	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13.090.000	
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	21.556.608	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	443.393.075	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.679.125	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.852.650	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.250.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.972.300	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224.989.000	
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	71.650.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.983.316	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.354.916	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.628.400	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.501.200	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.460.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.840.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.201.200	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	899.699.300	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	220.440.100	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	210.181.300	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	10.258.800	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	132.581.200	
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	2.750.000	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	19.262.800	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	50.180.000	
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	21.500.000	
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	12.462.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	7.862.800	
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	18.562.800	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	544.148.000	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	240.496.000	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	171.946.000	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	129.236.000	
1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2.470.000	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	2.530.000	
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	2.530.000	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	13.404.657.540	
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	13.404.657.540	
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	13.404.657.540	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.742.394.640	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.569.400	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.645.000	
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.900.000	
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.150.000	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.480.000	
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.394.400	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.971.477.640	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.681.157.640	
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	275.400.000	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.920.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.145.000	
1.06.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.145.000	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.620.000	
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	42.620.000	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	445.495.550	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.839.950	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.011.500	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85.886.100	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.248.000	
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	52.010.000	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	468.812.532	
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	468.812.532	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.298.144.278	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	265.045.078	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.021.099.200	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	470.130.240	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.120.000	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111.010.000	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.240	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.312.907.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.312.907.500	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	552.065.700	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	311.500.800	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	331.037.000	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	118.304.000	
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	2.480.000	
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	2.480.000	
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	2.480.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	959.053.400	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	799.998.200	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	422.980.000	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	120.960.200	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	58.710.000	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4.980.000	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	20.412.800	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	49.475.200	
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	4.980.000	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	14.980.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	61.580.000	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	31.980.000	
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.980.000	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	4.980.000	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	159.055.200	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	38.075.200	
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	120.980.000	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.001.211.400	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.001.211.400	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	34.980.000	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	177.255.000	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.788.976.400	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	386.610.600	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	358.380.000	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	142.090.000	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	159.225.000	
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	20.000.000	
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	31.135.000	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	5.930.000	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	28.230.600	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	28.230.600	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.443.896.428	
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA	4.443.896.428	
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA	4.443.896.428	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.993.545.128	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.384.526.329	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.125.547.929	
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	258.978.400	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.488.087	
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.422.350	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.792.600	
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.460.852	
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.310.000	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.502.285	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	423.666.360	
2.07.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	423.666.360	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.864.352	
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.596.000	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.268.352	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	236.331.300	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	236.331.300	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	236.331.300	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	214.020.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	214.020.000	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.100.000	
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	202.920.000	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.476.117.112	
2.08.2.13.2.14.06.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.476.117.112	
2.08.2.13.2.14.06.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.476.117.112	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.277.636.562	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.737.000	
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.302.000	
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.230.000	
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.205.000	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.208.488.795	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.872.018.112	
2.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	309.046.683	
2.08.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	27.424.000	
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.692.000	
2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.692.000	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	242.402.796	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.693.829	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.793.700	
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.028.700	
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.500.000	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.566.567	
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.700.000	
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.500.000	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.620.000	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	438.940.600	
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.522.200	
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	407.418.400	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.375.371	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.765.371	
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.610.000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	46.812.800	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	46.812.800	
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	33.362.800	
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	13.450.000	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	253.874.750	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	109.700.000	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	109.700.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	144.174.750	
2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	144.174.750	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	68.693.000	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	68.693.000	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	68.693.000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	829.100.000	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	754.504.000	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	254.504.000	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.596.000	
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.596.000	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	11.072.749.897	
2.09.3.25.3.27.03.0000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	11.072.749.897	
2.09.3.25.3.27.03.0000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	11.072.749.897	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.613.311.917	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.257.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.150.000	
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.107.000	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.261.985.352	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.251.905.352	
2.09.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.080.000	
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	170.815.000	
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	106.960.000	
2.09.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.855.000	
2.09.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48.000.000	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	247.610.345	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.568.895	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.768.000	
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.554.450	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.870.000	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.606.000	
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.940.000	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.103.000	
2.09.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21.200.000	
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	392.238.925	
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.729.800	
2.09.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	369.509.125	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.138.998.219	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.568.000	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	416.520.000	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	713.910.219	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	338.407.076	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	230.860.000	
2.09.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.800.000	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.920.000	
2.09.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	51.360.000	
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.467.076	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	416.937.980	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	126.496.700	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	47.307.900	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	79.188.800	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	290.441.280	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	290.441.280	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	42.500.000	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	42.500.000	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	42.500.000	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	17.629.251.000	
1.04.2.10.0.00.02.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17.629.251.000	
1.04.2.10.0.00.02.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17.629.251.000	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	90.451.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	90.451.000	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	90.451.000	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	17.538.800.000	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.538.800.000	
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.538.800.000	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	56.483.226.173	
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	56.483.226.173	
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	56.483.226.173	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.350.699.625	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	206.969.400	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.199.600	
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	33.055.200	
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35.128.500	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.715.500	
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.870.600	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.201.462.478	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.557.604.478	
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	609.720.000	
2.11.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.617.400	
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.313.700	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.384.500	
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16.031.600	
2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.790.800	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.320.000	
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	56.320.000	
2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	671.380.250	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.386.000	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.406.750	
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.128.725	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.505.000	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	151.988.200	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.940.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.397.000	
2.11.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	142.628.575	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.771.231.897	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.704.800	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	354.563.597	
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.098.300	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.337.865.200	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	437.335.600	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138.410.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.284.400	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	161.491.200	
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.150.000	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	381.020.000	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	73.275.000	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	11.000.000	
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	62.275.000	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	307.745.000	
2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	307.745.000	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	888.184.855	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	650.088.000	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	300.000.000	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	50.000.000	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	300.088.000	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	173.203.780	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	33.203.940	
2.11.03.2.02.02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	99.999.900	
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	39.999.940	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	64.893.075	
2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	29.999.600	
2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	34.893.475	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	62.672.500	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	62.672.500	
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	62.672.500	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	127.587.000	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	103.601.000	
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	43.524.000	
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	60.077.000	
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.986.000	
2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	17.940.000	
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	6.046.000	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	224.499.300	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	224.499.300	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	34.719.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	22.071.500	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	68.788.800	
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	98.920.000	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.264.684.150	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.264.684.150	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	106.614.150	
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	2.058.070.100	
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	99.999.900	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	280.589.800	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	280.589.800	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	280.589.800	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	48.023.500	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	48.023.500	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	38.023.500	
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	10.000.000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	37.855.265.443	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	37.855.265.443	
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	176.044.000	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2.255.397.346	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	27.273.266.197	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	176.776.200	
2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	187.267.800	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.786.513.900	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.680.227.468	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.680.227.468	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.680.227.468	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.212.641.248	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.722.900	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.201.900	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.653.000	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.108.000	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.760.000	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.093.668.668	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.861.975.668	
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	228.240.000	
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.453.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.995.000	
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35.500.000	
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.495.000	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.227.826.980	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.873.875	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.091.076.500	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.880.000	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.000.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.996.605	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	252.266.100	
2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	252.266.100	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.444.341.600	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.900.000	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.400.000	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.387.041.600	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.820.000	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.650.000	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.170.000	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	88.459.200	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	51.104.200	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	12.935.000	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	2.985.000	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	35.184.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	37.355.000	
2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	37.355.000	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	130.042.400	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	28.788.900	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12.203.900	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	16.585.000	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	72.219.000	
2.12.03.2.02.03	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	34.864.000	
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	37.355.000	
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	29.034.500	
2.12.03.2.03.03	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	29.034.500	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	232.140.020	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	89.723.080	
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	89.723.080	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	142.416.940	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	87.984.940	
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	54.432.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	16.944.600	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	16.944.600	
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2.136.600	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	14.808.000	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.409.491.000	
2.08.2.13.2.14.06.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.409.491.000	
2.08.2.13.2.14.06.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.409.491.000	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.409.491.000	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.409.491.000	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	209.491.000	
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.200.000.000	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.139.015.000	
2.08.2.13.2.14.06.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.139.015.000	
2.08.2.13.2.14.06.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.139.015.000	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	105.180.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	4.980.000	
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	4.980.000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100.200.000	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	100.200.000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.096.375.000	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	821.100.000	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	75.400.000	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	198.000.000	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	317.700.000	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.000.275.000	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	43.200.000	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	330.714.000	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.555.261.000	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	71.100.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	275.000.000	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	275.000.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	937.460.000	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	937.460.000	
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	364.160.000	
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	573.300.000	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	41.692.509.201	
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	41.692.509.201	
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	41.692.509.201	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.664.600.972	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.623.075	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.599.775	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.773.300	
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.250.000	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.431.342.901	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.975.709.201	
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	445.680.000	
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.953.700	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.970.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	96.970.000	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	809.410.184	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.426.312	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	139.708.900	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	317.588.072	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	256.719.900	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.967.000	
2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36.000.000	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	647.384.661	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	498.567.061	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.817.600	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	663.870.151	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.750.000	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	485.420.000	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.280.000	
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.420.151	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	28.927.508.229	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	25.433.037.529	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.625.377.600	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	23.807.659.929	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.376.780.000	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.376.780.000	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	513.979.500	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	184.509.221	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	257.113.179	
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	72.357.100	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	944.493.600	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	886.283.600	
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	58.210.000	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	659.217.600	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	597.420.400	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	61.797.200	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.100.400.000	
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	1.100.400.000	
2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	200.000.000	
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	577.360.000	
2.15.03.2.13.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	323.040.000	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.917.703.839	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.917.703.839	
2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.917.703.839	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.890.272.882	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.044.800	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.926.800	
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.728.000	
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.304.000	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.644.600	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.441.400	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.168.122.326	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.900.211.326	
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.600.000	
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	244.560.000	
2.16.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.170.000	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	850.000	
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.731.000	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.440.000	
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50.440.000	
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.000.000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.464.264	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.864.764	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144.690.400	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.377.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.880.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.652.000	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.788.312	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.788.312	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.459.680	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.980.000	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.949.600	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	245.530.080	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.953.500	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.783.500	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.170.000	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	538.943.720	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	538.943.720	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	43.120.000	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	257.973.220	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	20.281.800	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	96.155.600	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	50.015.000	
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	50.971.800	
2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	20.426.300	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.488.487.237	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	119.659.548	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	108.496.458	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	11.163.090	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.368.827.689	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.853.005.529	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	60.000.000	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	66.500.000	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	307.431.160	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	46.261.000	
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	35.630.000	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	11.305.126.499	
2.17.3.30.3.31.07.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	11.305.126.499	
2.17.3.30.3.31.07.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	11.305.126.499	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.392.785.105	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.650.100	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.200.100	
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450.000	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.670.728.550	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.325.448.550	
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	345.280.000	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.810.000	
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35.810.000	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.884.192	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.020.662	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.825.573	
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.558.957	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.600.000	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.599.000	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.280.000	
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.299.800	
2.17.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.299.800	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	416.912.463	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	339.974.063	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.938.400	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.500.000	
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.672.000	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.070.000	
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.758.000	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	19.958.000	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	19.958.000	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	4.586.700	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.371.300	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2.670.700	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.670.700	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.670.700	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	427.259.700	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	427.259.700	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	427.259.700	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	3.828.800	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.828.800	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	3.828.800	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	12.700.000	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	12.700.000	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	12.700.000	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.445.924.194	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.445.924.194	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.445.924.194	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	8.906.755.924	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.906.755.924	
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.906.755.924	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.321.373.524	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.019.200	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.269.200	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.375.000	
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.375.000	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.785.454.724	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.057.755.924	
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	719.548.800	
2.18.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8.150.000	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.780.000	
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	29.780.000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.640.525	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.386.887	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.860.300	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.443.438	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.049.900	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.460.000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.440.000	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.658.652.160	
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	405.981.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.252.670.760	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	407.159.925	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.740.000	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	297.423.925	
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.996.000	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.666.990	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.750.000	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.860.000	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.056.990	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	123.156.900	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	66.436.900	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	66.436.900	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	56.720.000	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	56.720.000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	16.448.000	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	16.448.000	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	16.448.000	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	10.250.000	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	10.250.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6.500.000	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	3.750.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	378.350.400	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	378.350.400	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	23.398.000	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	282.472.400	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	72.480.000	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	57.177.100	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.177.100	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	57.177.100	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	15.590.067.319	
2.19.3.26.0.00.02.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	15.590.067.319	
2.19.3.26.0.00.02.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	15.590.067.319	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.320.933.800	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.837.000	
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.998.500	
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.800.000	
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.700.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.700.000	
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.913.500	
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.725.000	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.456.196.640	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.167.696.640	
2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	278.800.000	
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.700.000	
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.590.000	
2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	61.590.000	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	465.978.160	
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.626.010	
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.779.600	
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	139.530.550	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	107.921.000	
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.121.000	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.702.000	
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.996.000	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.360.000	
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.346.000	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.630.000	
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.590.000	
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.040.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.077.753.615	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	464.100.365	
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	52.356.000	
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	316.541.365	
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	36.725.000	
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	58.478.000	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	613.653.250	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	613.653.250	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	7.041.379.904	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	213.675.000	
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	107.075.000	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	106.600.000	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.135.445.000	
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	1.135.445.000	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.050.000.000	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2.050.000.000	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	3.642.259.904	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	270.573.000	
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	3.371.686.904	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	150.000.000	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	150.000.000	
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	150.000.000	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	399.990.500	
2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	399.990.500	
2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	399.990.500	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	399.990.500	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	399.990.500	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	50.335.000	
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	34.360.000	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	34.990.000	
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	44.975.000	
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	235.330.500	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	121.716.987	
2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	121.716.987	
2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	121.716.987	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	121.716.987	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	111.751.987	
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.980.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.995.000	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	88.326.987	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.450.000	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	9.965.000	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.965.000	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.077.276.200	
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.077.276.200	
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.077.276.200	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.667.865.800	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.039.979.400	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	673.559.500	
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	366.419.900	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.627.886.400	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	707.780.900	
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	920.105.500	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	196.633.800	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	196.633.800	
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	196.633.800	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	75.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	
2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	75.000.000	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	137.776.600	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	137.776.600	
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	137.776.600	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	7.810.049.302	
2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.810.049.302	
2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.810.049.302	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.264.180.302	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.535.000	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.345.000	
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.050.000	
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.140.000	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.152.787.302	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.977.377.302	
2.23.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	166.920.000	
2.23.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8.490.000	
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.210.000	
2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	31.210.000	
2.23.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.000.000	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	241.488.900	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.998.200	
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.724.900	
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.013.700	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.280.000	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.102.100	
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.040.000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.330.000	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.186.000	
2.23.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.186.000	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	573.265.750	
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.500.150	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	367.565.600	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.707.350	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.750.000	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.797.350	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.160.000	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	545.869.000	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	352.543.000	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	219.069.400	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.223.600	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	96.250.000	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	193.326.000	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	80.831.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	112.495.000	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	246.028.000	
2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	246.028.000	
2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	246.028.000	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	230.695.600	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	164.083.200	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	99.538.200	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	2.850.500	
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	61.694.500	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	62.472.400	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	62.472.400	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	4.140.000	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	4.140.000	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	15.332.400	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10.450.000	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	5.650.000	
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	4.800.000	
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	4.882.400	
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	4.882.400	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	887.284.400	
2.09.3.25.3.27.03.0000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	887.284.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.3.25.3.27.03.0000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	887.284.400	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	70.000.000	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	50.000.000	
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	50.000.000	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	20.000.000	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	817.284.400	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	817.284.400	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	817.284.400	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.661.601.320	
2.19.3.26.0.00.02.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	2.661.601.320	
2.19.3.26.0.00.02.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	2.661.601.320	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	849.401.600	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	601.231.900	
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	548.772.000	
3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	52.459.900	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	248.169.700	
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	248.169.700	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	965.939.920	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	965.939.920	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	965.939.920	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	846.259.800	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	807.940.800	
3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	50.005.400	
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	707.680.400	
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50.255.000	
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	38.319.000	
3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	38.319.000	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	7.447.609.587	
2.09.3.25.3.27.03.0000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	7.447.609.587	
2.09.3.25.3.27.03.0000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	7.447.609.587	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.433.777.684	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	298.072.960	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	298.072.960	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.119.043.024	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	630.099.600	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	488.943.424	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.468.000	
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	5.468.000	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.193.700	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	2.700.000	
3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	8.493.700	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.774.343.542	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.774.343.542	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	103.590.000	
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	1.004.919.510	
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	1.203.612.632	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.462.221.400	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.744.194.361	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	358.400.650	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	358.400.650	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	458.017.950	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	458.017.950	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	849.185.761	
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	27.000.000	
3.27.04.2.04.03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	822.185.761	
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	78.590.000	
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	78.590.000	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	495.294.000	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	495.294.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	398.000.000	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	97.294.000	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4.376.054.451	
2.17.3.30.3.31.07.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	4.376.054.451	
2.17.3.30.3.31.07.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	4.376.054.451	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	15.188.900	
3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	15.188.900	
3.30.02.2.05.01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	15.188.900	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.903.106.725	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.790.862.025	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.444.440.025	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.346.422.000	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	112.244.700	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	35.488.100	
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	76.756.600	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	94.364.900	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	6.129.900	
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6.129.900	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	88.235.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	65.914.800	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	22.320.200	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	353.393.926	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	353.393.926	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	353.393.926	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	10.000.000	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	10.000.000	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	153.737.600	
2.17.3.30.3.31.07.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	153.737.600	
2.17.3.30.3.31.07.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	153.737.600	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	147.393.900	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	147.393.900	
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	36.769.300	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	32.334.000	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	8.560.700	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	69.729.900	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	900.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	900.200	
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	900.200	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	5.443.500	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	5.443.500	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	5.443.500	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	56.685.331.986	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	56.685.331.986	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	56.685.331.986	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.199.212.781	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.301.400	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.385.800	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.000.000	
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	24.153.900	
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.761.700	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.061.381.792	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.463.381.987	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.577.336.705	
4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.663.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.176.500	
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	22.176.500	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	383.022.800	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	244.580.000	
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	29.482.100	
4.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	18.611.600	
4.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14.486.500	
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.000.000	
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	51.862.600	
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.318.727.023	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	187.625.000	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	224.578.800	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	685.100.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	293.620.350	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60.000.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.131.309.873	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	736.493.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	557.335.700	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	37.615.300	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	372.192.100	
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	147.528.300	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.157.959.700	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.800.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.598.228.000	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	724.034.500	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	821.897.200	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.720.781.050	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	423.160.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	389.890.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	303.830.050	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	720.737.000	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	883.164.000	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.000.806.733	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	180.000.000	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	42.960.000	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	777.846.733	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.144.319.850	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.699.888.350	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.444.431.500	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	1.553.081.525	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	668.526.050	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	500.951.600	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	127.024.450	
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	75.889.525	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	180.689.900	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.157.318.708	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	558.543.365	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	799.267.943	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	799.507.400	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.171.553.840	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.668.610.200	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	325.109.200	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	236.216.300	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.107.284.700	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	8.870.084.900	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.362.380.300	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	681.448.200	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.826.256.400	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.402.347.240	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	598.544.300	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	406.603.200	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	397.199.740	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	230.511.500	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	230.511.500	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.314.565.365	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.229.540.800	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	531.054.700	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	328.143.300	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	229.554.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	72.968.600	
4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	67.819.400	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.062.191.875	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	600.393.350	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	177.816.025	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	283.982.500	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.951.971.240	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	308.111.800	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	305.043.100	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.338.816.340	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	70.861.450	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	26.102.150	
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	22.305.400	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	22.453.900	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	59.151.297.307	
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	59.151.297.307	
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	59.151.297.307	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.159.745.807	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.624.800	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.072.400	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.021.600	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.530.800	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.392.535.967	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.879.923.667	
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.100.000	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	455.790.000	
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.722.300	
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37.152.000	
4.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	37.152.000	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	106.584.000	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	48.200.000	
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	58.384.000	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.563.763.034	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	73.075.240	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	243.318.900	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	121.768.100	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	945.381.044	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	181.358.750	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	76.000.000	
4.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	445.360.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	477.501.000	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	374.729.000	
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	117.115.500	
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	257.613.500	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.623.097.272	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	470.101.272	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	335.306.000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.817.690.000	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.018.271.356	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	193.750.000	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.970.000	
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	30.000.000	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	251.150.000	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	488.401.356	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	29.478.575.878	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	28.902.085.878	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	576.490.000	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	542.412.500	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	542.412.500	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	16.991.551.500	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	553.438.300	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2.385.900	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	204.499.100	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	81.960.000	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	260.631.000	
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	3.962.300	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	230.000.000	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	3.925.000	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	3.925.000	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	214.100.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	4.025.000	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4.025.000	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	51.819.700	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	9.770.000	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	9.770.000	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	9.770.000	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	9.770.000	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	3.365.000	
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	9.374.700	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.553.280.000	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	3.597.910.000	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	649.300.000	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	294.300.000	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	11.770.000	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	6.262.423.000	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	3.320.000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	6.259.103.000	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	14.073.200	
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	3.763.100	
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	10.310.100	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	5.326.517.300	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.050.461.000	
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	142.665.000	
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	173.477.300	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	959.914.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01	PERENCANAAN	10.543.365.843	
5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.543.365.843	
5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.543.365.843	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.393.138.063	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.809.275	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.019.700	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.888.425	
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.055.425	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.339.900	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.505.825	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.180.422.343	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.727.932.568	
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	425.971.300	
5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.639.475	
5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8.400.000	
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.479.000	
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.008.600	
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.008.600	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	135.169.300	
5.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5.500.000	
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	53.720.000	
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.393.300	
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	66.556.000	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	747.122.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.596.000	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.746.300	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	252.958.600	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.565.700	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.078.000	
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.000.000	
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	183.178.000	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	461.513.700	
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	461.513.700	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274.172.245	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.240.000	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.873.845	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.058.400	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	513.920.000	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.660.000	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.460.000	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	407.800.000	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.309.146.500	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	825.004.200	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	112.668.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	7.082.900	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	151.298.800	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	198.187.400	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	101.411.400	
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	7.083.400	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	247.271.400	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	136.862.400	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	60.181.300	
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	26.080.100	
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	50.601.000	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	312.356.600	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	182.618.000	
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	5.500.000	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	124.238.600	
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	34.923.300	
5.01.02.2.04.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	34.923.300	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	841.081.280	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	309.869.080	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28.847.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	43.093.000	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4.600.000	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	70.200.000	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28.847.400	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	17.817.600	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3.500.000	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	112.963.680	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	187.148.900	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16.673.700	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	11.000.000	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3.000.000	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	122.801.500	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16.673.700	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3.000.000	
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	8.000.000	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	344.063.300	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28.847.400	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	29.450.000	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6.500.000	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	16.512.000	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	180.553.700	
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	15.000.200	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6.500.000	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	60.700.000	
5.02	KEUANGAN	51.490.136.858	
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEUANGAN DAERAH	51.490.136.858	
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEUANGAN DAERAH	51.490.136.858	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.334.313.936	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.582.500	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.012.500	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.255.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.255.000	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.786.000	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.274.000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.324.885.351	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.349.165.351	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	971.790.000	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.930.000	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	223.346.000	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	134.230.000	
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.360.000	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	73.756.000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.034.975.425	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.432.900	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	475.257.275	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.921.050	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.165.000	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	262.139.200	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.895.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.165.000	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	216.893.850	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	13.068.100	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	203.825.750	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.754.642.510	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.204.555.804	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.535.086.706	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	756.988.300	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.750.000	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	245.071.200	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	284.264.100	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	188.903.000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	11.093.343.425	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.795.399.625	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	1.211.698.000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.211.698.000	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	589.068.000	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	126.420.000	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	171.351.000	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	472.470.000	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	681.300.025	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.025.755.900	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	249.896.500	
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	6.299.500	
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	15.602.000	
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5.198.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	28.642.700	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	661.471.500	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	40.910.000	
5.02.02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.500.000	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	15.300.000	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	5.000.000	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	181.279.000	
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	20.009.500	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	64.960.000	
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	70.000.000	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	77.760.000	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	91.847.000	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	86.906.000	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	647.340.300	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	8.077.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	44.016.500	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	7.772.500	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	159.839.800	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	162.438.500	
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1.050.000	
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5.750.000	
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1.382.500	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	48.707.700	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	13.331.500	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	70.498.000	
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	84.275.800	
5.02.02.2.03.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	40.200.000	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.236.774.000	
5.02.02.2.04.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	8.693.500	
5.02.02.2.04.03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	8.693.500	
5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1.202.000.000	
5.02.02.2.04.05	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	8.693.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.04.06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	8.693.500	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.000.000.000	
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	752.358.000	
5.02.02.2.05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	29.311.500	
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	608.802.000	
5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	114.244.500	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.306.158.597	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.306.158.597	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	71.320.000	
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	5.746.000	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	42.963.000	
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	29.000.000	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	8.750.000	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.768.229.000	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	277.284.000	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	15.000.000	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	611.519.597	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	25.500.000	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	289.461.000	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	161.386.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	6.756.320.900	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.756.320.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	20.200.000	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	525.410.000	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	111.640.000	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	988.750.600	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	685.962.000	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.678.790.000	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	167.990.000	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	336.465.000	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	1.312.193.300	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	23.460.000	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	225.750.000	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	564.000.000	
5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	115.710.000	
5.03	KEPEGAWAIAN	13.095.046.846	
5.03.5.04.0.00.02.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13.095.046.846	
5.03.5.04.0.00.02.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13.095.046.846	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.922.113.761	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.985.300	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.120.300	
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.709.000	
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.840.000	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.170.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.146.000	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.495.213.110	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.198.983.110	
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	265.200.000	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.230.000	
5.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	14.000.000	
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.800.000	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77.880.000	
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	77.880.000	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	583.166.818	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.548.718	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	310.882.800	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	103.647.300	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.088.000	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	144.594.033	
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	144.594.033	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.614.000	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.000.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.900.000	
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.400.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.314.000	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.660.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.510.000	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.360.000	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84.790.500	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.172.933.085	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	565.651.000	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	17.050.000	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	400.176.000	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	47.873.000	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	94.702.000	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	5.850.000	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	579.944.000	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	144.083.000	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	101.239.000	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	334.622.000	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	2.157.384.085	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	861.790.600	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	208.301.985	
5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	75.371.000	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	262.505.000	
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	418.985.000	
5.03.02.2.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	86.878.000	
5.03.02.2.03.11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	3.445.500	
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	219.652.000	
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	4.675.000	
5.03.02.2.03.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	15.780.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	869.954.000	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	279.335.000	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	302.555.000	
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	17.950.000	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	184.039.000	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	86.075.000	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.503.936.264	
5.03.5.04.0.00.02.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.503.936.264	
5.03.5.04.0.00.02.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.503.936.264	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.503.936.264	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.503.936.264	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.443.665.764	
5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	60.270.500	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.358.066.500	
5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.358.066.500	
5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.358.066.500	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.358.066.500	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	271.130.000	
5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	271.130.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	270.685.000	
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	270.685.000	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	645.001.500	
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	207.395.000	
5.05.02.2.03.06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	437.606.500	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	171.250.000	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	131.400.000	
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	19.850.000	
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	20.000.000	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	10.256.773.718	
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	10.256.773.718	
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	10.256.773.718	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.896.929.718	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.102.000	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.995.000	
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.261.000	
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.039.000	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.467.000	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.340.000	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.060.103.718	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.058.023.718	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.080.000	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58.090.000	
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	58.090.000	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	272.730.600	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.534.200	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.568.300	
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.290.500	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.860.000	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.469.600	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.508.000	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.949.800	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.949.800	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340.353.600	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.226.000	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	295.827.600	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.600.000	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.510.000	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.350.000	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.740.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	428.498.000	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	300.998.000	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	113.450.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	14.950.000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	14.700.000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	17.300.000	
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	61.448.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	79.150.000	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	127.500.000	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	110.500.000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	17.000.000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	931.346.000	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	395.436.000	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	3.025.000	
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	392.411.000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	535.910.000	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10.190.000	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	313.650.000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	206.700.000	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5.370.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	71.024.585.117	
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	10.690.566.390	
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN PONTIANAK BARAT	9.538.957.490	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.911.156.690	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.028.700	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.744.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.960.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.200.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.124.800	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.900	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.571.976.790	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.040.216.390	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	525.320.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.442.400	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.998.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.000.000	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.690.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	61.690.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	146.067.900	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.005.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.093.600	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.924.300	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.145.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.900.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.009.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.009.200	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	960.184.100	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	232.055.300	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	728.128.800	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.200.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.240.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.960.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.109.324.900	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	57.974.900	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	57.974.900	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.051.350.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.051.350.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	148.140.700	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	76.499.100	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	76.499.100	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	71.641.600	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	71.641.600	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.000.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	25.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	345.335.200	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	345.335.200	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50.000.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	295.335.200	
7.01.0.00.0.00.01.0001	KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM	291.031.200	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.729.700	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.010.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.741.400	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.268.600	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.719.700	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.719.700	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	249.696.500	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	249.696.500	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.035.200	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	231.661.300	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.900.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8.900.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8.900.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.705.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.705.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	19.705.000	
7.01.0.00.0.00.01.0002	KELURAHAN SUNGAIJAWI LUAR	283.106.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.954.500	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.204.500	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.750.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.454.500	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.750.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.750.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	251.300.300	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	251.300.300	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.990.100	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	233.310.200	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.200.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.200.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.200.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.651.200	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.651.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	14.651.200	
7.01.0.00.0.00.01.0003	KELURAHAN SUNGAIBELIUNG	289.984.700	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.493.100	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.743.100	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.789.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.954.100	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.750.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.750.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	251.922.200	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	251.922.200	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.152.500	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	231.769.700	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.256.400	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.256.400	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.256.400	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.313.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.313.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	15.313.000	
7.01.0.00.0.00.01.0004	KELURAHAN PALLIMA	287.487.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.728.800	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.986.700	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.748.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.238.700	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.742.100	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.742.100	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	250.708.200	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	250.708.200	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.400	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	230.707.800	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.150.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.150.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.150.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.900.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.900.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	15.900.000	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	12.049.774.105	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN PONTIANAK KOTA	10.498.051.734	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.835.544.204	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.645.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.650.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.000.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.995.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.371.984.105	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.822.424.105	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	541.560.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.000.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	995.000	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	995.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.010.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	48.010.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.718.800	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.543.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.317.200	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.474.900	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.200.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.183.700	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.088.800	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.088.800	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.073.879.566	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	243.807.166	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	830.072.400	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.222.933	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.292.933	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.930.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.106.939.100	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	74.614.100	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	74.614.100	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.032.325.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.032.325.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	134.968.740	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	95.224.540	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	95.224.540	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	39.744.200	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	39.744.200	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	32.690.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	32.690.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	32.690.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	387.909.690	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	387.909.690	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	49.988.490	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	337.921.200	
7.01.0.00.0.00.02.0001	KELURAHAN SUNGAIBANGKONG	309.999.900	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.445.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.445.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.593.200	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.851.800	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	283.179.900	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	28.182.500	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	28.182.500	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	254.997.400	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	45.564.900	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	9.432.500	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.125.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12.125.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12.125.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.250.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.250.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	11.250.000	
7.01.0.00.0.00.02.0002	KELURAHAN SUNGAIJAWI	312.970.190	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.375.450	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.375.450	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.367.450	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.008.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	273.356.320	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	273.356.320	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	26.536.960	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	199.970.480	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	43.853.880	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	2.995.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.588.420	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24.588.420	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	24.588.420	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.650.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.650.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	8.650.000	
7.01.0.00.0.00.02.0003	KELURAHAN MARIANA	310.000.253	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.623.500	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.623.500	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.024.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.599.500	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	271.801.353	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	23.377.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23.377.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	248.424.353	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	199.998.403	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	46.925.950	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	1.500.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.532.400	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	17.532.400	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	17.532.400	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.043.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.043.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	11.043.000	
7.01.0.00.0.00.02.0004	KELURAHAN TENGAH	308.757.469	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.507.669	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.507.669	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.507.700	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.999.969	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	272.982.900	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	272.982.900	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25.449.100	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	199.987.800	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	46.046.000	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	1.500.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.198.900	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.198.900	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20.198.900	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.068.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.068.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	11.068.000	
7.01.0.00.0.00.02.0005	KELURAHAN DARATSEKIP	309.994.559	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.878.540	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.878.540	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.369.540	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.509.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	273.066.019	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	273.066.019	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	23.895.700	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	199.994.919	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	44.675.400	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	4.500.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.000.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.000.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.050.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.050.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10.050.000	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	11.732.557.603	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN	10.153.649.318	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.833.399.318	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.132.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.325.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.900.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.900.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.565.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.442.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.460.631.564	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.933.265.604	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	498.456.760	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	11.985.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.449.200	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.375.000	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.100.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.310.000	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.310.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85.055.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	83.070.000	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.985.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.214.252	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.880.800	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.801.200	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.999.572	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.395.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.999.680	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.138.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.958.300	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.958.300	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	937.928.202	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.818.730	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	756.109.472	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.170.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.700.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.970.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.500.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	810.883.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39.508.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	39.508.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	771.375.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	771.375.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	105.093.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	85.623.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	85.623.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	19.470.000	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	19.470.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.300.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	23.300.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	23.300.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	380.974.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	380.974.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	41.719.500	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	339.254.500	
7.01.0.00.0.00.03.0001	KELURAHAN PARIT TOKAYA	299.041.200	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.978.600	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.978.600	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.276.600	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.950.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.752.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	270.650.600	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	270.650.600	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25.015.400	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	95.635.200	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.400.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.400.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.400.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.012.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.012.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	12.012.000	
7.01.0.00.0.00.03.0002	KELURAHAN AKCAYA	319.983.530	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.397.850	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.397.850	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.836.250	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.561.600	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	276.094.280	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	276.094.280	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	26.641.680	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	99.452.600	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.490.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13.490.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	13.490.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.001.400	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.001.400	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	12.001.400	
7.01.0.00.0.00.03.0003	KELURAHAN KOTABARU	319.840.450	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.997.150	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.997.150	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.975.850	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.021.300	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	277.898.500	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	277.898.500	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	23.625.200	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	104.273.300	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.495.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13.495.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	13.495.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.449.800	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.449.800	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	14.449.800	
7.01.0.00.0.00.03.0004	KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT	320.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.036.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.036.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.308.500	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.745.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.982.500	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	279.189.500	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	279.189.500	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	24.144.500	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	105.045.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.950.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13.950.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	13.950.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.824.500	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.824.500	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10.824.500	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.03.0005	KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT	320.043.105	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.643.105	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.643.105	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.041.805	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.601.300	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	281.895.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	281.895.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	24.900.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	106.995.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.495.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.495.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.495.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.010.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.010.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	13.010.000	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	9.700.317.955	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	8.291.174.215	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.268.833.045	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.335.300	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.804.800	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.403.600	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.617.200	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.349.700	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.160.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.948.462.055	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.462.467.955	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	474.800.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.104.200	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.089.900	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.385.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	66.570.000	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	815.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.343.450	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.899.150	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.796.400	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.020.300	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.225.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.210.600	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.192.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.618.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.618.400	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	862.263.840	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	227.041.120	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	635.222.720	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.425.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.380.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.825.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.220.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	455.261.400	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	66.289.800	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	66.289.800	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	388.971.600	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	388.971.600	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	136.285.370	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	96.143.500	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	96.143.500	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	40.141.870	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	40.141.870	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	67.834.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	67.834.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	67.834.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	362.960.400	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	362.960.400	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	48.910.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	314.050.400	
7.01.0.00.0.00.04.0001	KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT	348.668.700	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.478.800	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.188.800	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.098.900	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.089.900	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.290.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.290.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	289.310.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	289.310.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	33.310.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	256.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.450.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12.450.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12.450.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	27.429.900	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	27.429.900	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	27.429.900	
7.01.0.00.0.00.04.0002	KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT	364.000.400	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.377.500	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.497.500	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.497.500	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.880.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.880.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	310.499.900	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	310.499.900	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	28.850.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	281.649.900	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.125.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	21.125.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	21.125.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.998.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.998.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	16.998.000	
7.01.0.00.0.00.04.0003	KELURAHAN BANSIR DARAT	344.848.300	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.537.200	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.697.200	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.322.200	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.375.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.840.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.840.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	280.950.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	280.950.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	23.800.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	257.150.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.875.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11.875.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	11.875.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	33.486.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	33.486.100	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	33.486.100	
7.01.0.00.0.00.04.0004	KELURAHAN BANSIR LAUT	351.626.340	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.976.340	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.446.340	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.476.500	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.969.840	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.530.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.530.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	303.650.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	303.650.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	24.650.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	279.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15.000.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	15.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	17.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	17.000.000	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	15.116.148.758	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR	12.041.695.358	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.555.225.412	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.270.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.380.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.890.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.721.218.758	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.047.248.758	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	669.080.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.890.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.540.000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	55.540.000	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.656.510	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.548.310	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.139.600	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.096.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.800.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.208.600	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.200.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.664.000	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	153.843.100	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153.843.100	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.234.111.844	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211.040.084	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.023.071.760	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.585.200	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101.665.200	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.740.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.180.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	828.090.400	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	62.551.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	62.551.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	765.539.400	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	765.539.400	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	170.740.246	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100.149.700	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.149.700	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	70.590.546	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	70.590.546	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	57.800.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	57.800.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	57.800.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	429.839.300	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	429.839.300	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	49.860.200	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	379.979.100	
7.01.0.00.0.00.05.0001	KELURAHAN SAIGON	446.084.400	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.524.600	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.794.600	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.995.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.799.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.730.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.730.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	600.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	600.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	600.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	402.960.200	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	402.960.200	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.985.400	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	34.974.800	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.999.600	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.999.600	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	29.999.600	
7.01.0.00.0.00.05.0002	KELURAHAN TANJUNG HULU	446.375.600	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.800.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.800.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.800.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	600.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	600.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	600.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	402.980.400	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	402.980.400	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	34.980.400	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.995.200	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.995.200	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	29.995.200	
7.01.0.00.0.00.05.0003	KELURAHAN TANJUNG HILIR	446.400.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.800.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.800.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.800.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	600.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	600.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	600.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	403.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	403.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.000.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30.000.000	
7.01.0.00.0.00.05.0004	KELURAHAN DALAM BUGIS	446.400.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.800.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.800.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.800.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	600.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	600.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	600.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	403.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	403.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.000.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30.000.000	
7.01.0.00.0.00.05.0005	KELURAHAN PARITMAYOR	446.394.300	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.795.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.795.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.995.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.800.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	600.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	600.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	600.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	402.999.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	402.999.400	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.999.700	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	34.999.700	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.999.900	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.999.900	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	29.999.900	
7.01.0.00.0.00.05.0006	KELURAHAN BANJAR SERASAN	446.399.700	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.820.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.820.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.820.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	600.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	600.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	600.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	402.989.700	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	402.989.700	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.999.700	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	34.990.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.990.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.990.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	29.990.000	
7.01.0.00.0.00.05.0007	KELURAHAN TAMBELANSAMPIT	396.399.400	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.800.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.800.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.800.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	600.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	600.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	600.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	352.999.400	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	352.999.400	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.999.700	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	300.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	34.999.700	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.000.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30.000.000	
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	11.735.220.306	
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN PONTIANAK UTARA	9.611.144.216	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.844.764.036	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.065.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.995.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.050.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.100.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.920.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.318.800.306	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.803.720.306	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	507.080.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.231.050	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.957.550	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.864.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.009.500	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.800.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.600.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.152.307.680	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.075.040	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	951.232.640	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.360.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.360.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.157.639.500	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	56.050.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	56.050.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.101.589.500	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.101.589.500	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	130.698.200	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	96.138.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	96.138.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	34.560.200	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	34.560.200	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	28.500.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	28.500.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	28.500.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	449.542.480	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	449.542.480	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	40.000.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	409.542.480	
7.01.0.00.0.00.06.0001	KELURAHAN SIANTAN HULU	536.161.400	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.193.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.107.200	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.805.900	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.997.800	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.303.500	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.085.800	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.500.800	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.585.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	489.499.600	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	489.499.600	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.999.700	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	401.360.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72.139.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.300.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.300.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.300.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.168.800	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	17.168.800	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	17.168.800	
7.01.0.00.0.00.06.0002	KELURAHAN SIANTAN TENGAH	529.319.390	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.150.690	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.065.690	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	856.690	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.132.500	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.875.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.201.500	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.085.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.500.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.585.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	489.623.700	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	489.623.700	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.981.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	420.375.700	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	53.266.400	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.600.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.600.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.600.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.945.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.945.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	15.945.000	
7.01.00.0.00.06.0003	KELURAHAN SIANTAN HILIR	525.573.400	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.136.800	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.676.800	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.135.400	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.399.400	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.142.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.460.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.460.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	491.563.600	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	491.563.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	400.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75.563.600	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.750.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.750.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.750.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.123.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.123.000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	15.123.000	
7.01.0.00.0.00.06.0004	KELURAHAN BATULAYANG	533.021.900	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.016.300	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.826.300	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.949.300	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.584.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.675.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.618.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.190.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.190.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	489.494.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	489.494.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15.999.900	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	400.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	73.494.100	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.680.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.680.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.680.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.831.600	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.831.600	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	16.831.600	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	28.752.549.620	
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	28.752.549.620	
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	28.752.549.620	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.638.408.520	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.178.500	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.378.500	
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.800.000	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.864.279.900	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.637.959.900	
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	226.320.000	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.650.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	32.650.000	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	254.800.600	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.841.000	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.418.700	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.500.000	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.317.900	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.723.000	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.566.870	
8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.566.870	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.572.650	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.488.250	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289.084.400	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.360.000	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.520.000	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.840.000	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	891.606.100	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	891.606.100	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	891.606.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	22.881.005.000	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	22.881.005.000	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.314.590.000	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	19.400.000.000	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	166.415.000	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	503.300.000	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	503.300.000	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	438.700.000	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	64.600.000	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	121.600.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	121.600.000	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	121.600.000	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	716.630.000	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	716.630.000	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	543.180.000	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	173.450.000	

**Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1	Belanja Pegawai	655.385.323.268
2	Belanja Barang dan Jasa	524.510.904.863
3	Belanja Bunga	1.200.000.000
4	Belanja Hibah	70.965.353.200
5	Belanja Bantuan Sosial	6.820.000.000
6	BELANJA MODAL	515.854.403.974
	Belanja Modal Tanah	17.214.236.120
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.303.050.133
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	115.067.386.765
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	337.942.223.856
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.235.259.900
	Belanja Modal Aset Lainnya	2.092.247.200
7	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000
	TOTAL	1.776.735.985.305

**Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan
Tahun Anggaran 2023**

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.550.000.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.500.000.000	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	20.550.000.000	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	78.500.000.000	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	16.500.000.000	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	62.000.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	78.500.000.000	
	Pembiayaan Netto	(57.950.000.000)	



**BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PONTIANAK**

Jl. Letnan Jendral Sutoyo, Telp/Fax (0561) 732509 / 741641
Kota Pontianak Pontianak - 81147, Kalimantan Barat